2023

LAPORAN
CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR ISTILAH vii
KATA PENGANTAR ix
RINGKASAN EKSEKUTIF x
BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS 1
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 6
A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan 6
A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti 6
A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik 32
A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila 67
B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi 93
B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti. 94
B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila 130
C. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP 144
C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan 145
D. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal 196
D.1. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan. 198
D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP. 215
D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi 225
D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya 228
E. Pengendalian dan Evaluasi PIP 237
E.1.Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan. 237
E.2.Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan. 268

F. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas 290
F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja 291
F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi.....310
F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan 347
F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian.....365
F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal.....395
F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi.....409
BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 426
BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN 429
BAB V PENUTUP……. 453

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP 3
Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalinnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan 6
Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 7
Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya 12
Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya 19
Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya 21
Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya 23
Tabel 2. 7. Indikator Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik 33
Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik 34
Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik 53
Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi 67
Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila 71
Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila 75
Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi 93
Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan 94
Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti 96
Tabel 2. 16 Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti 97
Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti 99
Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila 100
Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP 118
Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti 131
Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti 132
Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila 133
Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila 134
Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP 145

Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan .145
Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP 162
Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP.....175
Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP 182
Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal 197
Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.....198
Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP 201
Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfataan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP 216
Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfataan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP .218
Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT) 226
Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat 227
Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.....228
Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya 230
Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi 237
Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan 238
Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan 241
Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan 268
Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan276
Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel.....290
Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja.....291
Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja297
Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi311
Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Tahun 2023 316
Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi 326
Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan.....347
Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan.353
Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi 365
Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi 373
Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal ..395
Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal.....396
Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi.....409
Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi 415

Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja 427
Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP 429
Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi 435
Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP 438
Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal 441
Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP 444
Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen 446

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP.....2
Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total 426
Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program.....427

DAFTAR ISTILAH

ADKASI	: Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia
APIP	: Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah
ARJUNA	: Akreditasi Jurnal Nasional
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GBHIP	: Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IAP	: Indeks Aktualisasi Pancasila
IDEA	: *Indonesian E-Commerce Association*
IKU	: Indikator Kinerja Utama
K3HKP	: Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
Mapel	: Mata Pelajaran
Medsos	: Media Sosial
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NSPK	: Norma, standar, prosedur, dan kriteria
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Orsospol	: Organisasi Sosial dan Politik
Paskbiraka	: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
PDP	: Purnapaskibraka Duta Pancasila
PEMDA	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PIP	: Pembinaan Ideologi Pancasila
PJK	: Pancasila Jurnal Keindonesiaan
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMPRB	: Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PN	: Prioritas Nasional
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia

PPKn	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian *Output*
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang – Undang
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SINTA	: *Science and Technology Index*
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
TA	: Tahun Anggaran
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: *Training of Trainer*
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNY	: Universitas Negeri Yogyakarta
UIN	: Universitas Islam Negeri
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Katolik Widya Mandira
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bahwa Kepala dan Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah.

Laporan Capaian Program & Kegiatan Tahun 2023 bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) terhadap penggunaan anggaran BPIP tahun 2023.

Laporan Capaian Program & Kegiatan merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program atau kegiatan berlangsung, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPIP untuk dapat memenuhi setiap sasaran program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja). Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, mewujudkan Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia, juga sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam laku hidup rakyat Indonesia.

Jakarta, Januari 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dimandatkan dalam Rencana Strategis BPIP 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah;
3. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut dapat terwujud dengan dukungan sasaran program Kedeputian dan Sekretariat Utama. Sasaran Program dicapai dengan berbagai kegiatan teknis. Hubungan sasaran strategis dan sasaran program PIP dipetakan berikut ini:

PETA STRATEGIS BPIP

Capaian kinerja sasaran program merupakan kinerja pelaksanaan kegiatan yang melekat pada masing-masing sasaran. Pelaksanaan kegiatan periode Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi , komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
   a. Persentase penilaian atas efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 204%;
   b. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik dengan capaian 120%;
   c. Persentase penilaian atas efektivitas jaringan dan pembudayaan nilai Pancasila dengan capaian 201%.
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;
   a. Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%;
   b. Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%.
3. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP berupa Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 105%.
4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan atau keagamaan formal, dan lembaga pendidikan atau keagamaan nonformal dan informal;
   a. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan dengan capaian 124,6% ;
   b. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP dengan capaian 180%;
   c. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi dengan capaian 180%;

d. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan capaian 886%;

5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
   a. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang dimanfaatkan dengan capaian 98,12%;
   b. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan program Teknis PIP yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%.
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan.
   a. Layanan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dengan capaian 100%;
   b. Layanan pengawasan intern di lingkungan BPIP dengan capaian 100%;
   c. Layanan koordinasi pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, pengelolaan karier dan kinerja sumber daya manusia, kerumahtanggaan dengan capaian 100%;
   d. Layanan dukungan teknis dan administrasi bagi Dewan Pengarah, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan Pakar, dan Kelompok Ahli serta Hubungan Masyarakat dan Administrasi dengan capaian 100%;
   e. Layanan koordinasi dan penyusunan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, dan pembinaan penataan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi dengan capaian 100%;
   f. Layanan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan PIP dengan capaian 100%.

Hingga akhir periode Tahun 2023, berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2023 realisasi anggaran BPIP adalah 96.41% atau sebesar Rp335.364.672.060,00 dari alokasi pagu DIPA TA 2023 sebesar Rp347.841.015.000,00 Berikut adalah data realisasi anggaran BPIP periode Tahun 2023:

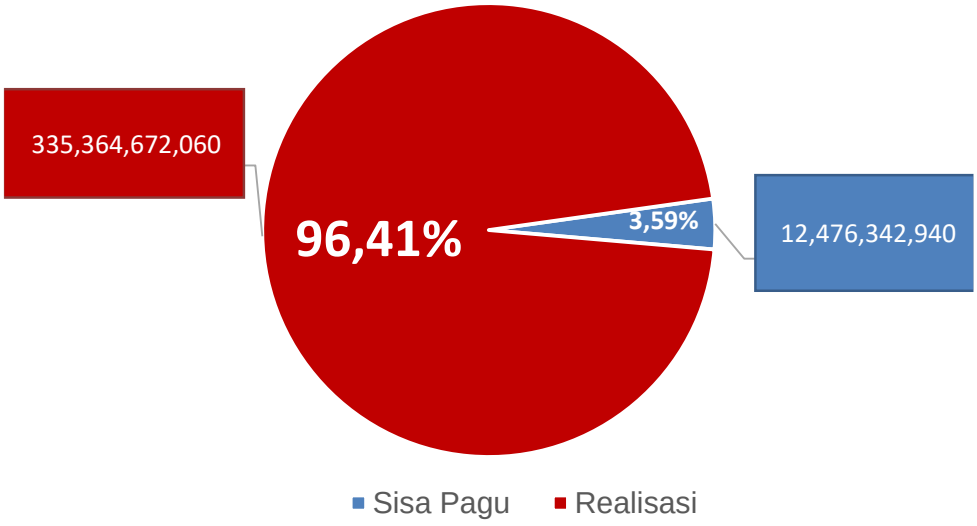

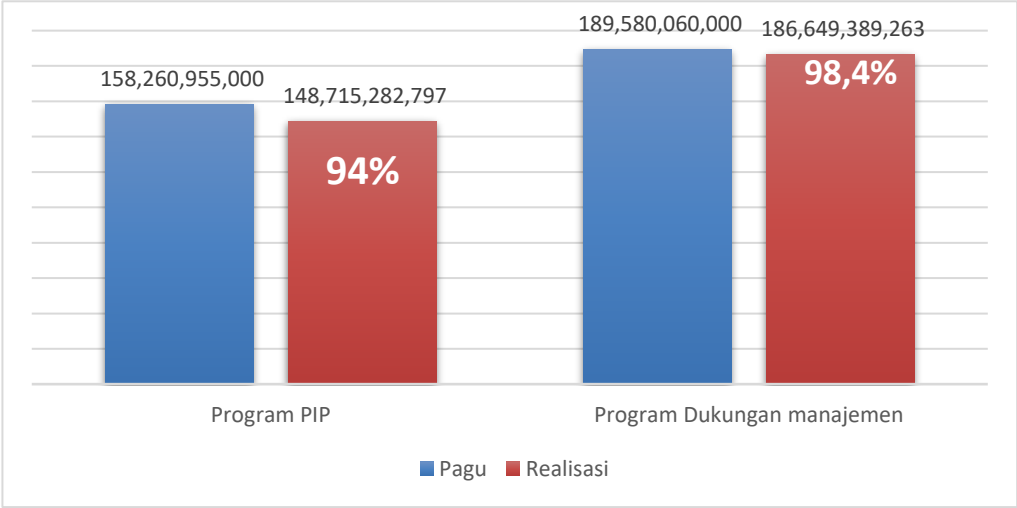

Realisasi Anggaran BPIP

Beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, antara lain adalah (i) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanaan tugas; (ii) mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk dapat meningkatkan kinerja pada

tahun selanjutnya; (iii) Mendorong pembentukan arah kebijakan PIP; (iv) Pembangunan sistem manajemen terintegrasi diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (v) Menyusun pedoman evaluasi PIP.

Pada Tahun 2023 optimalisasi pelaksanaan kegiatan diupayakan sesuai dengan *timeline* kegiatan, bila terdapat kendala teknis dan non teknis yang ada pada pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan perbaikan sesuai rencana aksi agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai guna terus membangun penguatan akuntabilitas kinerja, BPIP akan terus mengoptimalkan potensi yang ada untuk disinergikan dengan lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta aturan, arahan dan praktek yang tepat dalam revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB I PEMETAAN SASARAN STRATEGIS

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masuk dalam Program Prioritas Revolusi Mental dan PIP dengan sasaran memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Kegiatan Prioritas berupa PIP, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Cakupan kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh, yaitu:

1. PIP, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara;
2. Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum PIP;
3. Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
4. Membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

BPIP mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi Presiden yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. BPIP dengan program PIP menuju pada *outcome* hingga *impact* aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila menjadi satu-satunya ideologi negara dan teraktualisasikan dalam setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rencana strategis pelaksanaan Program PIP diarahkan mewujudkan 4 sasaran strategis BPIP, yaitu:

1. Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada Kementerian/Lembaga/ Daerah;
2. Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui dukungan sasaran program Kedeputian teknis dan Sekretariat Utama dukungan kapasitas organisasi. Sasaran program dicapai dengan berbagai kegiatan. Peta strategis keterkaitan sasaran-sasaran melalui pendekatan perspektif *stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan, serta dukungan kapasitas organisasi tampak pada Peta Strategis BPIP berikut ini.

Gambar 1.1 Peta Strategis BPIP

Tujuan sasaran-sasaran strategis BPIP sebagaimana telah dipetakan di atas, yaitu:

1. PIP melalui arah kebijakan penguatan PIP secara nasional;
2. BPIP sebagai koordinator PIP dalam menyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara;
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan sasaran strategis BPIP adalah, sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Ukuran Keberhasilan Sasaran Strategis BPIP

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Mewujudkan arah kebijakan penguatan PIP secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan PIP	Terwujudnya arah kebijakan PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional	Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden	5 Rekomendasi
Mewujudkan BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya BPIP sebagai koordinator dalam pelembagaan PIP dalam penyelenggaraan negara pada K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah	Persentase K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Provinsi yang melaksanakan institusionalisasi PIP	80%

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Menguatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: PIP; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara	Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP)	74
Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Reformasi Birokrasi	82,5
		Indeks Sistem Merit	0,75
		Opini Laporan Keuangan BPK	WTP
		Nilai SAKIP	BB
		Indeks Profesionalisme ASN	82,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90%

Kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang tercakup dalam Program PIP dan Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program, yaitu:

1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP;
2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi;
3. Terwujudnya perumusan perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP;

4. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal;
5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP;
6. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas.

BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

A. Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan

Sebagai Lembaga yang diberi mandat dalam PIP maka fungsi koordinasi dan sinkronisasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terjalinnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, dan Jaringan, serta Pembudayaan:

Tabel 2. 1. Indikator Keluaran Program terjalinnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, dan jaringan, serta pembudayaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI TAHUN 2023	KET
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100% (24K/L)	204% (49 K/L)	204%
Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik	4 Nilai	5 Nilai	120%
% penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	60% (100%=100 Pokmas)	121 Pokmas	201%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

A.1. Efektivitas Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Dalam Rangka Pengarusutamaan Ideologi Pancasila yang Ditindaklanjuti

Indikator Keberhasilan Program:

Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2023 adalah 100% (24 K/L).

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 204% (49 K/L/Pemda/Orsospol) dilakukan optimalisasi sebesar 23 K/L/Instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah serta 26 Organisasi Sosial dan Politik serta Organisasi dengan uraian capaian adalah:

a. Optimalisasi Kerja Sama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;

Pada tahun 2023 setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi kerja sama pembinaan ideologi Pancasila terhadap Kesepakatan yang telah di laksanakan khusus untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terdapat sebanyak sebanyak 13 Kementerian/Lembaga dan 10 Pemerintah daerah, dengan total 19 K/L/Instansi Pusat dan Daerah termasuk pemerintah daerah yang sudah sangat aktif melaksankanan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 2. 2. Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dialog Kebangsaan "Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" bersama Kemenko Polhukam dan Pemprov Jatim pada tanggal 16 Januari 2023	Deputi I
2	BKKBN	a. Pelaksanaan peluncuran "Program cukup 2 telur" bersama BKKBN dan TNI pada tanggal 23 Maret 2023 b. Program Percepatan Penurunan Stunting *Kick off meeting* Pancasila dalam tindakan gerakan semesta mencegah stunting, 16 Februari 2023 c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	Deputi I

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Nasional (BKKBN) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeklarasikan "Remaja Gotong Royong" berasal dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, Duta Genre dan Duta Damai Pencegahan Terorisme sebanyak 500 orang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional	
3	TNI	a. Pelaksanaan peluncuran “Program cukup 2 telur” bersama BKKBN dan TNI pada tanggal 23 Maret 2023 b. Kegiatan mengusung tema "Bersama Merawat Kebangsaan" tersebut, lantaran sebagai bentuk penghargaan kepada media digital yang turut merawat kebangsaan melalui 10 isu strategis. Tanggal 10 Juli 2023.	Deputi 1
4	DPRD Lampung	Bimtek Penguatan PIP bagi DPRD Lampung pada tanggal 21 s.d.22 Januari 2023	Deputi 4
5	KEMENDIKBUDRISTEK	Diskusi Kelompok Terpumpun Reviu Finalisasi Draf Capaian Pembelajaran dan alur	Deputi 3
		Pelaksanaan DKT Penelaahan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila bagi PAUD sampai Sekolah Menengah Atas, 20 Maret 2023	
		DKT pembahasan hasil penelaahan paripurna pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II (Finalisasi) Buku	

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di Bogor 27 maret 2023	
6	Pemerintah Kabupaten Toba	Toba Kaldera Festiwal Pancamain dan FGD Metode Pengendalian PIP, Bersama Kabupaten Toba 10 Maret 2023	Deputi 5
7	BRIN	Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila, 14 Maret 2022	Deputi 1
8	Radio Republik Indonesia	Dewan Pakar BPIP menjadi Narasumber pada Talk Show Kebangsaan di RRI Babel, 16 Maret 2023	
9	KEMENKUMHAM	Kegiatan penyusunan produk Hukum Daerah bersama Pemda Bali dan Kanwil Kemenkumham pada tanggal 18 Maret 2023	SESTAMA
10	Lemhannas	a. Pelibatan Narasumber dalam Bimtek Kepamongan dan Penyelenggara Pusdiklat, Pelaksanaan Pengibaran, dan Purnapaskibraka 19 s.d. 22 Maret 2023 b. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Peluncuran 58 Judul Buku di Ruang Dwi Warna Purwa bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Peluncuran 58 buku dilakukan oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Deputi 5

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
11	BNPT	a. Pelibatan Narasumber dalam Bimtek Kepamongan dan Penyelenggara Pusdiklat, Pelaksanaan Pengibaran, dan sampai Purnapaskibraka 19 s.d. 22 Maret 2023 b. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendeklarasikan "Remaja Gotong Royong"	Deputi 5
12	MPR	“Seminar Nasional: Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Antisipasi Ancaman Radikalisme Terhadap Persatuan Bangsa”. 5 Juni 2023	Deputi 2
13	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	a. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksekutif Nasional (PEN) pada 15 Juni 2023 dengan tema 'Pengembangan Nasionalisme Ekonomi Berbasis Pancasila'	Deputi 1
14	Provinsi Aceh	"Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih” di Kota Lhokseumawe, Aceh 17 Juni 2023	
15	Kemendagri	"Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih” Kegiatan kolaborasi dan gotong royong dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 17 Juni 2023	Deputi 1

No.	Kementerian/Lembaga	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
16	Pemerintah Kota Blitar	Seminar Jaringan Kota/Kabupaten Tapak Sejarah Bung Karno (Jaket Bung Karno) di Balai Kusumo Wicitro, Kota Blitar. 20 Juni 2023	Deputi 1
17	Pemerintah Kota Medan	Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan. 27 Juni 2023	Deputi 4
18	BPS	Rapat Ekspose yang membahas Laporan Pengukuran Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (IAP) Tahun 2021. 28 Juni 2023	Deputi 1
19	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Kampanye anti politik uang dengan tema "Hajar Serangan Fajar" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 14 Juli 2023	Deputi 1
20	Pemerintah Kota Bontang	Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi ASN Kota Bontang 11 Oktober 2023	Deputi 1
21	Pemerintah Kota Palu	Menghadiri HUT Kota Palu, 27 September 2023	Sestama
22	Pemerintah Kota Bitung	Deklarasi jaringan generasi milenial dan generasi Z Pancasila dan simposium nasional, 14 November 2023	Deputi 3
23	Pemerintah Kota Lebak	Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya Mahasiswa Lebak, Penguatan ASN Kab. Lebak, pertemuan perwakilan suku adat Kabupaten Lebak di Bayah.	Deputi 1

b. Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya.

Hingga tahun 2023 Jumlah total optimalisasi kerja sama setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepakatan yang telah di laksanakan khusus untuk universitas dan organisasi sosial politik dan masyarakat ada sebanyak 26 Universitas/Orsospolmas yang sudah aktif melaksanakanan dalam bentuk kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Universitas Diponegoro	a. Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Universitas Diponegoro pada tanggal 15 Februari 2023; b. Strategi Penerapan Materi Pembinaan Ideologi Panca sila Pada Jenjang Pendidikan Tinggi (Piloting pada Universitas 17 Agustus Jakarta, Cirebon dan Semarang) pada tanggal 16 s.d 18 Maret 2023 c. Pembumian Pancasila di Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang ke 66, 17 Maret 2023	Deputi 1
2.	Balai Pustaka	Diskusi Kelompok Terpumpun penyusunan Materi bersama Balai Pustaka pada tanggal 17 Maret 2023	Deputi 1
3.	UIN Sunan Kalijaga	a. Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Jurnal ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesian (PJK) Volume 3 Nomor 1 April 2023 b. Diskusi Kelompok Terpumpun	Deputi 3

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Perencanaan Jurnal Ilmiah Gotong Royong (GR) Bersama UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 20 s.d. 22 Maret 2023 di Yogyakarta; c. Perampungan Buku Saku Pengkajian PIP dan Tindak Lanjut Strategi Implementasi Buku Pendidikan Pancasila pada Pilloting Universitas 17 Agustus 1945, 29 s.d. 31 Maret 2023	
		d. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. memberikan ceramah keagamaan dan kebangsaan kepada civitas akademika di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jum'at, 31 Maret 2023	
4.	Universitas Negeri Jakarta	Penyelarasan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pancasila dan Pengolahan Buku Saku, 9 s.d. 11 Maret 2023	Deputi 3
5	Pusat Studi Pancasila UGM	a. Penyelarasan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pancasila dan Pengolahan Buku Saku, 9 s.d. 11 Maret 2023; b. Strategi Penerapan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Jenjang Pendidikan Tinggi (Piloting pada Universitas 17 Agustus Jakarta, Cirebon dan Semarang) pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2023 c. Strategi Penerapan Materi PIP Pada Jenjang Pendidikan Tinggi (Piloting pada	Deputi 3

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
		Universitas 17 Agustus Jakarta, Cirebon dan Semarang) pada tanggal 16 s.d. 18 Maret 2023 d. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi narasumber Kuliah Umum menjelang tarawih di Masjid kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Jum'at, 14 April 2023 e. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi *keynote speech* pada acara Sinergi Universitas Gajah Mada (UGM) dan Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama): Syawalan 1444 Hijriah dengan tema "Merawat Ukhuwwah Meneguhkan NKRI" di Balairung UGM, Yogyakarta, Sabtu, 7 Maret 2023	
6	Universitas Pendidikan Indonesia	a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila pada bulan Maret 2023 b. menerima audiensi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kunjungan yang diikuti 227 mahasiswa tersebut dalam rangka penguatan Ideologi Pancasila bagi calon Guru Sekolah Dasar (SD) UPI, Cibiru, Bandung Kamis, 4 Mei 2023.	Deputi 4
7	Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila pada bulan Maret 2023.	Deputi 4

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
8	Universitas Negeri Padang	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila pada bulan Januari s.d. Maret 2023.	Deputi 4
9	Universitas Indonesia	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila pada bulan Januari s.d. Maret 2023.	Deputi 4
10	IAIN Palangkaraya	Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila, 14 Maret 2023	Deputi 1
11	Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia	Ketua Dewan Pengarah BPIP memberikan pengarahan pada Peringatan Hari Desa Nasional ke-9 kepada 41.000 Kepala Desa, 19 Maret 2023	Settama
12	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI)	BPIP dan KPOTI Sumatera Utara gelar “Toba Kaldera Pancamain Indonesia Festival 2023” di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, 26 Maret 2023	Deputi 5
13	Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)	Kepala Badan BPIP memberikan Keynote Speech yang bertajuk “Pancasila dalam Politik dan Pemerintahan untuk Mewujudkan Kota Pancasila", memberikan arahan pada acara Penandatanganan kemitraan antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta, Selasa 4 April 2023	Deputi 1
14	IAIN Ternate	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku; Islam dan Pancasila Perspektif Mawashid Syariah di Kampus IAIN Ternate, Rabu 10 Mei 2023.	Deputi 1

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
15	Universitas Khairun	Kepala BPIP menjadi Narasumber Kuliah Umum di Universitas Khairun (Unkhair), Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kuliah Umum dengan tema "Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam Perspektif Kearifan Lokal Maluku Utara", 11 Mei 2023	Deputi 1
16	UIN Sunan Ampel	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) gelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Civitas Akademika UINSA, 17 Mei 2023	Deputi 1
17	Universitas Sebelas Maret (UNS)	Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai keynote speech pada Kuliah Umum, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) di Jakarta, Kamis, 18 Mei 2023. Kegiatan dengan tema "Tantangan Pembangunan Berkelanjutan dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi dan Tahun Politik"	Deputi 1
18	IAIN Kudus	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaunching "Teras Pancasila" di Kampus IAIN Kudus dan menjadi pidato kunci pada kegiatan Bedah Buku; Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D di IAIN Kudus, Kamis, 8 Juni 2023.	Deputi 1

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
19	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan pembekalan kepada 2.851 mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes). Mahasiswa Unnes akan terjun ke lapangan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar mampu menjadi Motor Penggerak Desa Pancasila atau Kampung Pancasila, 16 Juni 2023	Deputi 1
20	IAIN Lhokseumawe	Ratusan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe mengikuti Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema; "Gotong Royong Membumikan Nilai Pancasila", 18 Juni 2023	Deputi 1
21	Universitas Pancasila	a. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan *keynote speech* pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Pancasila di Pandeglang, 26 Juni 2023 b. BPIP dan UP menyelenggarakan bedah buku berjudul; "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang ditulis anggota Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP juga sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Pancasila UP, 19 Juli 2023	Deputi 1

No.	Universitas/ Orsospolmas	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
22	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	Pembinaan kolaborasi dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten dengan mengusung tema; "Islam, Pancasila dan Kebangsaan" itu, BPIP mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada eks Napiter karena sudah kembali ke Pancasila dan NKRI, 8 Juli 2023	Deputi 1
23	UIN Antasari Banjarmasin	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menjadi *Keynote Speaker* dalam Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan yang diselenggarakan di Auditorium Mastur Jahri, UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, 26 Juli 2023.	Deputi 1
24	Universitas Budi Luhur	Pembekalan kepada Mahasiswa Baru dalam Orientasi Pendidikan Tahun 2023	Deputi 4
25	Universitas Pamulang	Penguatan PIP bagi Mahasiswa Unpam, 15 November 2023	Deputi 1
26	Universitas Gadjah Mada	Pelepasan KKN Mahasiswa Penggerak Pancasila UGM periode 4, 15 Desember 2023	Deputi 1

Kegiatan-kegiatan di atas adalah pembentuk indikator keberhasilan.

Tabel 2. 4. Indikator Keluaran Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritras yang ditindaklanjuti	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas	10	16	160% (Kesepakatan)
	Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas	20	14	70% (Kesepakatan)
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non prioritas yang ditindaklanjuti	Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas)	1	1	100% (Kesepakatan)
	Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas	3	1	33% (Kesepakatan)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

Tahun ini dokumen Kerja sama yang harus dipenuhi sebanyak 34 dokumen kesepakatan yang terdiri dari dokumen kesepakatan Kementerian/Lembaga/Propinsi yang menjadi Prioritas Nasional sebanyak 10 Dokumen, sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 1 Dokumen.

Untuk dokumen Kesepakatan dengan Organisasi Masyarakat yang menjadi Prioritas Nasional sebanyak 20 Dokumen dan sedangkan yang tidak menjadi Prioritas Nasional sebanyak 3 Dokumen.

Pada Periode Tahun 2023 ini Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja sama jika dilihat berdasarkan skala prioritas untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah bidang prioritas sebesar 16 kesepakatan dari target 10 kesepakatan atau sebesar 160%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{capaian\ kesepakatan}{10\ target\ kesapakatan}$$

$$= \frac{16\ kesepakatan}{10\ target\ kesepakatan}$$

= 160%

Untuk Kesepakatan koordinasi dan sinkronisasi hubungan dengan organisasi sosial, politik, serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas mencapai 14 kesepakatan dari target 20 atau sebesar 70%, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{capaian\ kesepakatan}{20\ target\ kesapakatan}$$

$$= \frac{14\ kesepakatan}{20\ target\ kesepakatan}$$

= 70%

Untuk Kesepakatan pengembangan hubungan kemitraan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya (non prioritas) mencapai 1 paket kesepakatan dari target 1 kesepakatan atau sebesar 100% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{capaian\ kesepakatan}{1\ target\ kesapakatan}$$

$$= \frac{1\ kesepakatan}{1\ target\ kesepakatan}$$

= 100%

dan Untuk Kesepakatan dengan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non-prioritas mencapai 1 paket kesepakatan dari target 3 kesepakatan atau sebesar 33% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{capaian\ kesepakatan}{1\ target\ kesapakatan}$$

$$= \frac{1\ kesepakatan}{3\ target\ kesepakatan}$$

= 33%

Adapun capaian jumlah dokumen kerja sama hingga akhir periode tahun 2023 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen kerja sama yang sudah ditandatangani dari 34 dokumen yang menjadi *output* Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan kerja Sama dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Dokumen Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
1	Nota Kesepahaman	Mahkamah Agung	4 Januari 2023	Non PN
2	Nota Kesepahaman	LEMHANNAS	12 Januari 2023	PN
3	Nota Kesepahaman	BKKBN	7 Maret 2023	PN
4	Perjanjian Kerja Sama	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN (DENGAN DEPUTI 1)	7 Maret 2023	PN
5	Perjanjian Kerja Sama	Deputi Bdiang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN (DENGAN DEPUTI 5)	7 Maret 2023	PN

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
6	Nota Kesepakatan	Pemprov Bangka Belitung	16 Maret 2023	PN
7	Nota Kesepakatan	Kab Bangka Tengah	16 Maret 2023	PN
8	Nota Kesepakatan	Kab Bangka Selatan	16 Maret 2023	PN
9	Nota Kesepakatan	Kab Bangka Barat	16 Maret 2023	PN
10	Nota Kesepakatan	Kab Belitung	16 Maret 2023	PN
11	Nota Kesepakatan	Kab Belitung Timur	16 Maret 2023	PN
12	Nota Kesepakatan	Kota Pangkalpinang	16 Maret 2023	PN
13	Nota Kesepahaman	Lembaga Administrasi Negara	25 Juli 2023	PN
14	Perjanjian Kerja Sama	Deputi Penyelenggaraan dan Pengembangan Kompetensi LAN (dengan Deputi Diklat BPIP)	25 Juli 2023	PN
15	Nota Kesepakatan	Kabupaten Magelang	5 Agustus 2023	PN
16	Kemitraan	MUI	22 Mei 2023	PN
17	Perjanjian Kerja Sama	Univ Khairun	10 Mei 2023	PN
18	Perjanjian Kerja Sama	UIN Sunan Ampel	16 Mei 2023	PN
19	Perjanjian Kerja Sama	PSP UGM	17 Mei 2023	PN
20	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Pancasila	12 Juli 2023	PN
21	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Negeri Semarang	5 Agustus 2023	PN
22	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	5 Agustus 2023	PN
23	Perjanjian Kerja Sama	Adeksi		Non PN
24	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Bahaudin Mudhary	23 Agustus 2023	PN
25	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Trunojoyo Madura	24 Agustus 2023	PN
26	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Budi Luhur	18 September 2023	PN
27	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kota Bontang	11 Oktober 2023	PN

NO	Jenis Kerja Sama	PIHAK	Tanggal Kerja Sama	PN/Non PN
28	Perjanjian Kerja Sama	Universitas NU Indonesia	25 Oktober 2023	PN
29	Perjanjian Kerja Sama	UIN Sunan Kalijaga	10 November 2023	PN
30	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Pamulang	15 November 2023	PN
31	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kabupaten Lebak	5 Desember 2023	PN
32	Perjanjian Kerja Sama	Universitas Gadjah Mada	15 Desember 2023	PN

Aktivitas dan kilas peristiwa selama dalam rangka capaian kinerja Efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan Ideologi Pancasila yaitu:

Tabel 2. 6. Aktivitas Optimalisasi Kerja Sama Organisasi Sosial, Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Pembahasasn Tindak Lanjut Kerja Sama dengan LEMHANAS (Jakarta, tanggal 19 Januari 2023)	
2.	Audiensi dengan DEWAN PERS (Jakarta, tanggal 20 Januari 2023	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Audiensi dengan Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Jawa Barat (Jakarta, tanggal 24 Januari 2023)	
4.	Kegiatan pembahasan usulan kerjasama Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) (Jakarta, tanggal 24 Januari 2023)	
5.	Kegiatan penerimaan Audiensi Lembaga Perguruan Tingi Nahdatul Ulama (LPTNU) (Jakarta, tanggal 10 Februari 2023)	
6.	Dialog Gotong Royong Pembumian Pancasila Bumi Serumpun Sebalai (Bangka Belitung, tanggal 12 s.d. 13 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Penjajakan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka (Bangka Barat, tanggal 14 Februari 2023)	
8.	Kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Jejaring Panca Mandala Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bangka Belitung, tanggal 13 s.d. 15 Maret 2023)	
9.	Penandatanganan Kemitraan antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia (Jakarta, tanggal 4 April 2023)	
10.	Penjajakan dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) (Semarang, tanggal 9 s.d. 12 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Penjajakan dan Koordinasi dengan Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) (Yogyakarta, tanggal 17 April 2023)	
12.	Penjajakan dan Koordinasi lanjutan dengan PSP (Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2023)	
13.	Audiensi dengan Yayasan Shana Shanon Indonesia Banget dan Dewan Pimpinan Wilayah II Forum Silaturahmi (Jakarta, tanggal 9 Mei 2023)	
14.	Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPIP dengan Universitas Khairun Ternate (Ternate, tanggal 10 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPIP dengan UIN Sunan Ampel (Surabaya Barat, tanggal 16 Mei 2023)	
16.	Penerimaan Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) dan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya (UNS) (Surabaya, tanggal 17 Mei 2023)	
17.	Penandatanganan Kemitraan antara BPIP dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jakarta, tanggal 22 Mei 2023)	
18.	Rapat Koordinasi dan Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Semarang (Semarang, tanggal 08 s.d. 10 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Koordinasi Kerja Sama PIP melalui Program Eksekutif Nasional (PEN) (Jakarta, tanggal 15 s.d. 16 Juni 2023)	
20.	Koordinasi dan Pelepasan KKN Penggerak Pancasila UNNES tanggal (Surabaya, tanggal 16 Juni 2023)	
21.	Pembekalan Direktur HAL BPIP kepada Mahasiswa UNDIP yang akan melakukan KKN (Kabupaten Pemalang, tanggal 25 s.d. 28 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Tema ”Gotong Royong Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Program Eksekutif Nasional” (Jakarta, tanggal 25 Juli 2023)	
23.	Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPIP dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Perjanjian Kerja Sama antara BPIP dengan Universitas Negeri Semarang (Magelang, tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2023)	
24.	Penandatanganan Naskah Kerja Sama BPIP dengan Universitas UNIBA dan Kuliah serta Penandatanganan Naskah Kerja Sama antara BPIP dengan Universitas Trunojoyo (Jawa Timur, tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Rapat Koordinasi Kerja Sama Pembinaan Idelologi Pancasila Dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Tema: "Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Implemantasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (Bandung, tanggal 8 September 2023)	
26.	Koordinasi dan Penjajakan Kerjasama antara BPIP dengan Universitas Sriwijaya (Palembang, tanggal 10 s.d. 12 September 2023)	
27.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Optimalisasi Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila Dengan Perguruan Tinggi Melalui Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (Jakarta, tanggal 21 s.d. 23 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Penandatanganan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Bontang. (Bontang, tanggal 11 Oktober 2023)	
29.	Pembekalan KKN Pancasila Mahasiswa Unnes, (Semarang, tanggal 19 s.d. 20 Oktober 2023)	
30.	Penandatanganan Kerjasama dengan Universitas NU Indonesia. (Jakarta, tanggal 25 Oktober 2023)	
31.	Penandatanganan Kerjasama dengan Universitas Pamulang.(Tangerang Selatan, tanggal 15 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
32.	Penandatanganan Kerjasama dengan Pemkab Lebak. (Lebak, tanggal 5 Desember 2023)	
33.	Penandatanganan Kerjasama dengan UGM. Yogyakarta, 15 Desember 2023	

A.2. Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik

Indikator Keberhasilan Program

Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik. Target Tahun 2023 adalah 4 Nilai.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 5 Nilai dengan uraian capaian 120%. Untuk menentukan tingkatan nilai di atas dengan formulasi :

$$\text{Nilai Capaian Target} = \frac{\text{jumlah viewers (n)}}{\text{jumlah konten (n)}}$$

Adapun kategori nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 = 0-5 nilai (sangat tidak efektif)
- 2 = 6-10 nilai (tidak efektif)
- 3 = 11-15 nilai (cukup efektif)
- 4 = 16-20 nilai (efektif)
- 5 = 21-25 nilai (sangat efektif)

Hingga Tahun 2023 dukungan Deputi I terhadap capaian IKU tersebut Sangat Efektif hal ini terlihat pada capaian optimalisasi Tingkat efektivitas konten sosialisasi dan komunikasi pada media berbasis elektronik. Target Tahun 2023 adalah Empat (4) Nilai. Hingga Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7. Indikator Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
1	Sampan Rektor UIN Sunan Ampel	2023	1	133
2	Cerita Pancasila Menuju 1 Juni	2023	1	3495
3	BPIP Pancasila Virtual Expo	2023	1	3204
4	Sampan bersama H. Cecep Gogom Anggota DPRD Jabar	2023	1	327
5	Pancasila Dalam Tradisi Bau Nyale	2023	1	3352
6	Podcast Salam Pancasila Ikon Prestasi Pancasila 2022 Ipda. Ripal Indrawata	2023	1	343
7	Podcast Sampan Bersama Ketua Komisi II DPR RI	2023	1	663
8	Podcast Sampan Bersama Ikon Prestasi Pancasila 2022 I Made Janur Yasa	2023	1	202
9	Podcast Sampan Bersama Rektor Univ. Syah Kuala	2023	1	319
10	Podcast "SAMPAN" | Bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T.	2023	1	251
11	Penayangan Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2023	2023	1	180.262
12	Pancasila Virtual Expo Tahun 2023	2023	1	23.068
13	Sosialisasi Pancasila melalui Ruang Publik Kereta Api Commuter Line (Content Exposure Penumpang KRL)	2023	1	7.487.395
14	Penayangan/*Blocking Time* Anugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila Tahun 2023	2023	1	52.920.436
15	Podcast SAMPAN Bersama Wali Nagari Harau	2023	1	313
16	Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023	2023	1	223
17	Kaleidoskop BPIP Tahun 2023 “Sorot Balik Adicita Pancasila”	2023	1	119
18	Materi Video “Meskipun Beda Pilihan, Kita Harus Tetap Berteman”	2023	1	137
19	Podcast Sampan Bersama Titiek Puspa	2023	1	223

NO	Judul	Tahun	Qty	Viewers
20	Penayangan Peringatan Hari Ibu di CNN	2023	1	33.169.742
21	Peliputan Kegiatan Sosialisasi di 4 Lokus	2023	4	100.758.537
22	Penayangan Buku Teks Utama Pancasila	2023	1	767.000
23	Penayangan Kaleidoskop BPIP tahun 2023	2023	1	107.000
		Jumlah	**26**	**195.426.744**
		Nilai (view/qty konten)	**7.516.413**	
		Kategori Nilai	**5**	

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 8. Indikator Keluaran Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN 2023	KET
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah	4	4	100% (Layanan)
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	Layanan komunikasi melalui media massa	4	4	100% (Layanan)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

	Target	JUMLAH CAPAIAN	URAIAN
Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/aerah:		**4**	**layanan**
- Penyusunan materi	2	7	Paket
- Sosialisasi Pancasila di daerah	37	94	Lokus

	Target	JUMLAH CAPAIAN	URAIAN
- Sosialisasi di KL	4	4	K/L
- Sosialisasi pada Hari Besar	4	4	Kegiatan
Layanan komunikasi melalui media massa:		**4**	**layanan**
- Penyusunan materi komunikasi	2	5	Paket
- Pengembangan komunikasi melalui media TV	3	7	Program
- Pengembangan komunikasi melalui media cetak dan online	15	15	Program
- Pengembangan komunikasi melalui media radio	2	6	Program

a. Layanan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga/Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen, diantaranya:

1) Penyusunan Materi Sosialisasi di Media Sosial

Hingga akhir periode 2023 telah mencapai 7 (Tujuh) *output* kegiatan dengan uraian paket yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Audiensi Rencana Perumusan Pedoman Sosialisasi PIP melalui Klinik Pancasila bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,Kemenkumham	Jakarta, 5 Januari 2023	20 orang
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun "Penyusunan Materi Sosialisasi Pancasila Melalui Video Untuk Pelajar Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah" di Balai Pustaka, Jakarta	Jakarta, 17 Maret 2023	25 orang
3.	Pembuatan Video Sosialisasi PIP Melalui Konten Podcast Penguatan Nilai Pancasila Berbasis Agama	31 Maret s.d. 29 Mei 2023	6 Video

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
4.	Pembuatan Taping Konten dan Podcast pada Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan di PTNU	6 s.d.9 Maret 2023	15 orang, 1 Video Podcast
5.	Sosialisasi Pancasila melalui Ruang Publik Kereta Api *Commuter Line* (KRL)	25 Mei s.d. 20 Agustus 2023	1 Paket
6.	Pelaksanaan Penyusunan Materi Sosialisasi Pancasila di Daerah	Jakarta, 21 s.d. 23 Agustus 2023	70 orang
7.	Pembuatan Materi Sosialisasi di Ruang Publik Melalui Konten Digital	26 September s.d. 26 November 2023	3 Video

a) Pembuatan Video Sosialisasi PIP Melalui Konten *Podcast* Penguatan Nilai Pancasila Berbasis Agama. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 31 Maret s.d. 29 Mei 2023 menghasilkan 6 (enam) video dengan masing-masing judul sebagai berikut:
    a. Gus Muwafiq: Ulama Memiliki Peran Besar dalam Penguatan Pancasila
    b. Ajaran Katholik dalam Memperkuat Ideologi Pancasila
    c. Ajaran Mencintai Bangsa dalam Agama Hindu
    d. Alissa Wahid: Penguatan Ideologi Pancasila
    e. Jejak Perjuangan Gus Dur dalam Memperjuangkan Persatuan
    f. Pancasila dalam Sejarah Islam di Indonesia

b) Sosialisasi Pancasila melalui Ruang Publik Kereta Api *Commuter Line* (KRL). Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 25 Mei s.d. 20 Agustus 2023

dengan maksud yaitu mengarusutamakan Pancasila yang lebih massif dan menarik untuk masyarakat melalui pemasangan iklan secara digital di Kereta Api *Commuter Line* (KRL) dengan perhitungan impression/orang yang terekspos iklan adalah:

PERHITUNGAN IMPRESSION		
Variabel	**Jumlah**	**Satuan**
Rataan Jumlah Penumpang KRL per Hari (JUNI 2023)	800,000	Orang
Jumlah KRL	784	Rangkaian
Jumlah KRL dengan PID MacroAd	231	Rangkaian
Jumlah Penumpang KRL yang Terekspose Iklan di PID MacroAd/Hari	235,714	Orang
Jumlah Jam Operasional Kereta	17	Jam
Jumlah Penumpang KRL yang Terekspose Iklan di PID MacroAd/Jam	13,866	Orang
Jumlah Spot Iklan/hari	10	Spot
Jumlah Penumpang Terekpose Iklan/hari	138,655	Orang
Jumlah Hari Tayang	54	hari
Total Jumlah Penumpang Terkspose iklan	**7,487,395**	**Orang**

c) Pembuatan Materi Sosialisasi di Ruang Publik Melalui Konten Digital Hasil perhitungan Nielsen untuk jumlah titik media luar ruang yang ada di 11 kota di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 3000 titik dan 36 persennya terdapat di wilayah Jabodetabek. Billboard mendominasi dengan 43 persen disusul oleh Baliho sebesar 18 persen dan 14 persen berikutnya dalam bentuk *LED*. Temuan tersebut memperlihatkan potensi peluang yang besar bagi BPIP untuk memaksimalkan penggunaan media luar ruang dalam menyebarluaskan konten Pancasila. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 26 September s.d 26 November 2023 yang terdiri dari 3 jenis video yaitu *Animasi 2D, Commercial Ads, dan Motion Grafis*.

2) Sosialisasi Pancasila di Daerah

Pada Tahun 2023 telah mencapai 94 (empat puluh tujuh) *output* dimana uraian lokus diantaranya :

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembuatan Materi PIP pada Festival Bau Nyale	NTB, 9-12 Februari 2023
2.	Dialog Kebangsaan "Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sebagai Landasan Pembangunan Berpedoman Pada Ideologi Pancasila"	Semarang, 15 Februari 2023
3.	Sosialisasi Pancasila melalui Kegiatan Sekolah Toleransi	Bali, 22 Februari 2023
4.	Sosialisasi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D." di UIN Mataram	Mataram, 28 Februari 2023
5.	Sosialisasi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D." di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Bima	Bima, 2 Maret 2023
6.	Leaders Gathering Sosialisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Medan	Medan, 8 Maret 2023
7.	Sosialisasi Pancasila Kepada Kors Mubaligh Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) dengan tema "Mengaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju	Bogor, 18 Maret 2023
8.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku Salam Pancasila di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta	Yogyakarta, 15 April 2023
9.	Ngabuburit Kebangsaan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	Yogyakarta, 17 April 2023
10.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Pendidikan Karakter Mahasiswa Nasionalis dan Patriotik Generasi Z) di Surabaya	Surabaya, 7 Mei 2023
11.	Seminar Nasional dan Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif	Makassar, 8 Mei 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
	Maqasid Al-Syariah" di UIN Alauddin Makassar	
12.	Sosialisasi Pancasila melalui Bedah Buku Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., di IAIN Ternate	Ternate, 10 Mei 2023
13.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syari'ah di UIN Sunan Ampel	Surabaya, 16 Mei 2023
14.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Kegiatan Diskusi Publik "Aktualisasi Pancasila Dalam Pandangan Pemuda di Kabupaten Jepara"	Jepara, 7 Juni 2023
15.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid" di IAIN Kudus	Kudus, 8 Juni 2023
16.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Gotong Royong Membumikan Pancasila" di IAIN Lhokseumawe	Lhokseumawe, 17 Juni 2023
17.	Sarasehan dan Sosialisasi Pancasila Dalam Rangka Penguatan Ukhuwah Kebangsaan Bagi Civitas Akademika Perguruan Tinggi & Pelajar SLTA di IAIN Ngawi	Ngawi, 22 Juni 2023
18.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global"	Karo, Sumatera Utara, 7 Juli 2023
19.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Eks Napiter "Islam, Pancasila dan Kebangsaan"	Banten, 8 Juli 2023
20.	Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila "Pancasila Dari Indonesia Untuk Dunia"	Universitas Pancasila, Jakarta, 18 Juli 2023
21.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pelajar SMAN Se-Kota Bekasi "Gen Z, Pancasila dan Masa Depan Indonesia"	Bekasi, 20 Juli 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
22.	Pelaksanaan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan	Banjarmasin, tanggal 26 Juli 2023
23.	Seminar Pancasila "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbangsa dan Bernegara Menyongsong Pemilu yang Aman dan Damai	Kapuas, 27 Juli 2023
24.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bumi Tambun Bungai	Palangkaraya, 28 Juli 2023
25.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D." di UIN Jember, Jawa Timur	Jember, 03 Agustus 2023
26.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Peran AGPAII dalam Menyemai Ideologi Pancasila"	Pamulang, 08 Agustus 2023
27.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila Memperkokoh Persatuan Dalam Berbangsa dan Bernegara Bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Balikpapan, 10 Agustus 2023
28.	Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka	Jakarta, 22 Agustus 2023
29.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura	Bangkalan, 25 Agustus 2023
30.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Wicara dan Amal Pancasila	Yogyakarta, 28 Agustus 2023
31.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Kegiatan Festival Pasa Harau Art & Culture 2023	Kab. Lima Puluh Kota, 1 s.d. 3 September 2023
32.	Sosialiasasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.'' di UIN Raden Fatah, Palembang	Palembang, 14 September 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
33.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Tribakti Kediri, Jawa Timur	Kediri, 18 Oktober 2023
34.	Seminar Nasional Relasi Agama dan Pancasila Dalam Perspektif Aswaja di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang	Jombang, 20 Oktober 2023
35.	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Jakarta, 25 Oktober 2023
36.	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Para Santri Al Ashriyyah Nurul Iman Boarding School Parung	Bogor, 26 Oktober 2023
37.	Seminar Nasional Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal" di Ambon, Maluku	Ambon, 30 Oktober 2023
38.	Sosialiasasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku "Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.'' di UIN Sumatera Utara	Medan, 4 November 2023
39.	Bedah Buku dan Dialog Kebangsaan bersama Lingkar Kajian Komunikasi dan Pemberdayaan Sosial di Tasikmalaya, Jawa Barat	Tasikmalaya, 11 November 2023
40.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Peresmian Djoglo Soekarno di Wonosobo	Wonosobo, 18 November 2023
41.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila "Berkhidmat Untuk Peradaban Pesantren Demi Kejayaan NKRI"	Depok, 19 November 2023
42.	Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Siswa MA/SMA/SMK Se Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Tapanuli Selatan, 02 Desember 2023
43.	Pancasila Dalam Tindakan: Gotong Royong Menurunkan Stunting di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta	Yogyakarta, 09 Desember 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
44.	Sosialisasi PIP "Menyongsong Pemilu Damai, Demokratis dan Berintegritas Berdasarkan Pancasila di Gorontalo	Gorontalo, 13 Desember 2023
45.	Sosialisasi PIP Melalui Musik Kebangsaan di Solo	Solo, 16 Desember 2023
46.	Sosialisasi PIP Melalui Kuliah Umum Kebangsaan di Samarinda	Samarinda, 23 Desember 2023
47.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Ciamis, Jawa Barat	Ciamis , 12 September 2023
48.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Brebes, Jawa Tengah	Brebes, 16 September 2023
49.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pandeglag, Banten	Pandeglang, 20 September 2023
50.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Samarinda, Kalimantan Ttimur	Samarinda, 22 September 2023
51.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Klaten, Tengah	Klaten, 23 September 2023
52.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Samarinda, Kalimantan Timur	Samarinda, 24 September 2023
53.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Banjarmasin, 26 September 2023
54.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Brebes, Jawa Tengah	Brebes, 2 Oktober 2023
55.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Wakatobi, 10 Oktober 2023
56.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Banjarmasin, 10 Oktober 2023
57.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Banjarmasin, 13 Oktober 2023
58.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Majalaya, Jawa Barat	Majalaya, 14 Oktober 2023
59.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Karanganyar, Jawa Barat	Karanganyar, 15 Oktober 2023
60.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Purbalingga, Jawa Barat	Purbalingga, 15 Oktober 2023
61.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara	Kendari, 19 Oktober 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
62.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pringsewu, Lampung	Pringsewu, 20 Oktober 2023
63.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Bandung, Jawa Barat	Bandung, 20 Oktober 2023
64.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Padang, Sumatera Barat	Padang, 20 Oktober 2023
65.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Metro, Lampung	Metro, 23 Oktober 2023
66.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Tuban, Jawa Timur	Tuban, 25 Oktober 2023
67.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Sukabumi, Jawa Barat	Sukabumi, 25 Oktober 2023
68.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Jakarta Timur, DKI Jakarta	Jakarta Timur, 29 Oktober 2023
69.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, 30 Oktober 2023
70.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Baubau, Sulawesi Tenggara	Baubau, 31 Oktober 2023
71.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Ponorogo, Jawa Timur	Ponorogo, 31 Oktober 2023
72.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, 1 November 2023
73.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Jayapura, Papua	Jayapura, 1 November 2023
74.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, 2 November 2023
75.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Probolinggo, Jawa Timur	Probolinggo, 2 November 2023
76.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pekanbaru, Riau	Pekanbaru, 4 November 2023
77.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Bali	Bali, 4 November 2023
78.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Asahan, Sumatera Utara	Asahan, 6 November 2023
79.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Karawang, Jawa Barat	Karawang, 6 November 2023
80.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Jember, Jawa Timur	Jember, 6 November 2023
81.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Pati, Jawa Timur	Pati, 6 November 2023
82.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Lampung	Lampung, 6 November 2023
83.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi	Pematang Siantar, 7

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
	II DPR RI di Pematang Siantar, Sumatera Utara	November 2023
84.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Langkat, Sumatera Utara	Langkat, 8 November 2023
85.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Payakumbuh, Sumatera Barat	Payakumbuh, 10 November 2023
86.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Cikarang, Jawa Barat	Cikarang, 13 November 2023
87.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Purwokerto, Jawa Tengah	Purwokerto, 13 November 2023
88.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Padang Sidempuan, Sumatera Utara	Padang Sidempuan, 13 November 2023
89.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Bantul, Yogyakarta	Bantul, 18 November 2023
90.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Krui, Lampung	Krui, 18 November 2023
91.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Kuningan, Jawa Barat	Kuningan, 19 November 2023
92.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan	Makassar, 19 November 2023
93.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Lampung	Lampung , 24 November 2023
94.	Sosialisasi Pancasila Bersama Komisi II DPR RI di Grobogan/Pati, Jawa Tengah	Grobogan/Pati, 25 November 2023

3) Sosialisasi Pancasila di Lingkungan Kementerian/Lembaga

Pada tahun 2023 telah mencapai 4 (empat) *output* dimana dengan uraian yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
1.	Pancasila Dalam Tindakan "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual Pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana"	Jakarta, 16 Februari 2023	2000 orang

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan (Jumlah Peserta)
2.	Penguatan Ideologi Pancasila "Pancasila Sebagai Landasan Geopolitik Indonesia"	Jakarta, 21 Juli 2023	350 orang
3.	Sosialisasi Aktualisasi Pancasila pada Tata Kelola Instansi Pemerintah di Jakarta	Jakarta, 12 Mei 2023	250 orang
4.	Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban	Jakarta, 22 Mei 2023	350 orang

4) Sosialisasi Pancasila Pancasila Pada Peringatan Hari Besar Nasional

Pada tahun 2023 telah mencapai 4 (empat) *output* dimana dengan uraian kegiatan diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Uji Kelayakan Penggunaan dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2023	Jakarta, 27 Mei 2023	40 orang
2.	Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2023	Jakarta, 28 Mei 2023	1065 users
3.	Pancasila Virtual Expo Tahun 2023	1 Juni s.d. 18 Agustus 2023	23.068 users
4.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023	Yogyakarta, 22 Oktober 2023	1000 orang

a) Pancasila *Virtual Expo* Tahun 2023. Dilaksanakan sehubungan Pelaksanaan kegiatan Hari lahir Pancasila yang berlangsung mulai tanggal 1 Juni s.d. 18 Agustus 2023. Merupakan salah satu bentuk sosialisasi Pancasila

diantaranya melalui pengadaan pameran. Perkembangan inovasi kini bentuk pameran dapat dilakukan secara virtual, selain tatap muka. Pada dasarnya pameran virtual termasuk dalam kategori multimedia, karena berisi konten yang terdiri dari penggabungan beberapa media, seperti suara, gambar/visual dan juga teks. Adapun jumlah pengguna/users yang login dan registrasi hingga akhir periode yaitu:

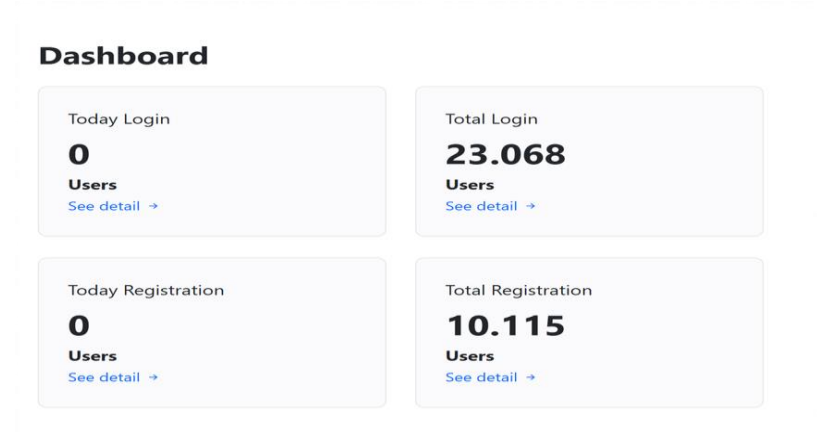

b.) Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023. Pada tanggal 21 Juli 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 350 Orang

b. Layanan komunikasi melalui media massa

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri dari 4 layanan yang dirincikan pada masing-masing komponen, diantaranya:

1) Penyusunan Materi Komunikasi

Pada Tahun 2023 telah mencapai 5 (lima) *output* kegiatan dengan uraian paket diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
1.	Penguatan Komunikasi Pancasila Melalui Koordinasi Bersama Awak Media (TV One dan ANTV)	Jakarta, 09 Januari 2023

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan
2.	Pembuatan Materi Komunikasi Melalui Podcast "SAMPAN" bersama H. Cecep Gogom Anggota DPRD Jawa Barat	Bogor, 17-19 Maret 2023
3.	Pembuatan Materi Komunikasi: Pancasila Dalam Tradisi Bau Nyale	NTB, 9 s.d. 12 Februari 2023
4.	Pembuatan Konten Pembumian Nilai Pancasila dalam Kegiatan Festival Pasaharau Art & Culture Festival 2023	Sumatera Barat, 31 Agustus s.d. 4 September 2023
5.	Pembuatan Materi Komunikasi Video Buku Teks Utama Pancasila pada Pembelajaran Tingkat SD	31 Oktober s.d. 29 Desember 2023

2) Pengembangan Komunikasi melalui Media TV

Pada Tahun 2023 telah mencapai 7 (tujuh) *output* kegiatan dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	Produksi dan Penayangan Siaran Langsung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023	Jakarta, 01 Juni 2023	TVRI, 182.262
2.	Blocking Anugerah Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila Tahun 2023	Bandung, 11 September 2023	CNN Indonesia
3.	Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Tahun 2023	Yogyakarta, 22 Oktober 2023	iNews TV, 1.152 (youtube)
4.	Peliputan Kegiatan 4 lokus (Lebak, Gorontalo, Gunung Kidul dan Pelepasan KKN UGM)	Yogyakarta 11 Desember 2023, Banten 12 Desember 2023, Gorontalo 14 Desember 2023, Yogyakarta 17 Desember 2023	CNN Indonesia, 100.761.181 (Total)

No	Nama Kegiatan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
5.	Penayangan/*Blocking Time* Buku Teks Utama Pancasila pada tanggal 19 Desember	Jakarta, 19 Desember 2023	Kompas TV, 767.824
6.	Penayangan/*Blocking Time* Peringatan Hari Ibu Tahun 2023	Jakarta, 23 Desember 2023	CNN Indonesia, 33.218.807
7.	Penayangan/*Blocking Time* Kaleidoskop BPIP	23 Desember 2023	Kompas TV, 375.076

1. Penayangan Siaran Langsung Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2023

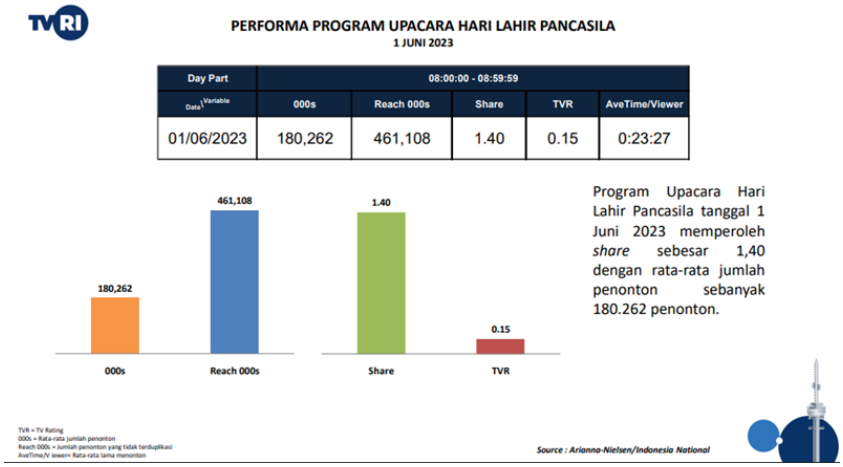

2. Penayangan/*Blocking Time* Anugerahan Ikon Prestasi Pancasila dan Insan Pancasila Tahun 2023.

3. Peliputan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Tahun 2023 tanggal 22 Oktober 2023 di iNews TV.
4. Peliputan Kegiatan 4 lokus (Lebak, Gorontalo, Gunung Kidul dan Pelepasan KKN UGM) di CNN TV.

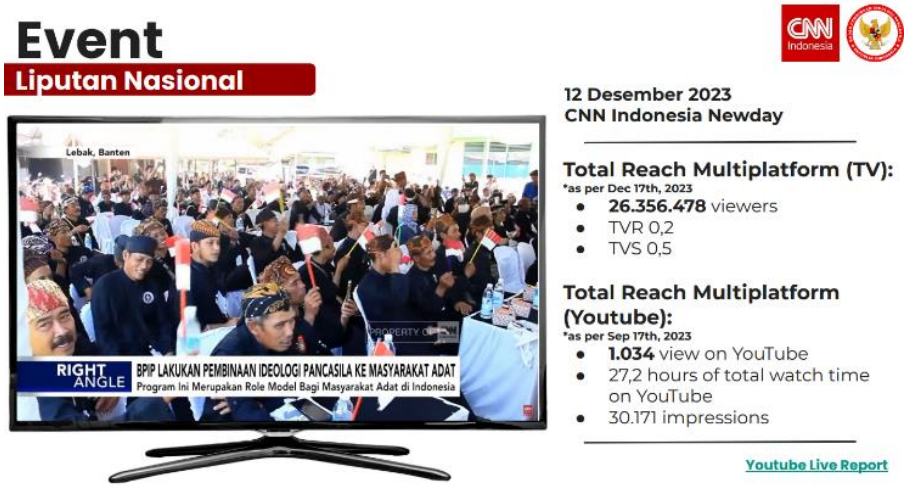

5. Penayangan/Blocking Time Buku Teks Utama Pancasila pada tanggal 19 Desember 2023 di Kompas TV.

PERFORMANCE KOMPAS TV

		Target	MF 15+ UPPER			ALL PEOPLE		
Date	Program	Program Type	TVR	Share	Index	TVR	Share	Index
19/12/2023	SEMINAR PANCASILA	News:TalkShow	0.32	1.49	142	0.22	0.93	100
20/12/2023	SAPA INDONESIA PAGI(F05)	News:TalkShow	0.15	1.99	73	0.21	2.29	100

- Penayangan Program Blocking Seminar Pancasila & Sapa Indonesia Pagi Segmen 6 di Kompas TV mendapat performance yang baik
- Performance tertinggi pada TA MF 15+ Upper mencapai TVR 0.32, Share 1.49 dan Index 142

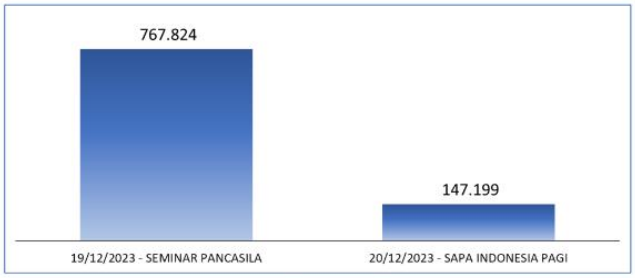

Program Blocking Seminar Pancasila berhasil menjangkau sampai **767 ribu pemirsa** dan Segmen 6 di program Sapa Indonesia Pagi berhasil menjangkau sampai **147 ribu pemirsa di 11 kota Nielsen** (Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang & Banjarmasin) .

6. Penayangan/Blocking Time Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 tanggal 23 Desember 2023 di CNN TV

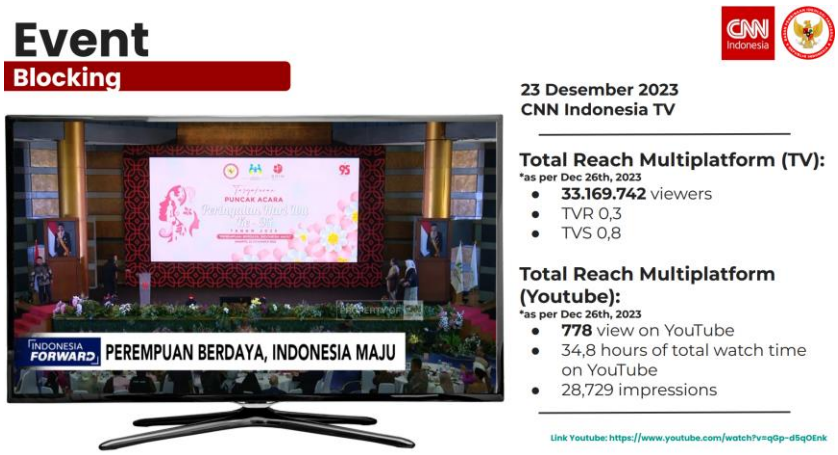

7. Penayangan/Blocking Time Kaleidoskop BPIP tanggal 23 Desember 2023 di Kompas TV

PERFORMANCE PROGRAM BLOKING BPIP

Date	Program	Program Type	Target	TVR	Share	Index
28/12/2023	KALEIDOSKOP	Information:Documentary	MF 15+ UPPER	0.40	2.40	204
			Total Individuals	0.20	0.99	100

- Penayangan Program Kaleidoskop di Kompas TV mendapat performance yang baik
- Performance pada TA MF 15+ UPPER mendapat TVR 0.40, Share 2.40 dan Index 204

AUDIENCE REACH

Periode : 28 Desember 2023

Market : 11 Cities Nielsen

Program Kaleidoskop Blocking dari BPIP pada 28 Desember 2023 berhasil menjangkau **107 ribu pemirsa dengan TA 15+ Upper** atau sekitar **375 ribu di 11 kota Nielsen** (Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang & Banjarmasin) .

Universe MF 15+ Upper : 10,127,628
Universe All People : 44,976,435

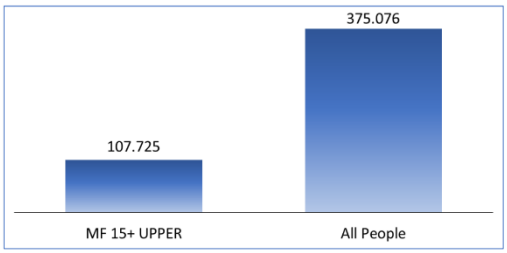

3) Pengembangan Komunikasi melalui Media Cetak dan *Online*

Pada Tahun 2023 telah mencapai 15 (lima belas) *output* kegiatan untuk Pengadaan yang Dikecualikan Industri Kreatif Dalam Rangka Pemberitaan dan Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Media Online	Pelaksanaan	Keterangan (Spot Jumlah Pemberitaan)
1.	Media Online Channel9.id	08 Maret s.d. 03 Agustus 2023	81 pemberitaan
2.	Media Online IDNTimes.com	14 Maret s.d. 09 Agustus 2023	17 pemberitaan, 18 artikel
3.	Media Online Tribun News (Tribunnews.com)	28 Mei s.d. 03 Agustus 2023	20 pemberitaan, 2 *Instagram Placement*
4.	Media Online TV One News (tvOneNews.com)	23 Mei s.d. 09 Oktober 2023	48 pemberitaan
5.	Media Online Detik.com, CNNIndonesia.com	22 Mei s.d. 09 September 2023	15 pemberitaan
6.	Media Online Medcom.id, MediaIndonesia.com	10 Maret s.d. 06 Juni 2023	10 pemberitaan, 30 artikel
7.	Media Online Republika.com	08 Maret s.d. 06 September 2023	50 pemberitaan
8.	Media Online MNC Portal (Sindonews.com, iNews.id, Okezone.com)	14 Maret s.d. 22 September 2023	36 pemberitaan
9.	Media Online Antaranews.com	08 Maret s.d. 08 September 2023	70 pemberitaan, 10 *instagram placement*
10.	Media Online JPNN.com	09 Maret s.d. 25 Agustus 2023	50 pemberitaan, 30 *post social media*
11.	Media Online Tempo.co	09 Maret s.d. 13 September 2023	50 pemberitaan
12.	Media Online Pikiran-Rakyat.com	21 Maret s.d. 12 September 2023	31 pemberitaan
13.	Media Online Emtek Digital (Liputan6.com dan Merdeka.com)	29 Mei s.d. 24 September	26 pemberitaan
14.	Media Online RM.id (Rakyat Merdeka)	10 Maret s.d. 11 Agustus 2023	90 pemberitaan
15.	Media Online Kumparan.com	05 Mei s.d. 10 Agustus 2023	15 pemberitaan

4) Pengembangan Komunikasi melalui Media Radio

Pada Tahun 2023 telah mencapai 6 (enam) *output* kegiatan dengan uraian program diantaranya yaitu:

No	Nama Program dan Media	Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penyiaran di Radio Republik Indonesia	24 s.d. 30 November 2023	26 story IG, 14 post X, 100 spot penyiaran
2.	Penyiaran di Maksima Radio Network (Prambors, Delta, Female, Bahana)	25 September s.d. 24 November 2023	-
3.	Penyiaran di Most FM	25 September s.d. 24 November 2023	-
4.	Penyiaran di Radio Pelita Kasih	25 September s.d. 24 November 2023	56 adlibs, 3 feed IG, 3 feed FB, 13 story IG, 13 post story FB, 2 produksi spot, 147 spot penyiaran
5.	Penyiaran di Radio Elshinta	25 September s.d. 24 November 2023	3 feed IG, 13 story IG, 28 adlibs primetime, 84 spot penyiaran
6.	Penyiaran di Gen FM	25 September s.d. 24 November 2023	Insert PT 10x, 42 adlibs, 3 feed IG, 13 story IG, 2 produksi spot, 42 spot penyiaran

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Efektivitas Metode/media Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan yaitu:

Tabel 2. 9. Aktivitas Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Audiensi Rencana Perumusan Pedoman Sosialisasi PIP melalui Klinik Pancasila bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, KEMENKUMHAM (Jakarta, tanggal 5 Januari 2023)	
2.	Audiensi Kepada Pemerintah Kota Bekasi (Bekasi, tanggal 26 Januari 2023)	
3.	Menghadiri Undangan PBNU (Surabaya, tanggal 6 s.d. 7 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Koordinasi dan Pembuatan Materi PIP pada Festival Bau Nyale (NTB, tanggal 9 s.d. 12 Februari 2023)	
5.	Dialog Kebangsaan "Peran Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Sebagai Landasan Pembangunan Berpedoman Pada Ideologi Pancasila" (Semarang, tanggal 14 s.d. 16 Februari 2023)	
6.	Kick Off Meeting Pancasila Dalam Tindakan "Gerakan Semesta Berencana Mencegah *Stunting*, Kekerasan Seksual Pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengantisipasi Bencana" (Jakarta, tanggal 16 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Koordnasi Pembuatan Taping Konten dan Podcast pada Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan di PTNU (Medan, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023)	
8.	Diskusi Kelompok Terpumpun "Penyusunan Materi Sosialisasi Pancasila Melalui Video Untuk Pelajar Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah" (Jakarta, tanggal 17 Maret 2023)	
9.	Kegiatan Sosialisasi PIP melalui Bedah Buku Salam Pancasila di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 15 April 2023)	
10.	Ngabuburit Kebangsaan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 17 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Audiensi dan Sosialisasi Pancasila Bersama Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung (Jakarta, tanggal 4 Mei 2023)	
12.	Sosialisasi PIP Pendidikan Karakter Mahasiswa Nasionalis dan Patriotik Generasi Z (Surabaya, tanggal 7 Mei 2023)	
13.	Sosialisasi Aktualisasi Pancasila pada Tata Kelola Instansi Pemerintah (Jakarta, tanggal 12 Mei 2023)	
14.	Pelaksanaan Kegiatan Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban (Jakarta, tanggal 22 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2023 (Jakarta, tanggal 28 Mei 2023)	
16.	Produksi dan Penayangan Siaran Langsung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 1 Juni 2023)	
17.	Pelaksanaan Rapat dengan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (Jakarta, tanggal 6 Juni 2023)	
18.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Kegiatan Diskusi Publik “Aktualisasi Pancasila Dalam Pandangan Pemuda di Kabupaten Jepara” (Kabupaten Jepara, tanggal 7 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila “Gotong Royong Membumikan Pancasila” di IAIN Lhokseumawe (Aceh, tanggal 17 Juni 2023)	
20.	Sarasehan dan Sosialisasi Pancasila Dalam Rangka Penguatan Ukhuwah Kebangsaan Bagi Civitas Akademika Perguruan Tinggi & Pelajar SLTA (Ngawi, tanggal 22 Juni 2023)	
21.	Sarasehan dan Sosialisasi Pancasila Dalam Rangka Penguatan Ukhuwah Kebangsaan Bagi Civitas Akademika Perguruan Tinggi & Pelajar SLTA (Jakarta, tanggal 27 Juni 2023)	
22.	Pelaksanaan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kerangka Peneguhan Integritas Kebangsaan di Banjarmasin (Banjarmasin, tanggal 26 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
23.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bumi Tambun Bungai (Palangkaraya, tanggal 28 Juli 2023)	
24.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku “Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah” (Jember, tanggal 3 Agustus 2023)	
25.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila “Peran AGPAII dalam Menyemai Ideologi Pancasila” (Pamulang, tanggal 8 Agustus 2023)	
26.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila Memperkokoh Persatuan Dalam Berbangsa dan Bernegara di Balikpapan (Kalimantan TImur, tanggal 10 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	Pelaksanaan Penyusunan Materi Sosialisasi Pancasila (Jakarta, tanggal 21 s.d. 23 Agustus 2023)	
28.	Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (Jakarta, tanggal 22 Agustus 2023)	
29.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Trunojoyo (Bangkalan, tanggal 10 Agustus 2023)	
30.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Wicara dan Amal Pancasila (Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Kegiatan Festival Pasa Harau *Art & Culture* 2023 (Sumatera Barat, tanggal 1 s.d. 3 September 2023)	
32.	Pembuatan Podcast dan Konten Bersama Bupati Lima Puluh Kota (Sumatera Barat, tanggal 2 September 2023)	
33.	Pembuatan Podcast dan Konten Bersama Wali Nagari Harau serta Ninik Mamak Kota di Kab. Lima Puluh Kota (Sumatera Barat, tanggal 3 September 2023)	
34.	Pelaksanaan Pembuatan Podcast Salam Pancasila "SAMPAN" Bersama Insan Pancasila (Bandung, tanggal 9 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
35.	Blocking Time Ikon Prestasi Pancasila dan Kirab Pancasila 2023 (Bandung, tanggal 9 September 2023)	
36.	Sosialiasasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku “Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah Prof. Drs. KH. Yudian Wahyud, M.A, Ph.D.’’ (Palembang, tanggal 14 September 2023)	
37.	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Islam Tribakti Kediri (Jawa Timur, tanggal 18 Oktober 2023)	
38.	Seminar Nasional Relasi Agama dan Pancasila Dalam Perspektif Aswaja di Universitas Hasyim Asy’ari Tebu Ireng (Jombang, tanggal 20 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
39.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2023 di (Yogyakarta, tanggal 22 Oktober 2023)	
40.	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Jakarta, tanggal 25 Oktober 2023)	
41.	Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Para Santri Al Ashriyyah Nurul Iman Boarding School di Parung (Bogor, tanggal 26 Oktober 2023)	
42.	Seminar Nasional Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Ambon, (Maluku, tanggal 30 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
43.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Bedah Buku “Islam dan Pancasila” (Medan, tanggal 04 November 2023)	
44.	Bedah Buku dan Dialog Kebangsaan bersama Lingkar Kajian Komunikasi dan Pemberdayaan Sosial di Tasikmalaya (Jawa Barat, tanggal 11 November 2023)	
45.	Sosialisasi PIP dan Peresmian Djoglo Soekarno (Wonosobo, tanggal 18 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
46.	Sosialisasi PIP "Berkhidmat Untuk Peradaban Pesantren Demi Kejayaan NKRI" (Depok, tanggal 19 November 2023)	
47.	Sosialisasi PIP Kepada Siswa MA/SMA/SMK Se Tapanuli Selatan, (Sumatera Utara, tanggal 02 Desember 2023)	
48.	Pancasila Dalam Tindakan: Gotong Royong Menurunkan Stunting di Kabupaten Gunung Kidul (Yogyakarta, tanggal 09 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
49.	Sosialisasi PIP "Menyongsong Pemilu Damai, Demokratis dan Berintegritas Berdasarkan Pancasila (Gorontalo, tanggal 13 Desember 2023)	
50.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Pagelaran Melodi Kebangsaan (Solo, tanggal 16 Desember 2023)	
51.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Kuliah Umum Kebangsaan (Samarinda, tanggal 23 Desember 2023)	
52.	Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Daerah (34 Provinsi, periode oktober-desember 2023)	

A.3. Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

Indikator Keberhasilan Program

Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila. Target Tahun 2023 adalah 60%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 201% (121 Pokmas). Uraian capaian adalah masyarakat yang telah menerima pembudayaan PIP sebanyak 121 kelompok masyarakat telah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan uraian capaian adalah:

Tabel 2. 10. Daftar Komunitas / Kelompok Masyarakat yang telah melaksanakan aktualisasi

No.	Nama Pokmas/Komunitas
1.	Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika
2.	Jendela Ide
3.	Bumi Dega
4.	Kampung Adat Cireundeu
5.	Organisasi Budi Daya
6.	Ajaran Mei Kartawinata
7.	Paguyuban Kepala Desa Baturraden
8.	Perkumpulan Gerakan Hidup Pancasila Kab. Banyumas
9.	Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA - *Indonesian E-Commerce Association*)
10.	Yayasan Darma Bakti Karya
11.	Satgas Pancasila Palu
12.	Komunitas Tadulako Palu Sulteng
13.	Glintung Go Malang Jatim
14.	Pedati Palu Sulteng
15.	Polelea Sigi Sulawesi Tengah
16.	Sanggar Gonenggah Sulawesi Tengah
17.	Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan PPKN
18.	Desa Ciseureuh Brebes Jateng
19.	Kampung Adat Jalawastu Brebes Jateng
20.	Karang Taruna Ciseureuh Brebes
21.	Sapta Darma Yogyakarta
22.	Srikandi Lintas Iman Yogyakarta
23.	Trisuka

No.	Nama Pokmas/Komunitas
24.	Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (Gemapakti)
25.	Saung Angklung Udjo
26.	Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta
27.	Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten
28.	Badan Musyawarah Keluarga Jambi
29.	Himpunan Keluarga Maluku Utara
30.	Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat
31.	Ikatan Keluarga Minangkabau
32.	Ikatan Keluarga Besar Papua
33.	Kerukunan Keluarga Kawanua Sulawesi Utara
34.	Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan
35.	Badan Musyawarah Masyarakat Bima
36.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jakarta Selatan
37.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jakarta Barat
38.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jakarta Utara
39.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jakarta Pusat
40.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Jakarta Timur
41.	Reog Ponorogo
42.	Bandung Culture
43.	Paguyuban Sapedah Baheula Bandung
44.	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung
45.	Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Barat
46.	Paguyuban Benjang Indonesia
47.	Ikatan Seni Budaya Indonesia
48.	Lokatmala
49.	Federasi Olahraga Barongsai Indonesia
50.	Masyarakat Tionghoa Peduli
51.	Bandung Ethnic Percussion
52.	Komunitas Gerak Jalan Lurus Kab.Pati
53.	Komunitas Belantara Budaya
54.	Komunitas Cinta Budaya Nusantara
55.	Komunitas Bodronoyo
56.	Komunitas Awi cakra
57.	Komunitas Cinta Berkebaya
58.	Komunitas Gimci Garut
59.	Komunitas Indonesia Menari

No.	Nama Pokmas/Komunitas
60.	Komunitas Kain dan Kebaya Pekalongan
61.	Komunitas Kebaya Menari
62.	Komunitas Kridhadari
63.	Komunitas Laksmi Kinasih
64.	Komunitas Libas
65.	Komunitas Ngabalung (Ngaji bareng calung) pimpinan Ust Nornan
66.	Komunitas Patanjala
67.	Komunitas Perempuan di Perantauan
68.	Komunitas Perempuan Manggarai
69.	Komunitas Perempuan Pecinta Budaya Indonesia
70.	Komunitas Pusaka Patali Wargi
71.	Komunitas Putra Siliwangi
72.	Komunitas Rampah Sarinah Jakarta
73.	Komunitas Sekar Jiwanta
74.	Komunitas Seknas Perempuan
75.	Komunitas Seni Celentung pimpinan Bpk. Agus Mulyana
76.	Komunitas Sinar Pusaka Putra
77.	Komunitas Sisingaan
78.	Komunitas Srikandi GP
79.	Komunitas Tadulako Palu Sulteng
80.	Komunitas Wahegar
81.	NB (Notaris Berkebaya)
82.	Organisasi Budi Daya
83.	Padepokan GAGAK RANCANG jenis kegiatan na Seni Ketangkasan Domba Garut
84.	Paguyuban Kepala Desa Baturraden
85.	PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia)
86.	Pedati Palu Sulteng
87.	Pepadi
88.	PEREMPUAN BERKEBAYA
89.	Perempuan Indonesia
90.	Perhimpunan Ratna Busana (HRB)
91.	Perkumpulan Gerakan Hidup Pancasila Kab. Banyumas
92.	Persatuan Ibu-Ibu Bangka Belitung
93.	Polelea Sigi Sulawesi Tengah
94.	PSN (Pecinta Sanggul Nusantara)

No.	Nama Pokmas/Komunitas
95.	Reog
96.	Sanggar Gonenggah Sulawesi Tengah
97.	Sapta Darma Yogyakarta
98.	Satgas Pancasila Palu
99.	Saung Angklung Udjo
100.	Seni TANJIDOR Betawi
101.	SERUMPUN BAKUNG
102.	Sketsa trapy
103.	Srikandi Lintas Iman Yogyakarta
104.	Sumbar Talenta Indonesia
105.	Terhadap Tuhan YME (Gemapakti)
106.	Trisuka
107.	WBI (Wanita Bersanggul Indonesia)
108.	Yayasan Darma Bakti Karya
109.	Sanggar Tangtu Tilu Universitas Galuh
110.	SMA Plus Singajaya Garut
111.	Rampak Kendang Nuansa, SMAN 1 Ciamis
112.	Gentra Siliwangi Garut
113.	Sanggar Seni Lingga Purbasari Ciamis
114.	Komunitas Cermin Tasikmalaya
115.	Studio Titik dua Ciamis
116.	Sanggar Rakyat Ciamis
117.	TTMC Teater Tari Ciamis
118.	Komunitas Baca Puisi Ciamis
119.	Teater Teater Kampus Ciamis
120.	Pamanah Rasa Ciamis
121.	Kebaya Foundation

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 11. Indikator Keluaran Penyelenggaraan Jaringan dan Pembudayaan Ideologi Pancasila

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila	1	1	100% (Rekomendasi)
Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	Faslitasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui relawan Gerakan kebajikan Pancasila	100	121	121% (Kelompok Masyarakat)
Persentase rekomendasi pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengukuran indeks aktualisasi Pancasila	1	1	100% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

a. Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti

Tersusunnya Rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti, yaitu satu dokumen panduan KKN Tematik Habituasi Pancasila, Penggerak Trisakti Desa Berdikari. Proses penyusunan melalui FGD dengan para pakar, akademisi, dan kementerian teknis terkait, dokumen yang menjadi pedoman pembudayaan Pancasila melalui program KKN Tematik Pancasila.

KKN Pancasila menjadi program nasional yang dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, wawasan dan jiwa Pancasila serta patriotisme mahasiswa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KKN Pancasila merupakan bentuk integrasi Pembudayaan Pancasila dengan Program KKN untuk menciptakan kader penggerak Trisakti yang bertujuan:

1. Menginternalisasikan nilai berdaulat dalam bidang politik di masyarakat melalui kegiatan KKN
2. Menginternalisasikan nilai berdikari dalam bidang ekonomi di masyarakat melalui kegiatan KKN
3. Menginternalisasikan nilai berkepribadian dalam bidang kebudayaan di masyarakat melalui kegiatan KKN

b. Persentase jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila

Tahun 2023 ini target dari kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan yaitu 100 kelompok. Untuk Tahun 2023 tercapai 121 kelompok masyarakat atau sebesar 121% dari total keseluruhan capaian.

c. Persentase rekomendasi pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti

Telah diselesaikan satu dokumen laporan hasil pengukuran IAP dan dokumen rekomendasi hasil pengukuran IAP Tahun 2022. Adapun capaian dapat dirangkum dalam penyelesaian kegiatan/program yang menghasilkan capaian *output* dan *outcome*, sebagai berikut:

Proses Pelaksanaan Penghitungan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (IAP):

1. Tahun 2021 telah selesai dengan capaian IAP nasional 72,93 serta capaian IAP provinsi; dan
2. Tahun 2022 telah selesai dengan capaian IAP nasional 75,53 serta capaian IAP provinsi dan profilnya.

Laporan Penghitungan IAP:

1. Tahun 2021 telah selesai dan dilaporkan kepada Kepala beserta unsur pimpinan dan perwakilan dari Bappenas & BPS, dalam kegiatan Ekspose IAP 2021 di Jakarta (26 Juni 2023); dan

2. *Booklet* IAP 2022 telah selesai serta disampaikan kepada Kepala beserta unsur pimpinan dan tim pakar, perwakilan dari Bappenas & BPS, dalam kegiatan Ekspose IAP 2022 di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2023, dengan masukan yang dihasilkan untuk menyempurnakan pelaporan tahun 2022.

Regulasi/Peraturan Peraturan UU terkait IAP:

1. Dalam hal capaian penghitungan IAP Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala No.79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021, per 05 Desember 2023; dan
2. Dalam hal capaian penghitungan IAP Tahun 2022, pengaturan dalam Keputusan Kepala untuk dilakukan penyelarasan dan pembahasan bersama Biro Hukum dan Organisasi menindaklanjuti pengembangan konten dari laporan tahun sebelumnya.

Tindaklanjut:

1. Penetapan Peraturan BPIP No.4 Thn 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No.5 Thn 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, terkait Pasal 117 huruf c menyebutkan pembentukan Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila; dan
2. Penyampaian informasi kinerja dan realokasi anggaran BPIP TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Kepala BPIP No.5944/PR/12/2023/Ka.BPIP, terkait pemindahan rencana kegiatan serta anggaran penghitungan capaian IAP 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dari Kedeputian I ke Kedeputian V;

Maka terdapat beberapa tindak lanjut kegiatan/progam dari TA sebelumnya dengan fokus antara lain:

1. Penyusunan/penyempurnaan SK IAP Tahun 2022;
2. Pembahasan/penyempurnaan latar belakang & kerangka pikir IAP (Mandiri) Tahun 2022 yang diikuti penyusunan instrumennya;
3. Penghitungan capaian IAP Tahun 2023 yang berdasarkan pelaksanaan hasil survey pada tahun 2023;
4. Analisis dan penghitungan IAP Kota Palu, berdasarkan pelaksanaan hasil survey pada Tahun 2023 yang telah disampaikan secara simbolik oleh Walikota Palu (didampingi Kaban Kesbangpol Kota Palu) kepada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan; dan
5. Pembahasan lanjutan IAP *Segmented* ASN yang merupakan potensi awal terkait penyusunan Indeks Pelembagaan Pancasila.

Outcome:

1. Akseptasi hasil penghitungan IAP 2021 & 2022/penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terpumpun IAP bersama Pemda, Tokoh Masyarakat/Agama/Adat di daerah; dan
2. IAP Kota Palu merupakan inisiatif dari jajaran Pemkot Palu, adalah adopsi dari penghitungan IAP nasional yang dilaksanakan setiap tahun dengan menambahkan indikator kearifan lokal sebagai identitas penghitungan IAP spesifik kewilayahan untuk mengakomodir nilai-nilai Pancasila spesifik lokal yang ada di kota Palu.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 12. Aktivitas Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Dialog Kebangsaan "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa" (Surabaya, tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023)	
2.	Bimbingan Teknis Penguatan Pembinaan Idelogi Pancasila bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung (Lampung, tanggal 19 s.d. 22 Januri 2023)	
3.	Kegiatan Pembudayaan Internalisasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Temu Tokoh Agama dan Masyarakat (Karang Anyar, tanggal 21 s.d. 24 Januari 2023)	
4.	Survei Kegiatan Pembahasan Awal Pilot Project Desain Teknologi Desa Berdikari Di Kabupaten Banyumas (Banyumas, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Survey IAP Kota Palu bersama Kesbangpol Kota Palu (Jakarta, tanggal 9 Februari 2023)	
6.	Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PIP (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2023)	
7.	Kegiatan Penghitungan IAP Proksi Tahun 2022 “Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 (Jakarta, tanggal 17 s.d. 18 Februari 2023)	
8.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Proyeksi Target dan Metadata IAP Tahun 2024 Sila I s.d. Sila III (Jakarta, tanggal 22 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kegiatan Pilot Project Desain Teknologi Desa Berdikari Di Kabupaten Banyumas (Banyumas, tanggal 22 s.d. 25 Februari 2023)	
10.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022": Penyusunan Proyeksi Target dan Metadata IAP Tahun 2024 Sila IV s.d. Sila V (Jakarta, tanggal 27 s.d. 28 Februari 2023)	
11.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Instrumen Survei Indikator IAP Mandiri Kota Palu (Palu, tanggal 1 s.d. 04 Maret 2023)	
12.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022: "Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2022 Sila I (Jakarta, tanggal 10 s.d. 11 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Rencana Aksi Nasional Indeks Aktualisasi Pancasila "Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila" (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Maret 2023)	
14.	Kegiatan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila melalui Pagelaran Seni Wayang Kulit bersama Universitas Diponegoro (Semarang, tanggal 15 s.d. 18 Maret 2023)	
15.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Pengukuran Indikator IAP Segmented (ASN)" (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 Maret 2023)	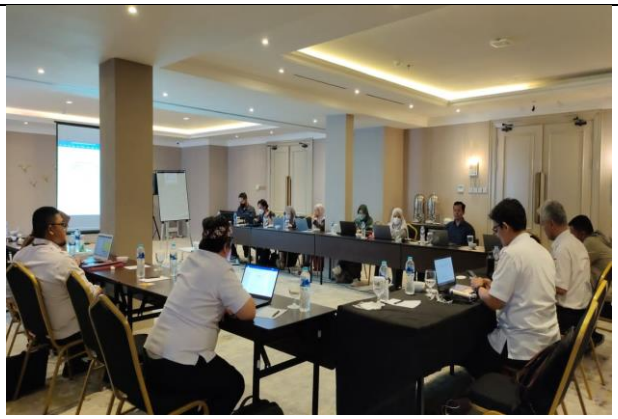
16.	Forum Relawan Gerakan Kebajikan dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan PIP (Bandung, tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila (Yogyakarta, tanggal 11 s.d. 13 April 2023)	
18.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 Sila II" (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 April 2023)	
19.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Pengukuran Indlkator lAP Segmented (ASN) Sila II" (Jakarta, tanggal 17 s.d. 18 April 2023)	
20.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 Sila III” (Jakarta, tanggal 4 s.d. 5 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022” (Jakarta, tanggal 12 Mei 2023)	
22.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Pengukuran Indikator IAP Segmented (ASN) Sila IV” (Jakarta, tanggal 19 s.d. 20 Mei 2023)	
23.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Pengukuran Indikator IAP Segmented (ASN) Sila V" (Jakarta, tanggal 26 s.d. 27 Mei 2023)	
24.	Ekpose Hasil IAP ”Dalam Menyambut Hari Lahir Pancasila Bersama Seniman (Jawa Barat, tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Ekpose Hasil IAP “Penyiapan Buku Pedoman Survei IAP Palu” (Jakarta, tanggal 5 s.d. 6 Juni 2023)	
26.	Ekspose Hasil IAP "Penyiapan Rule Validasi Survei IAP Palu" (Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Juni 2023)	
27.	Penyiapan Bahan Ajar Untuk Pelatihan Petugas Survei IAP Palu (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Juni 2023)	
28.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 Sila IV” (Jakarta, tanggal 16 s.d. 17 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
29.	Ekpose Hasil IAP "Evaluasi dan Finalisasi Program *Data Entry* Survei IAP Palu" (Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 Juni 2023)	
30.	Diskusi kelompok terpumpun kegiatan ekpose hasil IAP "Dalam pembahasan laporan penghitungan IAP tahun 2021 dan evaluasi program data entry survei IAP Palu (Jakarta, tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023)	
31.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penghitungan Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 Sila V" (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Juli 2023)	
32.	Implementasi Indeks Aktualisasi Pancasila Skala Mikro bersama Generasi Muda Multikultural (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
33.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 “Review Penghitungan IAP 2022 Sila I s.d Sila V” (Jakarta, tanggal 17 s.d. 18 Juli 2023)	
34.	Akseptasi IAP ke Pemerintah Daerah dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Pencanangan Survei IAP Kota Palu dan Gerakan Aksi Pancasila (Palu, tanggal 20 s.d. 23 Juli 2023)	
35.	Pembudayaan Gotong Royong Bersama Pemerintah Kabupaten Magelang (Jawa tengah, tanggal 24 s.d. 26 Juli 2023)	
36.	Forum Relawan Gerakan Kebajikan Melalui Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila di Bandung (Bandung, tanggal 26 s.d. 29 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Gerakan Aktualisasi Pancasila dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting (Banyuwangi, tanggal 30 juli s.d. 2 Agustus 2023)	
38.	Gerakan Aktualisasi Pancasila dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting (Magelang, tanggal 3 s.d. 6 Agustus 2023)	
39.	Rapat Finalisasi Penjurian Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2023)	
40.	Forum Relawan Gerakan Kebajikan Melalui Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP) Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
41.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Normalisasi Penghitungan IAP 2022 Sila I s.d. Sila V" (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2023)	
42.	Forum Relawan Gerakan Kebajikan Melalui Rapat Lanjutan Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP) Tahun 2023 (Bandung, tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2023	
43.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Normalisasi Penghitungan IAP 2022 Sila I s.d. Sila V" (Jakarta, tanggal 21 s.d. 22 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
44.	Forum Relawan Gerakan Kebajikan Melalui Rapat Lanjutan Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP) Tahun 2023 (Bandung, tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2023)	
45.	"Rapat Teknis Pelaksanaan Penganugerahaan Ikon Prestasi Pancasila 2023 dan Kirab Pancasila (Bandung, tanggal 31 Agustus.d. 2 September 2023)	
46.	Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023 dan Kirab Pancasila (Bandung, tanggal 7 s.d. 10 September 2023)	
47.	Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 dan Pembahasan SK IAP Tahun 2023" (Jakarta, tanggal 20 s.d. 23 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
48.	Pembahasan Penyusunan Pedoman Pembudayaan Desa Berdikari Pancasila melalui program KKN Mahasiswa di Kota Bogor (Bogor, tanggal 25 s.d. 27 September 2023)	
49.	Implementasi IAP Skala Mikro dalam Gerakan Aktualisasi Nilai Pancasila melalui Lab Pancasila Preneur di Universitas Pancasila (Depok, tanggal 29 September 2023)	
50.	Gerakan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Atlet Muda Melalui Olahraga dan Komunitas, Paguyuban Yang Berada Di Pamekesan (Madura, tanggal 02 s.d. 06 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
51.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-I" (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 Oktober 2023)	
52.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-II" (Jakarta, tanggal 17 s.d 20 Oktober 2023)	
53.	Kegiatan Pembudayaan Nilai - Nilai Pancasila Melalui Festival 28 Bahasa (Pangandaran, tanggal 19 s.d. 22 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
54.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-III" (Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 Oktober 2023)	
55.	Pembahasan Penyusunan Pedoman Pembudayaan Desa Berdikari Pancasila melalui program KKN Mahasiswa (Kota Bogor tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2023)	
56.	Kegiatan Akseptasi Indeks Aktualisasi Pancasila Ke Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-IV (Medan, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
57.	Kegiatan Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila 2022 "Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-V" (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 November 2023)	
58.	Kegiatan Finalisasi Pembahasan Penyusunan Pedoman Pembudayaan Desa Berdikari Pancasila Melalui Program KKN Mahasiswa (Bogor, tanggal 13 s.d.15 November 2023)	
59.	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Pada (Semarang, tanggal 15 s.d. 17 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
60.	Kegiatan Akseptasi Indeks Aktualisasi Pancasila Ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional dan Provinsi di Indonesia Ke-VI (Yogyakarta, tanggal 19 s.d 22 November 2023)	
61.	Kegiatan Pembudayaan Nilai Pancasila Melalui Kemah Budaya di Kabupaten Lebak, (Banten, tanggal 24 November s.d 26 November 2023)	
62.	Gerakan Relawan Kebajikan Pancasila melalui Wayang (Klaten dan Surakarta, tanggal 23 s.d. 26 November 2023)	
63.	Kegiatan Gelar Budaya Kabuyutan Bersama Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila di Kabupaten Garut (Jawa Barat, tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
64.	Kegiatan Gerakan Aktualisasi Nilai Pancasila melalui Festival Pembudayaan Pancasila yang berkearifan lokal yang dilaksanakan (Ciamis, tanggal 4 s.d. 6 Desember 2023)	
65.	Kegiatan Ekspose Hasil Iap Tahun 2022 Dan Penyusunan Laporan Penghitungan IAP 2022 Tingkat Nasional Dan Provinsi Di Indonesia Ke-VIII" (Jakarta 7 s.d. 9 Desember 2023)	
66.	Akseptasi Indeks Aktualisasi Pancasila Ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo (Gorontalo, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023)	

B. Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Apresiasi, dan Pengawasan Regulasi

Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum tersendiri yang secara terus menerus dilakukan internalisasi dan institusionalisasi. Bahwa nilai- nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Sasaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi adalah termanfaatkan dan ditindaklanjutinya capaian keluaran yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 13. Indikator Keluaran Program Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	Ket
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	100%	100%
Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi	100%	100%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

B.1. Rekomendasi Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi yang Ditindaklanjuti.

Indikator Keberhasilan:

Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2023 adalah pemanfaatan 1 Rekomendasi.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 100% (rata-rata persentase capaian *output*) dengan uraian capaian sebagai berikut:

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

a. Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila
b. Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 14. Indikator keluaran Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, Serta Pengawasan Regulasi yang Dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila	3	3	100% (Rekomendasi) tiga bidang Polhukam, Bidang Ekomarivest, bidang PMK)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah	1	1	100% (Rekomendasi)
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka	1	1	100% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

a. Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai paradigma dalam pengetahuan sebagai landasan dalam pembangunan nasional. Untuk mewujudkan dalam pembangunan, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga.

Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan pemahaman yang utuh dan mendasar terhadap kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan dari pemahaman itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan modal oleh bangsa Indonesia

untuk melakukan pembangunan nasional yang secara garis besar meliputi pembangunan di bidang : (a)Polhukam; (b) Ekomarivest; (c) PMK. Artinya, pembangunan nasional harus benar-benar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berdaulat secara politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan dan bersendikan gotong royong.

Untuk saat ini rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila masih dalam tahap kajian dan penyusunan sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berikut adalah proses rekomendasi dari hasil yang dicapai sampai dengan :

Tabel 2. 15. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi	Selesai Diselaraskan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Selesai Diselaraskan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten	Selesai Diselaraskan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Indikator Nilai Pancasila	Selesai Diselaraskan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Satra Daerah	Selesai Diselaraskan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Fasilitasi Penyelanggaraan Pesantren	Selesai Diselaraskan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Fasilitasi Penyelanggaraan Pesantren	Selesai Diselaraskan

Dari tabel diatas terdapat 10 rekomendasi peraturan yang sudah selesai diselaraskan dari 10 rancangan peraturan yang harus ditindaklanjuti sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100%.

b. Persentase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

Dukungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 1 Rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam hukum nasional dan peraturan daerah yang terdiri dari 10 kajian rancangan peraturan perundang-undangan terbagi dalam 3 bidang kajian yakni bidang Polhukam, bidang Ekomarivest, dan bidang PMK berikut adalah proses dari hasil yang dicapai sampai dengan :

Tabel 2. 16 Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Selesai Diselaraskan
2.	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Selesai Diselaraskan

No.	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Selesai Diselaraskan
4.	Peraturan Gubernur Bali No 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata di Kota Denpasar	Selesai Diselaraskan
5.	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Selesai Diselaraskan
6.	UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Selesai Diselaraskan
7.	Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak	Selesai Diselaraskan
8.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Selesai Diselaraskan
9.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Selesai Diselaraskan
10.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Selesai Diselaraskan

Dari tabel diatas Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti adalah 10 rekomendasi peraturan yang sudah selesai diselaraskan dari 10 rancangan peraturan yang harus ditindaklanjuti sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100%..

c. Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

Dukungan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi terhadap capaian IKU tersebut adalah menghasilkan 1 Rekomendasi advokasi PIP terhadap Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial/politik dan komponen masyarakat lainnya serta purnapaskibraka yang terdiri dari 10 kajian

rancangan peraturan perundang-undangan terbagi dalam 3 bidang kajian yakni bidang Polhukam, bidang Ekomarivest, dan bidang PMK berikut adalah proses dari hasil yang dicapai sampai dengan akhir periode 2023 :

Tabel 2. 17. Rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti

No.	Judul Kajian Rekomendasi Advokasi Penyelesaian Dan Penanggulangan Masalah	Keterangan
1.	Pengaturan tentang ITE di Daerah	Selesai Diselaraskan
2.	Kajian Peraturan tentang penertiban tanah terlantar	Selesai Diselaraskan
3.	Kajian tentang UMKM	Selesai Diselaraskan
4.	kajian advokasi Pengaturan pajak dan Retribusi Daerah	Selesai Diselaraskan
5.	Kajian advokasi pelaksanaan dana desa	Selesai Diselaraskan
6.	Kajian advokasi pengaturan koperasi tindak lanjut hasil pendampingan laporan masyarakat tentang Koperasi	Selesai Diselaraskan
7	Kajian advokasi masyarakat adat suku laut dan masyarakat marjinal di kepulauan Riau	Selesai Diselaraskan
8.	Kajian advokasi terhadap pekerja migran indonesia	Selesai Diselaraskan
9.	Kajian advokasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Jawa Barat	Selesai Diselaraskan
10.	Kajian advokasi tentang pengaturan ormas di Daerah	Selesai Diselaraskan

Untuk saat ini rekomedasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti sudah diselaraskan sehingga capaian sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 18. Aktivitas Pelaksanaan Analisis dan Penyelarasan Hukum Nasional terhadap Nilai- Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Audiensi DPRD Kabupaten Pasuruan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 13 Januari 2023).	
2.	Koordinasi dalam Rangka Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 18 Januari 2023).	
3.	Koordinasi Penerapan Indikator Nilai Pancasila dalam Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Lampung (Lampung, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Internalisasi dan Institusionalisasi Arah Kebijakan bersama Universitas Airlangga dan Universitas Merdeka Malang (Malang, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023).	
5.	Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan (Pasuruan, tanggal 27 s.d. 29 Januari 2023).	
6.	Koordinasi dalam Rangka Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Bangka Belitung, tanggal 9 s.d. 13 Februari 2023).	
7.	Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Rangka Aktualisasi Nilai Pancasila di Wilayah Provinsi Bangka Belitung (Bangka Belitung, tanggal 9 s.d. 13 Februari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Audiensi DPRD Kota Surakarta terkait Internalisasi Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 21 Februari 2023).	
9.	Koordinasi Awal Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli (Bali, tanggal 22 s.d. 25 Februari 2023).	
10.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten (Surakarta, tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2023).	
11.	Pembahasan Penyelarasan Raperda bersama IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik dan Monev Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Stisipol 12 (Bangka Belitung, tanggal 6 s.d. 9 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Koordinasi dalam Rangka Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung, DPRD Kabupaten Badung dan Gedung Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Bali (Bali, tanggal 6 s.d. 10 Maret 2023).	
13.	Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Surabaya, tanggal 12 s.d. 14 Maret 2023).	
14.	Pembahasan Penyelarasan Raperda bersama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Tindak Lanjut Bimbingan Teknis bersama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Surabaya, tanggal 14 s.d. 17 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Koordinasi dalam Rangka Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Kantor Pemerintah Kabupaten Gianyar (Bali, tanggal 15 s.d. 18 Maret 2023).	
16.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Solo, tanggal 19 s.d. 21 Maret 2023).	
17.	Pembahasan Penyelarasan Raperda bersama Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Solo, tanggal 20 s.d. 22 Maret 2023).	
18.	Rapat Pembahasan dan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Klaten (Jawa Tengah, tanggal 28 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Medan, tanggal 27 s.d. 31 Maret 2023).	
20.	Kegiatan Koordinasi dalam Rangka Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Nusa Tenggara Barat, tanggal 03 s.d. 06 April 2023).	
21.	Kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Penyelarasan Rancangan Peraturan Derah Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan (WK) Kabupaten Klaten (Jawa Tengah, tanggal 03 s.d. 06 April 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Kegiatan Koordinasi dalam Rangka Produk Hukum Daerah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan (Kabupaten Madiun, tanggal 11 April 2023).	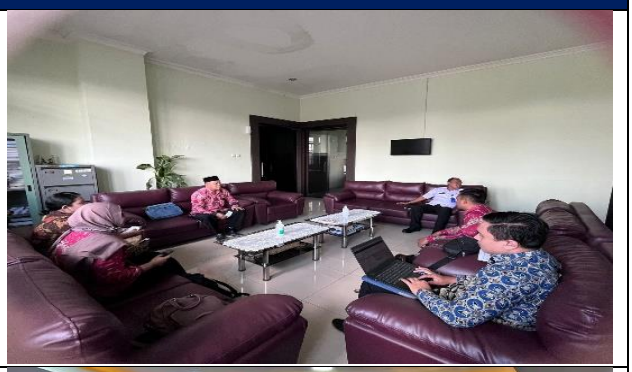
23.	Kegiatan Koordinasi Tindak Lanjut Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan (WK) Kota Bandung (Bandung, tanggal 16 s.d. 18 April 2023).	
24.	Rapat Kegiatan Konsultasi Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Daring, tanggal 17 April 2023).	
25.	Rapat Kegiatan Konsultasi Ahli Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Daring, tanggal 18 April 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
26.	Kegiatan Pembahasan Awal Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi di Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi (Sukabumi, tanggal 16 s.d. 18 April 2023).	
27.	Kegiatan Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah PIP dan WK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Jawa Tengah, tanggal 27 s.d. 29 April 2023).	
28.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara, tanggal 11 s.d. 13 Mei 2023).	
29.	Kegiatan Rapat Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta, tanggal 22 Mei 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
30.	Kegiatan Tindak Lanjut Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan "Minsel Maju" Bagi Pemuda Mahasiswa Dalam Penyelesaian Akhir (Jakarta, tanggal 24 Mei 2023).	
31.	Kegiatan Konsinyering Kinerja Semester I Direktorat Analisis dan Penyelarasan Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 24 s.d. 26 Mei 2023).	
32.	Kegiatan Rapat Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 Juni 2023).	
33.	Kegiatan Rapat Pembahasan Ruang Lingkup Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila (Jakarta, tanggal 7 Juni 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
34.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Tangerang, tanggal 11 s.d. 13 Juni 2023).	
35.	Kegiatan Pembahasan Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Akademisi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (Sumatera Utara, tanggal 14 s.d. 16 Juni 2023).	
36.	Kegiatan Koordinasi Penyelarasan Rancangan Produk Hukum Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggra Timur, tanggal 14 s.d. 17 Juni 2023).	
37.	Koordinasi Bersama Pemerintah Kabupaten Ende terkait Persiapan Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 s.d. 7 Juli 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
38.	Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 Juli 2023).	
39.	Penyelarasan bersama Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bulan Bung Karno dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila", (Jawa Timur, tanggal 9 s.d.11 Juli 2023).	
40.	Rapat Persiapan Kegiatan Perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Pancasila bersama Tim Perumus (Jakarta, tanggal 18 Juli 2023).	
41.	Audiensi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 27 Juli 2023).	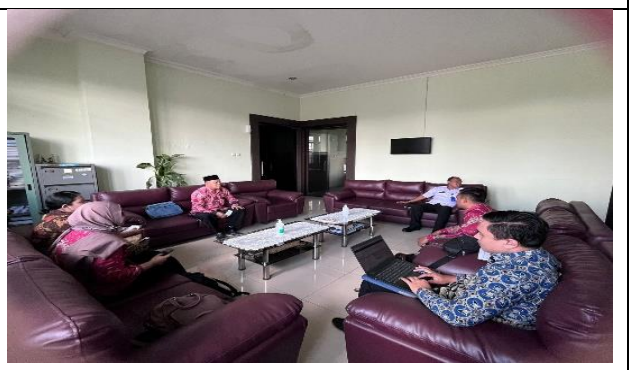

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
42.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (Nusa Tenggara Timur, tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2023).	
43.	Kegiatan Audiensi DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 29 Agustus 2023).	
44.	Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kalimantan Timur, tanggal 1 s.d. 3 September 2023).	
45.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Sulawesi Selatan, tanggal 1 s.d. 3 September 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
46.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta di Bidang Perekonomian, Maritim, dan Investasi (Surakarta, tanggal 3 s.d. 5 September 2023).	
47.	Kegiatan Audiensi DPRD Kabupaten Purworejo terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan" (Jakarta, tanggal 12 September 2023).	
48.	Rapat Penyelarasan Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2023 – 2043 (Jakarta, tanggal 18 September 2023).	
49.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Tatacara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Minsel Maju (Yogyakarta, tanggal 19 s.d. 21 September 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
50.	Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (Jawa Tengah, tanggal 24 s.d. 26 September 2023).	
51.	Pembahasan Lanjutan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar PIP, Evaluasi Produk Hukum BPIP, Koordinasi Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Pengelola JDIH, dan pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)" (Jakarta, tanggal 25 s.d. 29 September 2023).	
52.	Kegiatan Tindak Lanjut Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,(Purworejo, tanggal 3 s.d. 6 Oktober 2023)	
53.	Kegiatan Koordinasi Persiapan Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Indikator Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Sumatera Utara (Medan, tanggal 4 s.d. 6 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
54.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila, (Bali, tanggal 9 s.d. 12 Oktober 2023)	
55.	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangun Industri Kawasan Kota Surakarta (Surakarta, tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023)	
56.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, (Banyuwangi, tanggal 24 s.d. 27 Oktober 2023)	
57.	Kegiatan Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila di Kota Pekanbarui (Riau, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
58.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam rangka Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Medan, tanggal 2 s.d. 4 November 2023)	
59.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila (Papua Barat, tanggal 14 s.d. 17 November 2023)	
60.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Boyolali, tanggal 19 s.d. 21 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
61.	Kegiatan Penyusunan Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 November 2023)	
62.	Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dah Sastra Daerah (Bangka Belitung, tanggal 26 s.d 29 November 2023)	
63.	Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Akademisi dan Pusat Studi Pancasila (Sumatera Utara, tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2023)	
64.	Kegiatan Koordinasi Terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun Secara Terencana, Terpadu dan Sistematis di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah, tanggal 1 s.d. 3 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
65.	Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Hasil Penyelarasan dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Analisis dan Penyelarasan Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Desember 2023)	
66.	Kegiatan Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan, tanggal 5 s.d. 8 Desember 2023)	
67.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bidang Perekonomian, Maritim dan Investasi (Kalimantan Barat, tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023)	
68.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Indikator Nilai Pancasila Dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Wonogiri, tanggal 12 s.d. 15 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
69.	Kegiatan Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Bidang Perekonomian, Maritim dan Investasi (DI Yogyakarta, tanggal 14 s.d. 17 Desember 2023)	
70.	Koordinasi Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Batam (Batam, tanggal 17 s.d. 20 Desember 2023)	

Tabel 2. 19. Aktivitas Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordinasi Kerja Sama Advokasi, Penanganan Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kajian Kebijakan dan Regulasi di Provinsi Bangka Belitung (Bangka Belitung, tanggal 4 s.d. 8 Januari 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Kerjasama Advokasi, Penanganan Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembiaan Ideologi Pancasila dalam Kajian Kebijakan dan Regulasi (Yogyakarta, tanggal 9 s.d. 12 Januari 2023)	
3.	Kunjungan kerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Januari 2023)	
4.	Diskusi Terumpun Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Advokasi PIP dalam Rangka Mitigasi dan pengawsan Regulasi di Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korps Pembinaan Masyarakat Badan pemeiharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia(Jakarta, tanggal 20 Januari 2023)	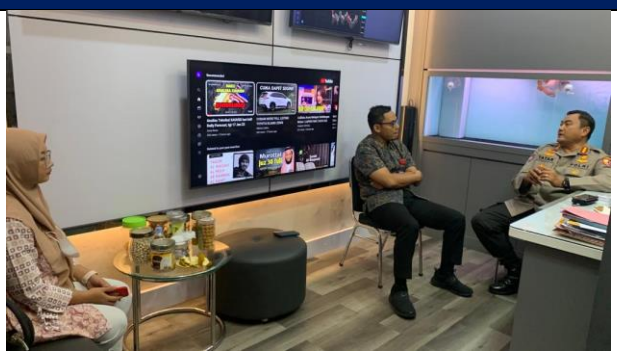
6.	Advokasi PIP dalam Rangka Mitigasi dan pengawasan Regulasi di Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Surabaya (Surabaya, tanggal 22 s.d. 26 Januari 2023)	
7.	Koordinasi advokasi dalam rangka Kerjasama kajian kebijakan dan regulasi guna penanganan dan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala PIP di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (Surabaya, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Advokasi PIP ke badan keamanan Laut (Kebijakan Kelautan Indonesia) dan Kunjungan ke Desa Maritim Pangkal Pinang (Bangka Belitung , tanggal 9 s.d. 12 Februari 2023)	
9.	Koordinasi Kerjasama Advokasi, Penanganan Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kajian Kebijakan dan Regulasi di Provinsi Sumatra (Medan, tanggal 14 s.d. 17 Januari 2023)	
10.	Advokasi PIP dalam Rangka Mitigasi dan pengawasan Regulasi di Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Uniiversitas Atma Jaya Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 14 s.d 18 Februari 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Pemberdayaan Suku Laut di Kabupaten Lingga Bekerjasama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah (UMRAH) Tanjung Pinang (Kepulauan Riau, tanggal 17 s.d. 21 Maret 2023)	
12.	Konsinyering Persiapan Kajian Kebijakan dan Regulasi Dalam Rangka Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 8 s.d. 10 Maret 2023)	
13.	Koordinasi Kerjasama Advoksi, Penanganan, Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah dan Kendala Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kajian Kebijakan dan Regulasi di Bandung (Bandung, 17 s.d. 19 Maret 2023)	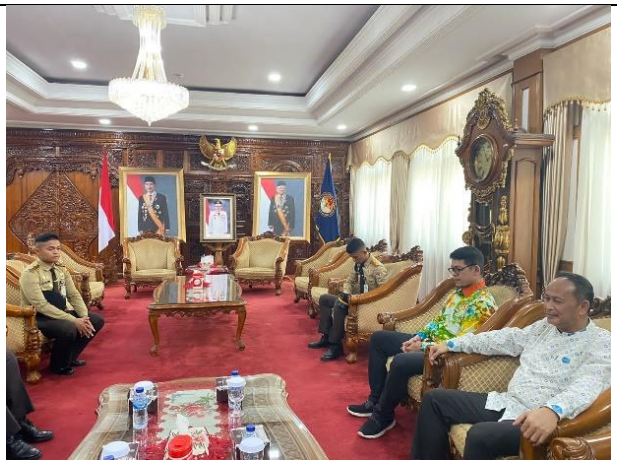

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Mitigasi Regulasi dan kebijakan terkait UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No 17 Tahun 2013 tentang ORMAS di Kesbangpol dan Diskominfo Kabupaten Sukoharjo dan Kesbangpol Boyolali (Sukoharjo, tanggal 19 s.d. 22 Maret 2023)	
15.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Inventarisasi Masalah dan Kendala terhadap Perbuatan, Sikap atau Permasalahan llain yang Bertentangan dengan Pancasila (Jawa Tengah, tanggal 3 s.d. 6 April 2023)	
16.	Pembahasan Rancangan Kerja sama dalam Penyusunan Kajian Regulasi (UU No. 40 th 1999 ttg Pers) di Uniersitas Airlangga dan Mitigasi Regulasi terkait Organisasi Masyarakat di Kesbangpol Kota Mojokerto (Surabaya, tanggal 4 s.d. 7 April 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Advokasi dalam Rangka Kerja sama Kajian Kebijakan dan Regulasi serta Penyampaian Materi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Bandung, tanggal 12 s.d. 14 April 2023)	
18.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila terkait Mitigasi Dampak perkembangan Informasi dan Teknologi di Universitas Atmajaya Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 14 s.d. 16 April 2023)	
19.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Rangka Mitigasi UU tentang Ormas di Kesbangpol Kab Karanganyar (Jakarta, tanggal 4 s.d. 6 Mei 2023)	
20.	Koordinasi Persiapan Kunjungan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke Pondok Pesantren di Kota Malang dan Kabupaten Malang (Jawa Timur, tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Koordinasi Advokasi dalam Rangka Penanganan, Penyelesaian dan Penanggulangan Masalah Pembinaan Ideologi Pancasila (Kabupaten Banyuwangi, tanggal 7 s.d. 9 Juli 2023)	
22.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Internasliasi Ekonomi Pancasila Melalui Peran Pondok Pesantren di Kota Malang (Jawa Timur, tanggal 14 s.d. 16 Juli 2023)	
23.	Perkumpulan Praja dalam Rangka Seminar Nasional “Penguatan Integrasi dan Netralisasi ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas (Bandung, tanggal 24 s.d. 26 April 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Koordinasi Advokasi PIP dalam rangka inventarisasi masalah dan kendala terhadap perbuatan, sikap, atau permasalahan lain yang bertentangan dengan Pancasila (Kabupaten Banyuwangi, tanggal 31 Juli s.d. 3 Agustus 2023)	
25.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Ruang Lingkup Perencanaan, Pembangunan, dan Pengembangan Sosial (Sumatera Selatan, tanggal 10 s.d. 13 Agustus 2023)	
26.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Rangka Internalisasi Ekonomi Pancasila di Kabupaten Kaimana (Papua Barat, tanggal 30 Agustus s.d. 3 September 2023)	
27.	Koordinasi Advokasi Pembinanan Ideologi Pancasila Melalui Literasi (Jakarta, tanggal 4 September 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Koordinasi Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Rote (Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 s.d. 8 September 2023)	
29.	Advokasi PIP: Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Bangka Belitung, tanggal 13 s.d. 16 September 2023)	
30.	Advokasi PIP: Pelaksanaan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Bangka Belitung, tanggal 13 s.d. 16 September 2023)	
31.	kegiatan Koordinasi Persiapan Advokasi PIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rangka Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Kabupaten Bangka (Pangkal Pinang, tanggal 17 s.d. 20 September 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
32.	Lokakarya Internalisasi Indikator Nilai Pancasila dalam Penyelarasan, Advokasi dan Pengawasan Kebijakan dan Regulasi (Jakarta, tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2023)	
33.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka sinkronisasi program PIP di Pondok Pesantren UNIQ Nusantara (Malang tanggal 10 s.d. 12 November 2023)	
34.	Pelaksanaan Kajian Advokasi PIP Bidang PMK dalam Rangka Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila terhadap Regulasi dan Kebijakan di Tegal (Jawa Tengah, tanggal 12 s.d .16 November 2023)	
35.	Pelaksanaan Tindak Lanjut Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita (Palembang, tangggal 21 s.d. 23 November 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
36.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Pencegahan Bullying dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah (Yogyakarta, tanggal 27 s.d. 30 Nov 2023)	
37.	Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai Upaya Pendalaman Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sosial (Ternate, tanggal 28 Nov s.d. 1 Desember 2023)	
38.	Advokasi Literasi Tentang Kenegaraan dan Konstitusi Dalam Dua Perspektif Syariat dan Hakikat (Malang, tanggal 5 s.d. 9 Desember 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
39.	Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Pencegahan Bullying dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah di Dinas Pendidikan Kab Cirebon dan Kesbangpol Kota Cirebon (Cirebon, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023)	
40.	Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila Pemantauan Implementasi Pengabdian Masyarakat dalam rangka Mewujudkan Desa Mandiri dan Berkeadilan Sesuai Nilai-Nilai Pancasila (Banten, tanggal 12 s.d.15 Desember 2023)	

B.2. Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

Indikator Keberhasilan:

Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti. Target Tahun 2023 adalah tindak lanjut 20 rekomendasi.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 100% rekomendasi, yaitu tercapai 20 Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang

ditindaklanjuti ditindaklanjuti. Dokumen kajian dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20. Rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti Ditindaklanjuti

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi	Selesai Diselaraskan
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tentang Indikator Nilai Pancasila	Selesai Diselaraskan
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia Dan Perlindungan Bahasa Daerah Dan Satra Daerah	Selesai Diselaraskan
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Selesai Diselaraskan
7	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten	Selesai Diselaraskan
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Selesai Diselaraskan
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Fasilitasi Penyelanggaraan Pesantren	Selesai Diselaraskan
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Fasilitasi Penyelanggaraan Pesantren	Selesai Diselaraskan
11.	Kajian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Selesai Diselaraskan
12.	Kajian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Selesai Diselaraskan
13.	Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Selesai Diselaraskan

No	Judul Rancangan Peraturan Daerah	Keterangan
14.	Kajian Peraturan Gubernur Bali No 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata di Kota Denpasar	Selesai Diselaraskan
15.	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Selesai Diselaraskan
16.	Kajian UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Selesai Diselaraskan
17.	Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak	Selesai Diselaraskan
18.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Selesai Diselaraskan
19.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Selesai Diselaraskan
20.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Selesai Diselaraskan

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

Pelaksanaan Internalisasi, Institusionalisasi Pancasila dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 21. Indikator keluaran Rekomendasi atas Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	4	4	100% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila tercapai sebesar 100%. Dimana rekomendasi yang sudah selesai diselaraskan sampai ini adalah :

Tabel 2. 22. Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila

No.	Judul Kajian Rekomendasi Peraturan Eksisting	Keterangan
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Selesai Diselaraskan 100%
2.	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Selesai Diselaraskan 100%
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Selesai Diselaraskan 100%
4.	Peraturan Gubernur Bali No 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata di Kota Denpasar	Selesai Diselaraskan 100%
5.	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Selesai Diselaraskan 100%
6.	UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Selesai Diselaraskan 100%
7	Peraturan Pemerintah RI No 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak	Selesai Diselaraskan 100%
8.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Selesai Diselaraskan 100%
9.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Selesai Diselaraskan 100%
10.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Selesai Diselaraskan 100%

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 23. Aktivitas Rekomendasi Atas Hasil Pengawasan dan Kajian Kebijakan atau Regulasi yang Diduga Bertentangan dengan Nilai Pancasila

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Koordianasi dan Inventarisir Produk Hukum dalam hal Kajian serta Penyusunan Rekomendasi Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Januari 2023)	
2.	Kunjungan Kerja dalam rangka Pengawasan Produk Hukum yang berpotensi bertentangan dengan Nilai Pancasila (Palembang, tanggal 15 s.d. 18 Januari 2023)	
3.	Koordinasi Implementasi UU. No 7 Thuan 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Perspektif Pancasila (Bandung, tanggal 24 s.d. 27 Januari 2023)	
4.	Koordinasi rencana kerjasama dalam rangka Penyusunan Kajian dan Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Nilai Pancasila (Yogyakarta, tanggal 25 s.d. 28 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Koordinasi dalam rangka Pengumpulan data lapangan sebagai kajian dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila (Bangka Belitung, tanggal 9 s.d. 12 Februari 2023)	
6.	Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Kajian dan Rekomendasi Terhadap UU. No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bangka Belitung, tanggal 8 s.d. 13 Februari 2023)	
7.	Kegiatan Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Kajian Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat, dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Bandung, tanggal 14 s.d. 17 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Kajian dan Rekomendasi Terhadap UU. No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan (Palembang, tanggal 20 s.d. 24 Februari 2023)	
9.	Koordiansi dalam rangka Pengumpulan Data Lapangan Sebagai Bahan Penyusuanan Kajian dan Evaluasi Terhadap UU. No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Riau, tanggal 26 Februari s.d. 01 Maret 2023)	
10.	Koordinasi dalam rangka pengumpulan data lapangan sebagai bahan penyusuanan kajian dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Nilai Pancasila (Makassar, tanggal 20 s.d. 23 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Koordinasi Pemetaan dan Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Kajian terhadap Peraturan Gubernur Balu No.28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata di Kota Denpasar (Bali, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023)	
12.	Koordinasi Internalisasi Pancasila dalam pembentukan dan pemantauan produk hokum daerah (Palembang, tanggal 9 s.d. 11 April 2023)	
13.	Koordinasi dalam rangka pengumpulan data empiris terkait implementasi UU No.7/2017 tentang Pemilu dalam perspektif Pancasila (Kalimantan Timur, tanggal 12 s.d. 15 April 2023)	
14.	Pengumpulan data lanjutan dalam rangka kajian dan rekomendasi terhadap UU No.41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan (Kalimantan Timur, tanggal 12 s.d. 15 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Pemantauan proses pengkajian terhadap UU No.24/2011 tentang BPJS dan UU No.41/2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Yogyakarta, tanggal 16 s.d. 19 April 2023)	
16.	Koordinasi dalam rangka internalisasi nilai Pancasila dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi (Semarang, tanggal 7 s.d. 10 Mei 2023)	
17.	Koordinasi pelaksanaan internalisasi indicator nilai Pancasila dalam kajian dan evaluasi kebijakan dan regulasi (Surabaya, tanggal 11 s.d. 13 Mei 2023)	
18.	Kegiatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data empiris kajian dan evaluasi terhadap implementasi UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia berdasarkan Nilai Pancasila (Semarang, tanggal 16 s.d. 18 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Monitoring dan Evaluasi hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi berdasarkan indicator nilai Pancasila (Palembang, tanggal 5 s.d. 7 Juli 2023)	
20.	Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Kajian Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Banda Aceh, tanggal 13 s.d. 15 Juli 2023)	
21.	Koordinasi Pengumpulan Data Primer Lanjutan Dalam Rangka Penyusunan Kajian Dan Rekomendasi Terhadap Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS(Lampung, tanggal 27 s.d. 30 Juli 2023)	
22.	Koordinasi Pelaksanaan Internalisasi Pencasila Dalam Kajian Dan Analisis Kebijakan Dan Regulasi Berdasakan Indikator Nilai Pancasila (Surabaya, tanggal 6 s.d. 8 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
23.	Koordinasi Pengumpulan Data Lanjutan Terkait Penyusunan Kajian Terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali (Surabaya, tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023)	
24.	Pengumpulan data Primer Lanjutan Kajian dan (Bandung, tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2023)	
25.	Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai – Nilai Pancasila di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, tanggal 28 Agustus 2023)	
26.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Tahap Awal Kajian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Dan Regulasi Yang Belum Selaras Dengan Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 18 s.d. 31 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pemantauan dan Evaluasi Tahap Pertama Atas Kajian dan Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi di Bidang Ekonomi, Maritim, dan Investasi Tahun Anggaran 2023 (Yogyakarta, tanggal 17 s.d. 21 September 2023)	
28.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pemantauan dan Evaluasi Tahap Pertama Atas Kajian dan Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 (Surakarta, tanggal 21 s.d. 26 September 2023)	
29.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pemantauan dan Evaluasi Tahap Pertama Atas Kajian dan Rekomendasi Terhadap Kebijakan dan Regulasi di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2023 (Bandung, tanggal 27 September s.d. 1 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
30.	Monitoring Hasil Evaluasi Kajian Terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Bandung, tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2023	
31.	Internalisasi dan Institusionalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kantor Bupati Sumedang (Sumedang, tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2023	
32.	Koordinasi dan Tindak Lanjut Internalisasi dan Institusionalosaso Nilai-Nilai Pancasila (Sumatera Selatan, tanggal 29 Oktober s.d. 1 November)	
33.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pemantauan Tahap Akhir atas Kajian dan Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi Berdasarakan dengan Indikator Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 14 s.d. 18 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
34.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Rekomendasi Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila (Bandung, 3 s.d. Desember 2023)	
35.	Konsinyering Penyusunan Laporan Akhir Hasil Penyelarasan, Kajian dan Evaluasi Kegiatan Kedeputian, Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023)	
36.	Kegiatan Audensi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang Rencana Kerjasama Direktorat Hukum TNI AD dengan BPIP dalam bidan Sumebr Daya Manusia dan Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi. (Jakarta, tanggal 21 Desember 2023)	

D. Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga PIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya penyelenggaraan perumusan arah kebijakan PIP, pengkajian dan perumusan standardisasi materi PIP, diantaranya adalah:

1. Intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
2. Kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
3. Masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik;
4. Rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
5. Pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin.

Berdasarkan urgensi atas tugas yang diemban oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, maka sasaran program Deputi Bidang Pengkajian dan Materi yang ditetapkan dalam Rencana Stategis BPIP Tahun 2020-2024 adalah berupa terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP yang kemudian dapat diukur capaian kinerjanya melalui indikator kinerja utama berupa “persentase kajian PIP yang dapat dimanfaatkan”.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP adalah:

Tabel 2. 24. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi PIP

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	Ket
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	95%	100%	105%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

C.1. Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan

Indikator Keberhasilan:

Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2023 adalah 95%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 99% (rata-rata capaian hasil Kajian Kebijakan PIP, Kajian Materi PIP, dan Kajian Implementasi PIP).

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

a. Pelakasanaan Pengkajian Kebijakan PIP;
b. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;
c. Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 25. Indikator Keluaran Persentase Hasil Kajian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis PIP	2	2	100% (Rekomendasi)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	NSPK Materi, Bahan Ajar dan Metode PIP	1	1	100% (NSPK)
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi PIP	1	1	100% (Rekomendasi)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

a. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase rekomendasi kebijakan PIP yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu dua (2) rekomendasi kebijakan strategis Pembinaan Ideologi Pancasila. Capaian kinerja pada tahun adalah sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$= \frac{capaian\ tahapan\ rekomendasi}{2\ rekomendasi\ kebijakan}$$

$$= \frac{(100\% + 100\%)}{2\ rekomendasi\ kebijakan}$$

$$= \frac{200\%}{2\ rekomendasi\ kebijakan}$$

= 100%

1) Dokumen Arah Kebijakan PIP, GBHIP, dan Peta Jalan PIP

Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun dokumen kebijakan strategis berupa Arah Kebijakan PIP, Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2023,

akan dihasilkan dua dokumen yaitu Arah Kebijakan PIP dan Peta Jalan PIP. Dalam menyusun masing-masing dokumen tersebut, direncanakan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan kajian, finalisasi kajian dan akseptasi pimpinan. Dokumen rancangan Arah Kebijakan PIP telah mencapai tahap akseptasi pimpinan. Sementara itu, penyusunan dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah pada tahap pelaporan progres dokumen Peta Jalan PIP lingkup K/L kepada pimpinan, dan penyusunan dokumen Peta Jalan PIP yang melibatkan Pemerintah Daerah akan dilanjutkan pada 2024. Sehingga perhitungan capaian kinerja diperoleh melalui:

$$\frac{tahapan\ hingga\ akhir\ periode\ 2023}{(2\ dokumen\ x\ 4\ tahapan\ penyusunan)}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{8}{8\ tahapan\ penyusunan}\ x\ 100\%$$

= 100%

Dari capaian tersebut telah dihasilkan:

a) Rancangan Peraturan Presiden RI Tentang Arah Kebijakan PIP;
b) Rancangan Peraturan BPIP RI Tentang Arah Kebijakan PIP;
c) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Presiden tentang Arah Kebijakan PIP ;
d) Dokumen Arah Kebijakan PIP

   Dokumen Arah Kebijakan PIP telah mendapatkan masukan dari JPT Pratama, JPT Madya, dan Unsur Pimpinan BPIP. Pada Desember 2023 dokumen tersebut sedang menunggu persetujuan substantial dari Kepala BPIP;
e) Rancangan Dokumen Peta Jalan PIP Lingkup K/L.

   Penyusunan dokumen Peta Jalan PIP telah melibatkan 33

K/L di tingkat Pusat. Sebanyak 26 dari 33 K/L telah menyampaikan usulan matriks program atau kegiatan yang mendukung Peta Jalan PIP. Penyusunan Peta Jalan PIP bersama K/L akan dilanjutkan pada tahun 2024. Proses selanjutnya akan melibatkan PemerintahDaerah; dan

f) Naskah Rekomendasi Arah Kebijakan PIP dan Peta Jalan PIP Lingkup K/L.

2) Hasil Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP dalam hal perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pada tahun 2023 Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP melakukan kajian kebijakan PIP dengan mengambil salah satu isu nasional berupa kedaulatan pangan. Hal tersebut diinisiasi mengingat pentingnya kedaulatan pangan sebagai bagian dari aktualisasi Pancasila. Dalam menyusun dokumen tersebut, direncanakan dalam enam tahap yaitu perencanaan, penyusunan sistematika, pelaksanaan kajian, validasi dan akseptasi data, finalisasi kajian dan akseptasi pimpinan. Hingga akhir periode 2023, penyusunan dokumen telah sampai pada tahap finalisasi kajian dan akseptasi pimpinan. Sehingga perhitungan capaian kinerja diperoleh melalui:

$$\frac{tahapan\ hingga\ akhir\ periode\ 2023}{6\ tahapan\ penyusunan}\ x\ 100\%$$

$$= \frac{6}{6\ tahapan\ penyusunan}\ x\ 100\%$$

= 100%

Rekomendasi dari kajian ini adalah proyeksi mengenai “neraca pangan”. “Neraca pangan” adalan komposit dari dasar (1) benih,

tenurial dan ekosistem, (2) kebijakan, (3) daya dukung berkelanjutan, (4) komunitas, (5) produksi jangka pendek, (6) produksi jangka panjang, (7) distribusi, (8) keterjangkauan dan kesetimbangan harga, (9) energi dan daya dukung energi terhadap pangan. “Neraca pangan” ini didasarkan atas pondasi Pancasila dimana generasi sekarang menikmati sekaligus mengambil peran dalam pangan nasional yang berkelanjutan, dan generasi sekarang mewariskan situasi pangan ke generasi mendatang sebagai wujud keadilan antar-generasi.

Selain penyusunan 2 rekomendasi tersebut, Direktorat Pengkajian Kebijakan PIP juga melaksanakan tusi Penyerapan Pandangan Dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dua komponen kegiatan yaitu Penerbitan Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kajian Pancasila Sebagai *Weltanschauung* di Kota Bitung.

a) Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Telah dilaksanakan pengelolaan Pancasila Jurnal Keindonesiaan (PJK) dan Perencanaan Penyusunan Jurnal : Gotong Royong. Untuk mencapai *output* tersebut telah dilaksanakan:

- Telah diterbitkan 10 artikel PJK Volume 3 No 2 Oktober 2023. Adapun proses penyaringan artikel dengan melibatkan Rivewer yang merupakan akademisi dari berbagai Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- Telah dilakukan penilaian akreditasi jurnal ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan meraih Peringkat SINTA 3 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti

Riset Nomor 79/E/KPT/2023 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2023;

- Telah terseleksi 13 calon artikel dari 32 artikel yang diterima melalui laman PJK. Artikel tersebut dipilih berdasarkan hasil review oleh reviewer internal dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi dan format penulisan artikel;
- Proses penyusunan PJK Volume 3 Nomor 2 Oktober telah masuk dalam tahapan review dengan melibatkan 14 Mitra Bestari yang merupakan akademisi dari PTN/PTS di Indonesia.

b) Kajian Pancasila Sebagai *Weltanschauung* Di Kota Bitung

Bentuk dari kegiatan direncanakan dalam format kegiatan Simposium Nasional dengan maksud tema "Pancasila Sebagai *Weltanschauung*" yakni Pancasila sebagai *living ideology* Bangsa Indonesia yang berbasis tradisi agama dan kearifan lokal nusantara. Kegiatan ini akan mengundang narasumber dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan budayawan nasional dan lokal. Hasil dari kegiatan ini berupa *Policy paper* yang akan direkomendasikan oleh BPIP kepada Presiden RI sebagai pedoman kebijakan negara berbasis Pancasila sebagai *Weltanschauung*. Untuk hal tersebut pada telah diselenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- Penerimaan Audiensi Badan Kesbangpol Kota Bitung dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional "Pancasila sebagai *Weltanscahuung* di BPIP pada 11 Juli 2023 di Jakarta.
- Audiensi/Koordinasi Persiapan kegiatan Simposium Nasional Pancasila sebagai *Weltanschauung* di BPIP pada 14 Agustus 2023 di Jakarta.

c) Kajian Pancasila Sebagai Weltanschauung Di Kota Manado

Telah dilaksanakan kegiatan Simposium Nasional dengan maksud tema “Pancasila Sebagai Weltanschauung” yakni Pancasila sebagai Iiving ideology Bangsa Indonesia yang berbasis tradisi agama dan kearifan lokal nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan budayawan nasional dan lokal. Adapun dalam kegiatan tersebut mengambil beberapa tema yaitu Pancasila sebagai Welthanchauung: Relasi Agama dan Negara, Basis Etika Kebudayaan Nusantara, dan Menggali Kearifan Lokal Nusantara. Hasil dari kegiatan ini berupa Policy Brief tentang Pancasila sebagai *Weltanschauung*: Basis Relasi Agama dan Negara, serta Basis Etika Kebudayaan Nusantara.

d) Kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI

Dalam rangka penyusunan kajian Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI diperlukan tahapan: 1) Pengumpulan dan proses kurasi Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI; 2) Pencermatan lintas (cross check); 3) Gelar Naskah dengan lintas entitas; 4) Penyerahan dan Penetapan hasil kajian. Penyusunan kajian ini dimulai pada bulan Juli dan ditargetkan menghasilkan draf hasil kajian pada bulan Desember. Hingga bulan Desember telah dilakukan Proses kurasi (pengumpulan dan identifikasi) naskah-naskah otentik yang didapatkan dari National Archives of the Netherlands dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Tahap selanjutnya dilakukan pencermatan lintas dan uji kelayakan naskah melibatkan pakar-pakar sejarah yang berasal dari akademisi (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia). Pada tahun 2023 proses kajian Naskah Otentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI menghasilkan Naskah Uraian Sidang Pertama BPUPK. Pada

tahun 2024 proses penyusunan akan dilanjutkan dengan mengkaji proses sidang kedua BPUPK dan PPKI yang nantinya akan menghasilkan Rancangan Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK dan PPKI.

b. Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2023, Direktorat Pengkajian Materi PIP dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya telah menyelesaikan Penyusunan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Hakim, Kepala Daerah dan Diplomat. Dan sudah menyelesaikan Skenario Materi Audio Visual Pembinaan Ideologi Pancasila dan akan dilakukan finalisasi Standar Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan peluncuran buku Hermeneutika Bung Karno serta Komik Salam Pancasila. Berikut adalah dokumen-dokumen Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila yang sudah diselesaikan:

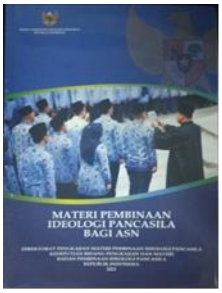

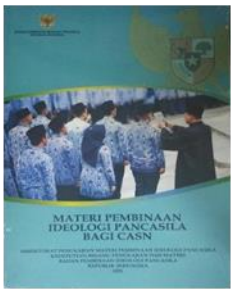

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dengan rincian *output* yaitu satu (1) NSPK.

Secara umum strategi pencapaian luaran seluruh rangkaian kegiatan akan meliputi delapan (8) tahapan: 1) Identifikasi permasalahan/isu publik dan pengumpulan data primer/sekunder dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan kelompok komponen masyarakat; 2) Perumusan sistematika standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 3) Perumusan (NSPK) kebijakan strategis dan program teknis dalam penyusunan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila; 4) Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan terkait standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 5) Melakukan uji petik implementasi atas hasil perumusan standar materi, bahan ajar dan metode Pembinaan Ideologi Pancasila; 6) Perancangan naskah NSPK (Legalisasi) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku; 7) Pemantauan dan evaluasi penyusunan/ perumusan standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila; dan 8) Penyusunan pelaporan / rekomendasi untuk mendukung keberlanjutan implementasi standar materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila.

Capaian kinerja sampai dengan sebesar 100%, dengan rincian perhitungan:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{100\% + 100\% + 100\ \% + 100\%}{4\ (komponen\ kegiatan)} x\ 100\%$$

= 100%

Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila telah melakukan beberapa kegiatan perumusan dan penyusunan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila sebagai berikut:

- Penyusunan Perban Standar Materi PIP bagi Aparatur Negara (Pejabat Negara, TNI-POLRI, ASN) telah sampai pada tahap kedelapan dari 8 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian Kinerja sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

  $$Capaian\ Kinerja = \frac{8}{8} x\ 100\%$$

  $= 100\ \%$

  Dokumen tersebut mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Standar Materi PIP bagi Kepala Daerah, Hakim, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Penyusunan Standar Materi PIP bagi Purna Paskibraka Duta Pancasila telah sampai pada tahap ketujuh dari 8 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian Kinerja sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

  $$Capaian\ Kinerja = \frac{8}{8} x\ 100\%$$

  $= 100\%$

Materi PIP bagi Purna Paskibraka dan Duta Pancasila ini berisi muatan mengenai Sejarah Paskibraka yang terdiri atas awal mula terbentuknya berdiri, tugas, tanggung jawab serta kepemimpinan Paskibraka. Sejarah Pancasila yang berisi tentang kelahiran Pancasila, perumusan dan penetapan Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa serta pengenalan mengenai simbol-simbol negara yang terdiri atas bendera, Bahasa Indonesia dan lembang negara serta lagu kebangsaan. Dalam bab terakhir dokumen ini memuat tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai Purna Paskibraka dan Duta Pancasila, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan disusunnya materi PIP bagi Purna Paskibraka dan Duta Pancasila ini adalah:

1. Mengarusutamakan Pancasila oleh putra putri terbaik bangsa (Paskibraka) dalam negara kesatuan RI yang berbhineka Tunggal Ika;
2. Menguatkan kepemimpinan, keterampilamn dan kedisiplinan yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta pengingkatan wawasan kebangsaan;
3. Membentuk pemimpin penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang mempunyai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945;
4. Menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotism dan nasionalisme; dan
5. Menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- Penyusunan Standar Materi PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya, yakni Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila PAUD s.d SMA Bersama Kemendikbud telah sampai pada tahap ketujuh dari 8 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian

Kinerja sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

$$= \ Capaian\ Kinerja = \frac{8}{8} x\ 100\%$$

$$= 100\ \%$$

- Penyusunan materi PIP bagi Diplomat telah sampai pada tahap terakhir dari 4 tahapan, sehingga dihasilkan Capaian Kinerja sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut

$$= \ Capaian\ Kinerja = \frac{4}{4} x\ 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Materi PIP bagi Diplomat telah disusun oleh Direktorat Pengkajian Materi PIP bersama dengan Duta besar senior dan perwakilan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian luar Negeri. Proses penyusunan materi ini dilakukaan dalam tahun anggaran 2022/2023 dan telah melalui proses finishing dengan sistematika yang kurang lebih sama dengan proses penyusunan dokumen lainnya yaitu diawali denfan rapat koordinasi identifikasi isu dan menentukan narasumber, pertemuan pertama dengan Pusdiklat Kemenlu dan narasumber lainnya, perumusan sistematika penulisan standar materi PIP bagi Diplomat dan pelaksanaan Diskusi kelompok Terpumpun sebanyak empat kali. Materi PIP bagi diplomat berisi tentang pentingnya pemahaman Pancasila bagi para Diplomat bukan hanya sebagai logos atau ilmu tetapi juga sebagai pathos atau rasa kebangsaan dan ethos atau nilai profesionalisme. Seorang Diplomat harus dapat menjelaskan dan meluruskan konsepsi Masyarakat dunia yang tidak sesuai terhadap Indonesia dan lebih dalam lagi dapat memberikan pemahaman dan perspektif lebih luas mengenai nilai-nilai kepancasilaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga diharapkan Diplomat dari Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang menjadikan Pancasila sebagai *Working Ideology* dan *Living Ideology* dalam pelaksanaan diplomasi aktif

dan efektif untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong. Buku ini bertujuan agar para Diplomat dapat mengaktualisasikan pemahaman Pancasila yang dijadikan panduan dalam menyusun priorotas politik luar negeri agar dapat meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di dunia.

c. Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti

Kegiatan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKK): “persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti” sebesar 100%. *Output* atas kegiatan tersebut adalah satu rekomendasi hasil kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yakni Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Formtersebut didukung dengan rincian aktivitas kegiatan sebagai berikut:

$$\frac{1\ Rekomendasi}{1\ Rekomendasi}\ X\ 100\% = 100\%$$

Output tersebut dapat dicapai melalui aktivitas/tahapan kegiatan yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

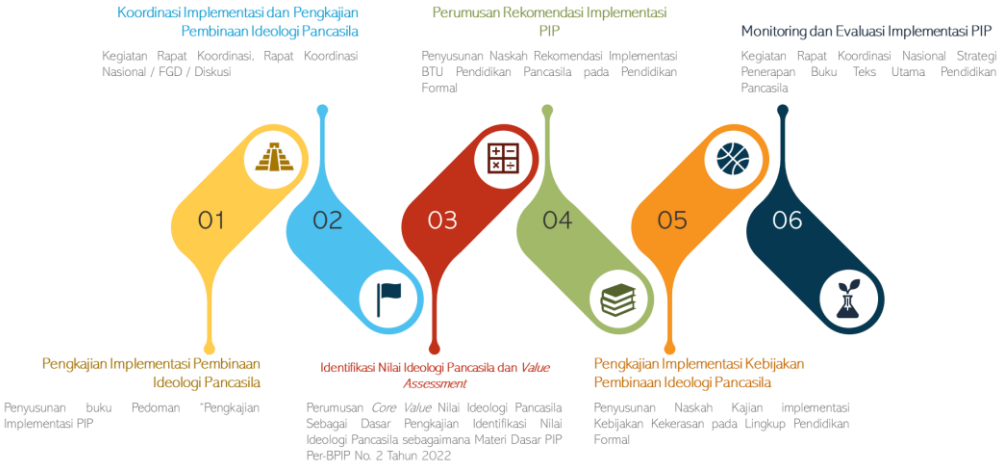

Melalui aktivitas/tahapan tersebut dihasilkan beberapa dokumen hasil kajian, yaitu:

1) Naskah Rekomendasi Strategi Implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Formal.

Naskah rekomendasi ini didalamnya memuat: (1). Rekomendasi; (2). rumusan hasil kajian terkait penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada satuan Pendidikan di Indonesia (lokus kajian). Naskah ini merupakan hasil kajian Terapan (applied research) dengan metode kualitatif yang dilakukan Bersama oleh BPIP (Direktorat Pengkajian Implementasi PIP) dan BRIN (Direktorat Kebijakan, Hukum, Pertahanan dan Keamanan). Dalam prosesnya kajian tersebut melibatkan sejarahwan, budayawan, pusat-pusat kaijan Pancasila serta sejumlah stakeholder pendidikan antara lain yaitu Kemendikbudristek, Kementerian agama, Kementerian Dalam Negeri dan sekolah-sekolah di lokus yang ditentukan. Adapun lokus kajian yang dimaksud dilakukan pada 12 (dua belas) provinsi yakni: Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Secara umum outline naskah rekomendasi ini disusun terdiri dari 6 (enam) bab yakni: Pertama, Rekomendasi yang berisi ringkasan eksekutif dari hasil kajian ini. Kedua, Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan dari disusunnya kajian ini. Ketiga, Kerangka konsep dan tinjauan Pustaka yang menjelaskan metode dan kerangka berpikir dari kajian serta tinjauan literatur guna memperkuat kajian ini. Empat, Hasil kajian yang memaparkan hasil dari kajian yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data secara kualitatif. Kelima, Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi simpulan dan rekomendasi kepada kementerian/Lembaga terkait yakni Menko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri dan BPIP dan Enam, adalah bagian Penutup. Naskah ini juga dilengkapi dengan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan

daftar Pustaka sebagai pendukung dari 6 (enam) bagian utama. Naskah ini disusun dengan tujuan bagian dari rekomendasi BPIP kepada Presiden dalam rangka percepatan penerapan mata pelajaran wajib Pendidikan Pancasila dan penerapan BTU Pendidikan Pancasila pada tahun ajaran 2024/2025 di seluruh satuan Pendidikan Indonesia.

2) Naskah Rekomendasi Identifikasi dan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Anti Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Formal

Naskah rekomendasi ini merupakan hasil kajian terapan (applied research) dengan metode kualitatif yang dilakukan Bersama oleh BPIP (Direktorat Pengkajian Implementasi PIP) dan BRIN (Direktorat Kebijakan, Hukum, Pertahanan dan Keamanan). Dalam prosesnya kajian ini melibatkan sejarahwan, budayawan, pusat-pusat kajian, Kesbangpol dan beberapa kementrian/Lembaga terkait antara lain Kemendikbudristek, Kemendagri serta KemenPPA. Sebagai pendukung kajian ini juga dilakukan pengambilan data lapangan terkait kasus kekerasan di sekolah yaitu pada SMPN 1 Sukodadi, kab. Lamongan, Jawa Timur.

Naskah rekomendasi ini disusun terdiri dari 6 (enam) bagian yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Rekomendasi yang berisi ringkasan eksekutif dari hasil kajian ini. Kedua, Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan dari disusunnya kajian ini. Ketiga, Kerangka konsep dan tinjauan Pustaka yang menjelaskan metode dan kerangka berpikir dari kajian serta tinjauan literatur guna memperkuat kajian ini. Empat, Hasil kajian yang memaparkan hasil dari kajian yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data secara kualitatif. Kelima, Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi simpulan dan rekomendasi kepada kementerian/Lembaga terkait yakni Kemendikbudristek,

Kemendagri, Kemen PPA dan BPIP sendiri. Enam, bagian Penutup.

Naskah ini disusun dengan tujuan dalam rangka memberikan rekomendasi hasil identifikasi pada Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penengangan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan apakah sudah mengandung nilai-nilai ideolgi Pancasila. Hal ini bukan hanya secara normatif dalam kandungan pasal-pasalnya melainkan dalam penerapan dari kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut. khususnya pada lingkungan satuan Pendidikan formal.

3) Buku Pedoman Pengkajian Implementasi Kebijakan Ideologi Pancasila

Buku Pedoman ini dibuat sebagai pedoman dan panduan teknis operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila baik yang dikelola oleh Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila, pengkajian yang melibatkan multistakeholder maupun yang diswakelolakan dengan universitas atau kelompok masyarakat lainnya. Buku pedoman ini dirancang agar dapat menjadi pedoman pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang baik, menampilan eviden, mengandung Analisa yang kuat dan memberikan solusi terhadap fakta yang dapat menjadi strategi implementasi. Diharapkan hasil kajian menjadi input balik yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk peningkatan efektifitas internalisasi pembinaan ideologi Pancasila di lembaga-lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia.

Buku Pedoman ini berisikan enam bagian yang terdiri dari Pertama, Rekomendasi yang berisi ringkasan eksekutif dari hasil kajian ini. Kedua, Pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan dari disusunnya kajian ini. Ketiga, Kerangka konsep dan tinjauan Pustaka yang menjelaskan metode dan kerangka berpikir dari kajian serta tinjauan literatur guna memperkuat kajian ini. Empat, Hasil kajian yang memaparkan hasil dari kajian yang disusun berdasarkan hasil pengumpulan data secara kualitatif. Kelima, Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi simpulan dan rekomendasi kepada kementerian/Lembaga terkait dan Bagian keenam yaitu Penutup serta Glossari untuk menjadikan buku panduan ini satu kesatuan yang utuh.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

a. Pelakasanaan Pengkajian Kebijakan PIP:

Tabel 2. 27. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	FGD Penyusunan Rancangan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 10 s.d. 11 Februari 2023)	
2.	Kunjungan dalam rangka Koordinasi Awal Rencana Penyusunan Kajian Kedaulatan Pangan sebagai Aktualisasi Nilai Pancasila Kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (Jakarta, tanggal 21 Februari 2023)	
3.	Rencana Kerja Penyusunan Dokumen Arah Kebijakan PIP, GBHIP dan Peta Jalan PIP dengan Biro Hukum dan Organisasi (Jakarta, tanggal 02 s.d. 03 Maret 2023)	
4.	Pembahasan Strategi Tindaklanjut Penyempurnaan Dokumen Arah Kebijakan PIP, GBHIP dan Peta Jalan PIP bersama Kepala BPHN (Jakarta, tanggal 15 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	DKT Penyusunan Jurnal Ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) Volume 3 Nomor 1 April 2023 dan Perencanaan Jurnal Gotong Royong (GR) (Yogyakarata, tanggal 19 s.d. 22 Maret 2023)	
6.	Penerimaan Audiensi dan Permohonan Kerjasama Bakesbangpol Pemkot Bitung terkait Pelaksanaan Simposium Nasional Pancasila sebagai *Weltanscahuung* (Jakarta, tanggal 29 Maret 2023)	
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Dokumen Rekomendasi Kebijakan PIP Menuju Masyarakat 5.0 Berlandaskan Pancasila dan Penyusunan Kajian Strategis Diklat PIP (Jakarta, tanggal 29 Maret s.d. 1 April 2023).	
8.	Publikasi Jurnal Ilmiah “Pancasila: Jurnal Keindonesiaan” Volume 3 No.1 April 2023 (Jakarta, tanggal 10 s.d. 13 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kunjungan Kepada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dalam Rangka Benchmarking Perencanaan Penerbitan Jurnal: Gotong Royong (Semarang, tanggal 16 s.d. 18 April 2023)	
10.	*Brainstorming* Penyusunan Dokumen Arah Kebijakan PIP (Bali, tanggal 03 s.d. 06 Mei 2023)	
11.	Penyempurnaan Sistematika Dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Penyusunan Narasi Dokumen Arah Kebijakan PIP (Solo, tanggal 10 s.d. 13 Mei 2023)	
12.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pangan (Solo, tanggal 10 s.d. 13 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Pembahasan Rancangan Naskah Urgensi Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Mei 2023)	
14.	Konsultasi Tindak Lanjut Peringkat Jurnal Ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) pada Science and Technology Index (SINTA) (Jakarta, tanggal 24 Mei 2023)	
15.	Penyerapan Pandangan dan Pengumpulan Data Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Penyusunan Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Mei 2023)	
16.	Reviu Rancangan Dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Naskah Urgensi Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 15 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Perbaikan atas Hasil Reviu Rancangan Dokumen Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Peraturan Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Juni 2023)	
18.	Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Kegiatan Kajian Pancasila Sebagai *Weltanschauung* di Bitung (Sulawesi Utara, tanggal 18 s.d. 21 Juni 2023)	
19.	Optimlisasi Pengelolaan Jurnal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan dan Perencanaan Penyusunan Jurnal : Gotong Royong (Jakarta, tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023)	
20.	Penerimaan Audiensi Badan Kesbangpol Kota Bitung dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Simposium Nasional “Pancasila sebagai *Weltanscahuung*” (Jakarta, tanggal 11 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Pembahasan Rancangan Dokumen Dan Peraturan Arah Kebijakan PIP (Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 24 Juli 2023)	
22.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pembahasan Rancangan Dokumen Arah Kebijakan (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Juli 2023)	
23.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Narasi Rekomendasi Kajian Kebijakan Di Bidang Pangan (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Juli 2023)	
24.	Pembahasan Rencana Penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Pembahasan Rencana Penyusunan Risalah Sidang BPUPK (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2023)	
26.	DKT Finalisasi Dokumen Rancangan Arah Kebijakan PIP Bagi JPT Pratama BPIP (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2023)	
27.	DKT Finalisasi Sistematika Peta Jalan PIP (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2023)	
28.	DKT Pembahasan Awal Penyusunan Rancangan Naskah Autentik Risalah Sidang BPUPK (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 Agustus 2023	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
29.	Audiensi/Koordinasi Persiapan kegiatan Simposium Nasional Pancasila sebagai *Weltanschauung* (Jakarta, tanggal 14 Agustus 2023	
30.	Penyusunan Awal Risalah Sidang BPUPK dan PPKI (Yogyakarta, tanggal 29 Agustus s.d. 1 September 2023)	
31.	Diskusi internal Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mengenai Dokumen Rancangan Arah Kebijakan PIP. (Jakarta, tanggal 7 September 2023)	
32.	Finalisasi Dokumen Rancangan Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 18 s.d. 20 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
33.	Publikasi Jurnal Ilmiah Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 09 s.d. 12 Oktober 2023)	
34.	Penyusunan Program Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 09 s.d 12 Oktober 2023)	
35.	Rapat Finalisasi Dokumen Rancangan Arah Kebijakan PIP (Jakarta, tanggal 04 Oktober 2023)	
36.	Rapat Persiapan Simposium Nasional Pancasila Sebagai *Weltanschauung* (Jakarta, tanggal 19 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Rapat Identifikasi Program dan Kegiatan pada Isu Strategis Peta Jalan PIP (Jakarta, tanggal 31 Oktober 2023)	
38.	Rapat Pembahasan Matriks Dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 10 November 2023)	
39.	Simposium Nasional Pancasila sebagai *Weltanschauung* (Manado, tanggal 12 s.d. 17 November 2023)	
40.	*Kick Off Meeting* Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
41.	DKT Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kementerian/Lembaga dalam Rangka Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Pangan (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 November 2023)	
42.	DKT Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kementerian/Lembaga dalam Rangka Penyusunan Kajian Naskah Otentik (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 November 2023)	
43.	Rapat Persiapan Penyusunan Peta Jalan PIP (Jakarta, tanggal 01 Desember 2023)	
44.	Gelar Naskah Otentik Sidang BPUPK dan PPKI (Jakarta, tanggal 06 s.d. 08 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
45.	Penyusunan Matriks Peta Jalan PIP Oleh K/L yang dihadiri oleh Bappenas (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	
46.	Pemaparan Matriks Peta Jalan PIP oleh K/L (Daring) (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	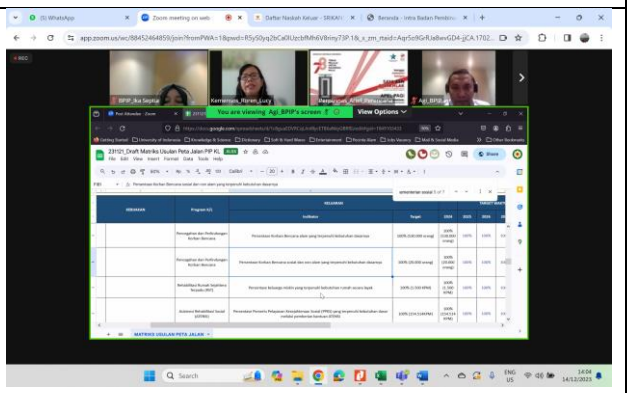
47.	Kurasi Naskah Otentik Pra-Sidang-Sidang Pertama BPUPK (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	
48.	Pengelolaan PJK 2024 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
49.	Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran dan Penyusunan Sistematika Policy Brief Kajian Pancasila sebagai *Weltanschauung* (Daring) (Jakarta, tanggal 15 Desember 2023)	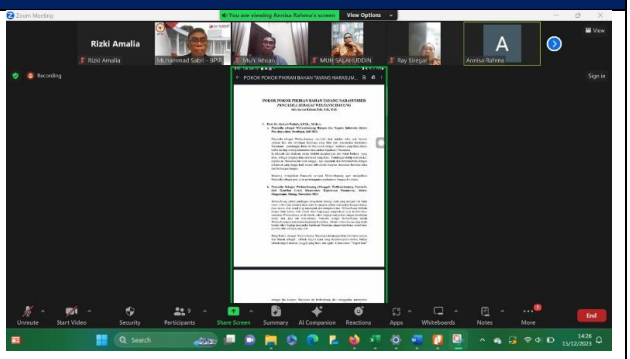
50.	Rapat Pembahasan Rivew Draf Policy Brief Kajian Pancasila sebagai *Weltanschauung* (Daring) (Jakarta, tanggal 18 Desember 2024)	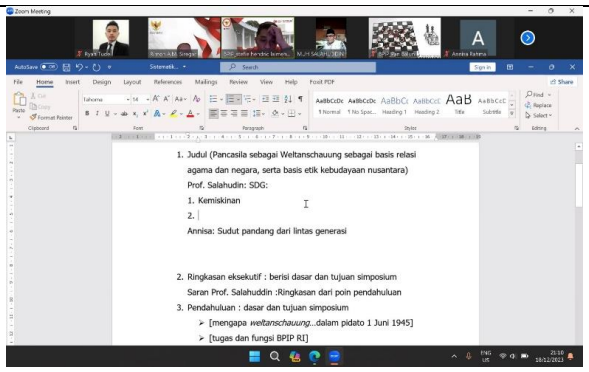
51.	Finalisasi Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 Desember 2023)	
52.	Rekomendasi Kebijakan Kedaulatan Pangan (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 Desember 2023)	

b. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP;

Tabel 2. 28. Pelaksanaan Pengkajian Materi PIP

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Reviu dan Finalisasi Draf Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Februari 2023)	
2.	Koordinasi Penyusunan Materi PIP bagi Paskibrakan dan Persiapan Penerbitan Buku Pengkajian Materi PIP (Jakarta, tanggal 15 Februari 2023)	
3.	Rapat Koordinasi Tim Penelaahan Buku Teks Pendidikan Pancasila (BPIP) (Jakarta, tanggal 28 Februari 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	DKT Pemabahasan Tiga Draf Buku Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Maret 2023)	
5.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Diplomat (Jakarta, tanggal 10 s.d. 11 Maret 2023)	
6.	Pembahasan Hasil Penelaahan 1 atas “Buku Teks Utama”. (Bekasi, tanggal 20 s.d. 22 Maret 2023)	
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pembahasan Hasil Penelaahan Paripurna Pertama Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (BTUPP) melalui Rapat Kerja Penelaahan Tahan II (Finalisasi) Buku Pendidikan Pancasila Jenajnag SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA	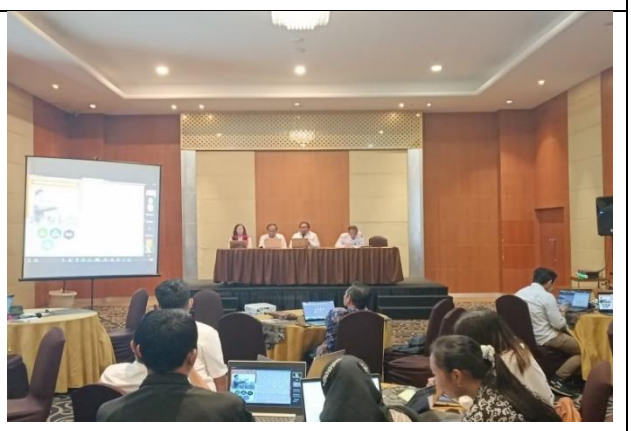

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
	(Bogor, tanggal 27 s.d 29 Maret 2023)	
8.	Diskusi kelompok terpumpun (DKT) Penyusunan Kerangka Awal Draf Dokumen Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Anggota Paskibraka (Jakarta, tanggal 4 s.d. 7 April 2023)	
9.	Penyusunan Materi Audio Visual PIP Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pembahasan Draf Pertama Dokumen Materi PIP bagi Anggota Paskibraka. (Jakarta, tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023)	
10.	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Calon Paskibraka di Provinsi Papua Barat (Papua Barat, tanggal 17 s.d. 21 Mei 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyemournaan Draf Standar Materi PIP bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Mei 2023)	
12.	Menghadiri Undangan Gelar Wicara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 (Surabaya, tanggal 30 s.d. 31 Mei 2023)	
13.	Pembacaan Bersama Internal Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Sekolah Dasar (SD) s.d SMA/SMK. (Jakarta, tanggal 8 s.d. 10 Juni 2023)	
14.	Pembacaan Bersama Buku Teks Utama Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA Unsur Pimpinan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 14 Juni 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Perbaikan Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Juni 2023)	
16.	Rapat Koordinas Revisi Capaian Pembelajaran (CP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA (Jakarta, tanggal 21 Juni 2023)	
17.	Dukungan Finalisasi Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 Juni 2023)	
18.	Penyelarasan Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Jakarta, tanggal 23 Juni 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Penyelesaian Masukan Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Jakarta, 26 Juni 2023)	
20.	Rapat Koordinasi Finalisasi Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (Jakarta, 27 Juni 2023)	
21.	Pembahasan Akhir Draf Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA (Jakarta, tanggal 9 s.d. 13 Juli 2023)	
22.	Penyusunan Draf Materi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Juli 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
23.	Penyusunan Buku Pancasila bagi Paskibraka dan Penyempurnaan Materi Hermeneutika (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Agustus 2023)	
24.	Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2023)	
25.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penelaahan Draf Materi Pembinaan Ideologi Pancaasila bagi Anggota Paskibraka (Jakarta, tanggal 17 s.d. 18 November 2023)	
26.	Peluncuran Buku “Garuda Pancasila; Sejarah Penciptaan Lambang Negara” (Jakarta, tanggal 11 Desember 2023)	

No	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	Peluncuran "Komik Pancasila dan Buku Menemukan Kembali Api Pancasila Melalui Pidato-Pidato Bung Karno" (Jakarta, tanggal 12 Desember 2023)	

c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP.

Tabel 2. 29. Aktivitas Pelaksanaan Pengkajian Implementasi PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Pembahasan Kegiatan Tahun 2023 terkait Pengkajian Implementasi PIP dan Identifikasi Nilai Pancasila (Jakarta, tanggal 11 Januari 2023)	
2.	Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Koordinasi Implementasi PIP di Provinsi Bangka Belitung (Bangka Belitung, tanggal 8 s.d. 11 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Kegiatan Penyusunan Kerangka Pikir dan Kerangka Kerja Alur Tujuan Pengkajian Implementasi PIP (Jakarta, tanggal 13 s.d 15 Februari 2023)	
4.	Kunjungan Kerja Dalam Rangka Koordinasi Awal Dalam Rangka Pengkajian Implementasi PIP di Kota Semarang (Semarang, tanggal 14 s.d 16 Februari 2023)	
5.	Koordinasi Awal Dalam Rangka Pengkajian Implementasi PIP di Kota Cirebon, Jawa Barat (Cirebon, tanggal 16 s.d. 18 Februari 2023)	
6.	Kegiatan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Perencanaan Penyusunan Proposal Pengkajian Implementasi Pancasila (Kediri, tanggal 19 s.d. 21 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Kegiatan Koordinasi Startegi Implementasi Pendidikan Pancasila Pada jenjang Pendidikan Formal i Jakarta (Jakarta, tanggal 22 s.d. 23 Februari 2023).	
8.	Paket Meeting Luar Kota Penyusunan Rancangan Pelaksanaan/Teknis Pengkajian Implementasi PIP di Bogor, Jawa Barat (Bogor, tanggal 24 s.d. 25 Februari 2023).	
9.	Penyusunan Rancangan Pelaksanaan/Teknis Pengkajian Implementasi PIP di Bogor (Bogor, tanggal 24 s.d. 25 Februari 2023).	
10.	Kegiatan Penyelarasan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pancasila dan Pengolahan Buku Saku (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Kegiatan Kunjungan Awal Perencanaan Penyusunan Pengkajian Implementasi PIP di TK ABA Kauman dan Rapat Koordinasi dengan UNY DI Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 3 s.d. 5 Maret 2023)	
12.	Perencanaan Penyusunan Proposal Pengkajian Implementasi Pancasila Lingkup Pendidikan Formal di Kota Manado (Manado, tanggal 8 s.d. 11 Maret 2023).	
13.	Strategi Penerapan Materi PIP Pada Jenjang Pendidikan Tinggi (Piloting Pada Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Cirebon dan Semarang) (Cirebon, tanggal 16 s.d. 18 Maret 2023)	
14.	Menghadiri Undangan Forum Pendidikan Karakter Pancasila Dengan Tema Pancasila Dalam Tindakan dan Membangun Moderasi Beragama Generasi Muda di Klaten(Klaten, tanggal 10 s.d. 12 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Menghadiri Undangan Forum Keberagaman dan Kebinekaan Dengan Tema menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital di Kota Wonogiri (Wonogiri,tanggal 19 s.d. 21 Maret 2023)	
16.	Kegiatan Perampungan Buku Saku Pengkajian PIP dan Tindak Lanjut Strategi Implementasi Buku Pendidikan Pancasila pada Piloting Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta, tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023)	
17.	Kegiatan Menghadiri Undangan Dalam Acara Forum Pendidikan Karakter Pancasila Dengan Tema “Penguatan Karakter Santri" (Sulawesi Barat, tanggal 2 s.d. 4 April Januari 2023)	
18.	Uji Kelayakan Srategi Penenerapan Materi Pendidikan Pancasila Pada Jenjang Pendidikan PAUD dan SD/MI (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Uji Kelayakan Materi Non Teks (Video Pembelajaran Pendidikan Pancasila) Sebagai strategi Implementasi PIP Pada Jenjang Pendidikan PAUD dan SD/MI (Jakarta, tanggal 9 s.d 11 April 2023)	
20.	Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Strategi Implementasi Materi Pendidikan Pancasila Jenjang Perguruan Tinggi (Piloting pada Universitas 17 Agustus 1945) (Banyuwangi, tanggal 11 s.d 13 April 2023)	
21.	Kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka koordinasi strategi implementasi materi pendidikan pancasila piloting Untag se Indonesia dan penjajakan piloting LPTK se Indonesia serta kerja sama pengkajian implementasi PIP (Surabaya, tanggal 12 s.d. 15 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Penjajakan Pengkajian Bersama Bpip dan PSP UGM Tentang Model Implementasi Pancasila Melalui Manajemen Etik dan Penguatan Intergritas (Yogyakarta, tanggal 16 s.d. 18 April 2023)	
23.	Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Koordinasi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Jawa Barat (Bandung, tanggal 16 s.d. 18 April 2023).	
24.	Menghadiri Undangan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Melalui Akselerasi Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) (Yogyakarta, tanggal 4 s.d. 6 Mei 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Rapat koordinasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) pada Pendidikan Formal (Wilayah Jawa, Bali, NTT dan NTB) dalam rangka strategi penerapan materi Pendidikan Pancasila pada Pendidikan Formal (Semarang, tanggal 20 s.d. 24 Mei 2023).	
26.	Kegiatan Diskusi Publik Warga Negara Yang BerPancasila (Tokoh Agama Nasrani) (Surabaya, tanggal 27 s.d. 29 Juli 2023)	
27.	FGD Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Pada Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (*Brainstorming* Awal) (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Kegiatan Aseptasi Buku Saku Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 8 s.d 9 Agustus 2023)	
29.	FGD Perumusan Indikator Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila dalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan (Jakarta, tanggal 24 s.d 26 Agustus 2023)	
30.	Kegiatan Menghadiri Undangan Universitas Mataram Dengan Tema Diskusi Publik “Peran Aktivis Sebagai Agen Of Change Dalam Menghadapi Problematika Bangsa (Mataram, tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Koordinasi dan Singkronisasi Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Lingkungan Pendidikan Formal Jenjang Dasar dan Menengah (Yogyakarta, tanggal 29 Agustus s.d. 2 September 2023)	
32.	FGD Rancangan Peraturan BPIP Tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila Bidang Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi di Anyer (Banten, tanggal 6 s.d. 8 September 2023).	
33.	FFG Perumusan *Core Value* Nilai Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Pengkajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan, Program Dan Kegiatan (Jakarta, tanggal 28 s.d. 30 September 2023).	
34.	Kegiatan Penyempurnaan Buku Panduan Pengkajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila serta Pengkajian Implementasi kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
	pada kebijakan Program dan Kegiatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial Politik dan Komponen Masyarakat Lainnya, (Jakarta, tanggal, tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2023)	
35.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Pendidikan Formal (Yogyakarta, tanggal tanggal 9 s.d. 11 Oktober 2023)	
36.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Pendidikan Formal di Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Kegiatan DKT Identifikasi Nilai Pancasila dan Value Assesment dalam Pendidikan Karakter di Indonesia, di (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2023)	
38.	Kegiatan Studi Lapangan Pengkajian Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Timur (Studi Lapangan di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, Bakesbangpol Provinsi, dan SMPN 1 Sukodadi Lamongan) (Jawa Timur, tanggal 16 s.d. 20 Oktober 2023)	
39.	Kegiatan Koordinasi Pengkajian Implementasi PIP dan FGD Konsinyering Perumusan Hasil Pengkajian Nilai Ideologi Pancasila di (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
40.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Pendidikan Formal di Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat (Jakarta, tanggal 8 s.d. 10 November 2023)	
41.	Kegiatan FGD Akseptasi Identifikasi Nilai Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan Dan Konsinyering Hasil Pengkajian Implementasi di Lingkungan Pendidikan Formal (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 November 2023)	
42.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Pendidikan Formal di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah , tanggal 19 s.d. 21 November 2023)	
43.	Kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Pada Pendidikan Formal (Kalimantan Barat, tanggal 22 s.d. 24 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
44.	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun akseptasi Pengkajian Strategi penerapan Buku Teks Utama Pendidkan Pancasila (Sumatera Selatan, tanggal 7 s.d. 9 Desember 2023)	
45.	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Akseptasi Pengkajian Strategi Penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila dan Konsiyering (Bali, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	
46.	Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Strategi Penerapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila (Banten, tanggal 17 Desember s.d 19 Desember 2023)	
47.	Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Kajian Kebijakan PIP, Kajian Materi PIP, Dan Kajian Implementasi PIP, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi (Yogyakarta, tanggal 20 s.d. 23 Desember 2023)	

E. Diklat PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

Pengembangan kebijakan/regulasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Sistem Nasional Pendidikan dan PIP yang terstruktur, sistemik, dan masif sehingga perlu dirumuskan pengaturan yang kompehensif. Program Teknis Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan PIP merupakan implementasi dari Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan. Perumusan program teknis dilakukan untuk memastikan advokasi kebijakan strategis yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni terwujudnya pembumian Pancasila sebagai dasar negara sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat. Program teknis tersebut perlu dielaborasikan dalam program jangka panjang Sistem Nasional Diklat PIP dalam rangka mendukung terwujudnya pembumian Pancasila bagi aparatur negara dan seluruh komponen bangsa menuju sumber daya manusia unggul pada saat Indonesia Emas Tahun 2045. Sedangkan program teknis jangka menengah, jangka pendek, serta tahunan dielaborasikan secara komprehensif dan cascading dimana secara agregat mendukung pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Sumber daya manusia Indonesia Emas tahun 2045 diharapkan mempunyai kecerdasan yang lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain untuk mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban dunia. Pembangunan SDM unggul tersebut perlu dilakukan secara paripurna, tidak hanya membangun kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga membangun iman dan taqwa serta budaya sehingga menjadi insan-insan pembangunan yang religius, menguasai iptek, serta berbudaya luhur.

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarkat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal adalah:

Tabel 2. 30. Indikator Keluaran Program Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan PIP Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan/Keagamaan Formal, dan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	KET
Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan	100%	124,6%	124,6%
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	100%	180%	180%
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi	100%	180%	180%
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	50%	886%	886%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

D.1. Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2023 adalah 100%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 124,6% (rata2 capaian hasil indikator kinerja kegiatan perencanaan dan pelatihan PIP) dengan capaian berupa penyusunan kesepakatan perencanaan DIklat PIP.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 31. Indikator Keluaran Persentase hasil perencanaan pendidikan dan pelatihan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan Strategis Diklat PIP (PN)	3	3	100% (Rekomendasi)
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat	Sertikasi Pendidik dan Pelatih Diklat PIP (PN)	150	262	174% (Orang)
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	NSPK Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	1	1	100% (NSPK)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh yaitu:

a. Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diukur dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan. Sampai dengan akhir periode tahun 2023 rekomendasi Kebijakan Strategis dan Program Teknis Diklat PIP yang telah ditindaklanjuti adalah:

1. Dokumen Cetak Biru Sistem Pendidikan dan Pelatihan PIP

   Merupakan dokumen perencanaan dalam pembangunan, penyelenggaraan, dan pengembangan Sistem Diklat PIP yang dilaksanakan secara terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif, terstandar, serta berkesinambungan bagi lembaga neg ara, Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah, dan lembaga lain yang berbadan hukum, organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan komponen masyarakat lainnya. Dokumen Cetak Biru Sistem Diklat PIP telah selesai disusun dengan penyermpurnaan dari Dewan Pengarah BPIP, Dewan Pakar BPIP, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, dan Wakil Kepala BPIP.

2. Dokumen Pedoman Sertifikasi Pendidik Pendidikan dan Pelatihan PIP

   Merupakan dokumen bagi lembaga/instansi/institusi/organisasi/ perguruan tinggi pada proses pemberian sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP yang akan menjadi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan Diklat PIP. Dokumen Pedoman sertifikasi telah disetujui oleh Kepala BPIP dengan berupa Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP. Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP merupakan dokumen bagi lembaga/instansi/institusi/

organisasi/perguruan tinggi pada proses pemberian sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP yang akan menjadi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP dalam upaya mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan Diklat PIP

3. Dokumen Panduan Penggunaan *Learning Management System* (LMS) Diklat PIP Bagi Paskibraka Tahun 2022

   Merupakan merupakan dokumen bagi Direktorat Pelaksanaan Diklat dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam penyelenggara Diklat Bagi Paskibraka Tahun 2022 melalui LSM. Dokumen panduan penggunaan LMS Diklat PIP Bagi Paskibraka Tahun 2022 telah selesai di susun dan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tahun 2022 diseluruh wilayah Indonesia.

b. Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertifikat

Jumlah Tenaga Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang disertifikasi sampai saat ini dari total sebanyak 461 orang yang terdaftar, sebanyak 262 orang dinyatakan lulus proses sertifikasi yang terdiri dari 97 orang internal BPIP dan 165 orang Pengajar Diklat PIP eksternal BPIP dengan kualifikasi utama sebanyak 47 orang, kualifikasi menengah sebanyak 42 orang, dan kualifikasi dasar sebanyak 76 orang dari berbagai Kementerian, Lembaga, Instansi, dan Perguruan Tinggi se-Indonesia. Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi penceramah/fasilitator dan Pengajar Diklat PIP adalah tersedianya penceramah/fasilitator dan Pengajar Diklat PIP sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompentensi sumber daya manusia pada penyelenggaraan Diklat PIP.

c. Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti

NSPK Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP telah disetujui Kepala BPIP berupa Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 65 tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tujuan Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akreditasi Penyelenggara Diklat PIP oleh BPIP. Dengan tersedianya lembaga penyelenggara Diklat PIP pada lembaga negara, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memiliki kesamaan pandangan tentang ideologi Pancasila dan pembangunan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 32. Aktivitas Penyelenggaraan Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Penerimaan Kunjungan Kerja Koordinasi Bimbingan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Lampung Kab/Kota Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 4 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Purnapaskibraka daerah Provinsi, Kab/Kota Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 9 Januari 2023)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pemanfaatan Learning Management System Diklat PIP dan Perencanaan Penyusunan Cetak Biru Diklat PIP (Jakarta, tanggal 16 Januari 2023)	
4.	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Diklat PIP Kota Banjarmasin (Jakarta, tanggal 19 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Koordinasi Perencanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Aceh (Aceh, tanggal 18 s.d. 20 Januari 2023)	
6.	Rangka Koordinasi Pendataan Perencanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Papua (Jayapura, tanggal 18 s.d. 21 Januari 2023)	
7.	Koordinasi Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Timur, tanggal 18 s.d. 20 Januari 2023)	
8.	Koordinasi Pendataan Perencanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Sumatera Utara (Medan, tanggal 25 s.d. 27 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Perencanaan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Jejaring Panca Mandala (Jakarta, tanggal 9 Februari 2023).	
10.	Diskusi dan Perumusan Daftar Inventarisasi masalah terkait NSPK Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Diklat PIP Secara Instansional (Jakarta, tanggal 16 s.d. 19 Februari 2023).	
11.	Koordinasi Perencanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2022 (Jakarta, 28 Februari s.d. 1 Maret 2023).	
12.	Diskusi Kelompok Terpumpun Perumusan Kerangka Dokumen Cetak Biru Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Depok, tanggal 2 s.d. 4 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Brainstorming NSPK Akreditasi Penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Bogor, tanggal 7 s.d 9 Maret 2023)	
14.	Webinar Pembangunan Karakter Generasi Milenial dan Generasi Z: Teknokratis Perancangan Standar Karakter Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (Daring, tanggal 21 Juli 2023).	
15.	Evaluasi Penggunaan LMS PIP bagi Paskibraka Daerah Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023).	
16.	Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Progam Diklat Dan Penggunaan LMS Pada Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2022 di Sumatera Selatan (Palembang, tanggal 12 s.d. 14 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Progam Diklat Dan Penggunaan LMS Pada Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2022 di Bangka Belitung (Pangkal Pinang, tanggal 3 s.d. 5 Mei 2023)	
18.	Menghadiri Undangan Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Logis Kinerja RB Tematik BPIP dan Penyelarasan Internal Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Akreditasi Diklat PIP (Karanganyar, tanggal 7 s.d. 9 Mei 2023)	
19.	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Progam Diklat dan Penggunaan LMS Pada Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2022 di Bali (Bali, tanggal 10 s.d. 13 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
20.	Penyusunan Skala Prioritas Segmentasi Diklat PIP Dalam Dokumen Cetak Biru Sistem di Surakarta (Aceh, tanggal 6 s.d. 9 Juni 2023)	
21.	Penerimaan Kunjungan Kerja DanKoordinasi Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Purna Paskibraka Duta Pancasila di BPIP (Jakarta, tanggal 15 Juni 2023)	
22.	Pembahasan Rancangan Dokumen Cetak Biru Diklat PIP, Pengumpulan Data Peserta Diklat PIP Segments ASN, dan Rekonsiliasi Data Peserta PIP Bagi Paskibraka Tahun 2022 Melalui LMS di Jakarta (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
23.	Rapat pembahasan rancangan Surat Keputusan Kepala tentang Pedoman Sertifikasi dan Panduan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di BPIP (Jakarta, tanggal 26 Juni 2023)	
24.	Pengumpulan Data Peserta Diklat PIP Segmentasi TNI, Polri, serta Organisasi Sosial dan Politik (Jakarta, tanggal 10 s.d. 12 Juli 2023)	
25.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Sasaran, Indikator dan Target dalam Program Strategis Sistem Diklat PIP (Depok, tanggal 17 s.d. 19 Juli 2023)	
26.	Diskusi Kelompok Terpumpun Finalisasi Program Strategis Jangka Panjang Cetak Biru Diklat PIP (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Strategi Implementasi Cetak Biru Sistem Diklat PIP (Depok, tanggal 7 s.d. 9 Agusuts 2023)	
28.	Rapat Penerimaan Audiensi Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pembahasan Purnapaskibraka (Jakarta, tanggal 11 Agustus 2023)	
29.	Konsinyasi Penyempurnaan Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dan Pedoman Sertifikasi Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2023)	
30.	Pembahasan Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP dan Pedoman Sertifikasi Pengajar Diklat PIP Bersama Dewan Pengarah dan Dewan Pakar BPIP (Jakarta, tanggal 22 s.d. 25 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Pembahasan Peta Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pengajar Diklat PIP dan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP Melalui LMS (Yogyakarta, tanggal 30 Agustus s.d. 2 September 2023)	
32.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pemutakhiran Data Perencanaan dan Pengembangan Diklat PIP dalam Dokumen Cetak Biru Sistem Diklat PIP (Jakarta, tanggal 21 s.d. 22 September 2023)	
33.	Reviu Prototype Aplikasi Learning Management System Sertifikasi Pengajar Diklat PIP dan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP (Bandung, tanggal 3 s.d. 6 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
34.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Calon Peserta Sertifikasi Pengajar dan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP (Tangerang, tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023)	
35.	Rapat Koordinasi Tim Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP (Bekasi, tanggal 18 – 21 Oktober 2023)	
36.	Rapat Koordinasi Tim Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, tanggal 30 Oktober 2023	
38.	Rapat Rapat Tim Sekretariat bersama Ketua Asesor Penceramah/Fasilitator Dan Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 30 Oktober 2023)	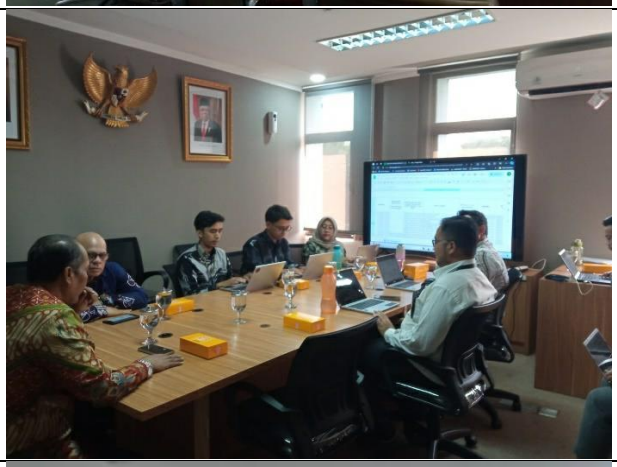
39.	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyempurnaan Peta Jalan Diklat PIP dalam Dokumen Cetak Biru Sistem Diklat PIP (Manado, tanggal 1 s.d. 4 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
40.	Kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Verifikasi Data Peserta Sertifikasi Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 10 November 2023)	
41.	Kegiatan Penilaian Dokumen Pengajuan Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP oleh Tim Asesor (Bogor, tanggal 13 s.d. 15 November 2023)	
42.	Diseminasi Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP dan Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP di Indonesia Bagian Tengah dan Timur (Balikpapan, tanggal 16 s.d. 18 November 2023)	
43.	Pembahasan Rancangan Draft Cetak Biru Diklat PIP Bersama Dewan Pengarah Dan Dewan Pakar BPIP (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
44.	Rapat Penilaian Tim Asesor Sertifikasi Pengajar Diklat PIP (Jakarta, tanggal 28 November 2023)	
45.	Kegiatan diseminasi pedoman sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP dan akreditasi penyelenggara Diklat PIP di Indonesia Bagian Barat (Medan, tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2023)	
46.	Evaluasi Implementasi Tim Sertifikasi dan Tim Akreditasi Tahun 2023 dan Penyusunan Rencana Kerja Tim Sertifikasi dan Tim Akreditasi Tahun 2024 (D. I. Yogyakarta, tanggal 4 s.d. 7 Desember 2023)	
47.	Koordinasi Finalisasi Pembahasan Cetak Biru Sistem Diklat PIP bersama Dewan Pengarah dan Dewan Pakar (Jakarta, tanggal 7 s.d. 9 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
48.	Rapat Koordinasi Direktorat Perencanaan, Standardisasi, Dan Kurikulum Diklat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023 (Jakarta, tanggal 11 Desember 2023)	
49.	Evaluasi Kegiatan Tahun 2023 dan Perencanaan Kegiatan Tahun 2024 Direktorat Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Batam, tanggal 12 s.d. 15 Desember 2023)	
50.	Rapat Koordinasi Lanjutan Finalisasi Pembahasan Cetak Biru Sistem Diklat PIP Bersama Pimpinan BPIP (Jakarta, tanggal 20 s.d. 21 Desember 2023)	

D.2. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP.

Indikator Keberhasilan:

Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP. Target Tahun 2023 adalah 100%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 180%. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 33. Indikator Keluaran Persentase pemanfataan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PN))	5	9	180% (NSPK)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

Tersusunnya dokumen NSPK Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa:

1. Pengembangan Juknis Diklat PIP bagi Aparatur Negara Tingkat Dasar;
2. Pengembangan Juknis Diklat PIP bagi Orsospol Tingkat Dasar;
3. Pengembangan Juknis Diklat PIP bagi Aparatur Negara Tingkat Menengah;
4. Pengembangan Juknis Diklat PIP bagi Orsospol Tingkat Menengah;
5. Juknis Diklat PIP bagi Komponen Masyarakat Lainnya;
6. Juknis Diklat PIP bagi Aparatur Negara Tingkat Utama;
7. Pengembangan Juknis Diklat PIP bagi Orsospol Tingkat Utama;
8. Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan
9. Draft Revisi Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020.

Petunjuk Teknis yang disusun tersebut adalah turunan dari Peraturan BPIP No 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mengamanatkan bahwa Peserta Diklat PIP yang terdiri atas aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, dalam standar pengelolaan juga disebutkan bahwa Diklat PIP menerapkan Diklat dengan Pola Berjenjang yaitu penyelenggaraan Diklat PIP bervariasi dan memerlukan keluwesan

sesuai dengan situasi dan kondisi yang bermuara pada ketercapaian kompetensi peserta. Diklat PIP dilakukan secara berjenjang meliputi tingkat dasar, menengah, dan utama.

Petunjuk teknis yang telah disusun tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Direktorat Perencanaan Diklat dalam penyusunan rencana dna kebijakan strategis dan teknis Diklat dan Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam pelaksanaan Diklat PIP dan Diklat bagi Pengajar Diklat PIP. Petunjuk teknis tersebut memuat cara pelaksanaan Diklat PIP sesuai sasarannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pemantauan dan evaluasi Diklat. Guna mengetahui bagaimana kebermanfaatan dokumen petunjuk teknis yang telah disusun oleh Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat, dalam beberapa kegiatan pelaksanaan Diklat, akan dimonitoring dan evaluasi menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang merupakan lampiran dari Dokumen Petunjuk Teknis Diklat PIP. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pelaksanaan Diklat PIP yang selanjutnya.

Pencapaian *output* kegiatan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat sampai dengan akhir periode tahun 2023 adalah 9 NSPK, sehingga persentase capaiannya adalah 180% dari terget *output* sebanyak 5 NSPK. Cara penghitungan capaian *output* tersebut adalah dengan membandingkan antara jumlah dokumen NSPK yang telah dihasilkan dibagi dengan target *output*.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 34. Aktivitas pemanfataan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Kurikulum Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 6 Februari 2023)	
2.	Koordinasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Malang (Malang, tanggal 15 s.d. 17 Februari 2023)	
3.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi Sosial Politik Tingkat Dasar di Jakarta (Jakarta, tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023)	
4.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara Tingkat Dasar (Jakarta, tanggal 7 s.d. 10 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Perseorangan (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Maret 2023)	
6.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Organisasi Sosial Politik Tingkat Utama (Jakarta, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023).	
7.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara Tingkat Utama (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 April 2023)	
8.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Komponen Masyarakat Lainnya (Komunitas) (Jakarta, tanggal 11 s.d. 14 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara Tingkat Menengah (Jakarta, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023)	
10.	Diseminasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP (Manado, tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023)	
11.	Evaluasi dan Pelaporan Semester I Tahun 2023 dan Perencanaan Tahun 2024 (Solo, tanggal 7 s.d. 9 Juni 2023)	
12.	Koordinasi Revisi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP (Sumatera Utara, tanggal 20 s.d. 23 Juni 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Jakarta, tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2023)	
14.	Koordinasi Pengembangan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP (Jakarta, tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2023)	
15.	“Diseminasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP" (Balikpapan, tanggal 30 Agustus s.d. 1 September 2023)	
16.	Koordinasi Awal Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP (Jakarta, tanggal 5 s.d. 8 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Koordinasi Pembahasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan PIP (Bandung, tanggal 18 s.d. 21 September 2023)	
18.	Koordinasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Subang, (Jawa Barat, tanggal 4 s.d. 6 oktober 2023)	
19.	Koordinasi Reviu Hasil Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Bandung (Jawa Barat, tanggal 11 s.d 14 Oktober 2023)	
20.	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2024 (Jakarta, tanggal 17 s.d. 20 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Diseminasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Aceh (Aceh, tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2023)	
22.	Koordinasi Finalisasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Surabaya, tanggal 30 Oktober s.d. 02 November 2023)	
23.	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 4 Pilar Kebangsaan menuju Pemilu Damai 2024 (Malang, tanggal 01 s.d. 03 November 2023)	
24.	Menghadiri Undangan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter PNS Kementerian Perhubungan Tahun 2023 Bandung (Jawa Barat tanggal 13 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 November 2023)	
26.	Menghadiri Undangan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Dosen di Lingkungan Universitas Jember di Jember (Banyuwangi, tanggal 17 s.d. 19 November 2023)	
27.	Diseminasi Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Semarang, tanggal 22 s.d. 24 November 2023)	
28.	Evaluasi dan Pelaporan Semester II Tahun 2023 Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Jakarta, tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
29.	Penyelarasan Akhir Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 Desember 2023)	

D.3. Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi

Indikator Keberhasilan:

Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi ToT). Target Tahun 2023 adalah 100% .

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 180% ((449 /250) x 100%). Selama tahun 2023 Diklat bagi Pengajar Diklat PIP dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

$$\frac{449}{250} x\ 100\% = 180\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2.35. Indikator Keluaran Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi (ToT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP (PN)	250	449	180% (Orang)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capai yang telah diperoleh tahun 2023 yaitu:

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah 100%. Hingga tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 180%, dengan uraian capaian (perhitungan) adalah dengan membandingkan antara jumlah lulusan diklat bagi pengajar yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya dengan jumlah peserta diklat yang mengikuti diklat PIP pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Direktorat Pelaksanaan Diklat telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pengajar diklat PIP sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan/ Daerah Pelaksanaan	Jumlah (orang)	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023 (%)
II.	**Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	**449**	**orang**	**250**	**180%**
1	Diklat bagi Pengajar Diklat PIP di Bandung	97	orang		
2	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pengajar PIP Jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA Tahun 2023	305	orang		
4	Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Widyaiswara dan Dosen untuk Calon Maheswara Utama	47	orang		

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 36. Aktivitas Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP yang kompetensinya meningkat

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pengajar Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 6 s.d. 9 November 2023)	
2.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pengajar PIP Jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA Tahun 2023 Batch I (Jakarta, tanggal 13 s.d. 17 November 2023)	
3.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pengajar PIP Jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA Tahun 2023 Batch II (Jakarta, tanggal 20 s.d. 24 November 2023)	
4.	Diklat Pengajar Diklat PIP Bagi Widyaiswara dan Dosen untuk Calon Maheswara Utama (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 Desember 2023)	

D.4. Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

Indikator Keberhasilan:

Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya. Target Tahun 2023 adalah 50% (1500 orang) dimana target 50 % ini mencerminka 1500 orang.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 886%, dengan uraian capaian (perhitungan) adalah sebagai berikut: jumlah peserta Diklat yang telah mengikuti serta dinyatakan lulus pada pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila selama tahun 2023 sejumlah (13.287/1.500)x100%).

$$\frac{\mathbf{13.287}}{\mathbf{1.500}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%} = \mathbf{886\%}$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PIP

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 37. Indikator Keluaran Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat	Peserta Pendidikan dan Pelatihan PIP	1500	13.287	886% (Orang)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capai yang telah diperoleh tahun 2023 yaitu:

No	Nama Kegiatan/ Daerah Pelaksanaan	Jumlah (orang)	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023 (%)
I.	**Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila**	**13.287**	**orang**	**1.500**	**886%**
1.	Diklat Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2022 di Wiladatika, Jakarta, 17-22 Juli 2023	76	orang		
2.	Diklat Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2022				
a.	Serang, Banten	147	orang		
b.	Palembang, Sumatera Selatan	266	orang		
c.	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	514	orang		
d.	Denpasar, Bali	1.430	orang		
e.	Ambon, Maluku	685	orang		
f.	Magelang, Jawa Tengah	783	orang		
g.	Jakarta, DKI Jakarta	2.431	orang		
h.	Lebak, Banten	192	orang		
i.	Banda Aceh, Aceh	97	orang		
j.	Pontianak, Kalimantan Barat	106	orang		
f.	Lahat, Sumatera Selatan	42	orang		
3.	Pembelajaran Aktif bagi Paskibraka Tahun 2023 Tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten				
a.	Surabaya, Jawa Timur	76	orang		
b.	Palu, Sulawesi Tengah	54	orang		
c.	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	351	orang		
d.	Bekasi, Jawa Barat	5.944	orang		
e.	Bandar Lampung, Lampung	30	orang		
4	Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Program Eksektutif Nasional di Jakarta	63	orang		

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 38. Aktivitas Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 Provinsi Banten (Banten, tanggal 14 s.d. 16 Maret 2023)	
2.	Workshop Sinkronisasi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023).	
3.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tahun 2022 (Palembang, tanggal 12 s.d. 14 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tahun 2022 (Bangka Belitung, tanggal 3 s.d. 5 Mei 2023).	
5.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tahun 2022 (Bali, tanggal 10 s.d. 13 Mei 2023).	
6.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Paskibraka Tahun 2022 (Ambon, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023).	
7.	Reviu Rancangan Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	DKT Penyusunan Kebijakan Teknis dan Program Strategis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023)	
9.	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan Berkarakter Pancasila Tahun 2023 (Palu, tanggal 7 s.d. 9 Juli 2023)	
10.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2023 (Cibubur, tanggal 17 s.d. 22 Juli 2023)	
11.	DKT Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Cibubur, tanggal 20 s.d. 22 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Evaluasi dan Monitoring Pemusatan Diklat PIP bagi Paskibraka Tahun 2023, (Surabaya, tanggal 5 s.d. 7 Agustus 2023)	
13.	Evaluasi dan Monitoring Pemusatan Diklat PIP bagi Paskibraka Tahun 2023 (Palu, tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2023)	
14.	Pembelajaran Aktif bagi Calon Paskibraka TA 2023 Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia (Bekasi, tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2023)	
15.	Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Program Eksekutif Nasional (Jakarta, tanggal 28 s.d. 29 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Tahun 2023 (Kalimantan Tengah, tanggal 4 s.d. 6 September 2023)	
17.	Penyusunan Modul PIP dan Materi PIP-PEN (Jakarta, tanggal 7 s.d. 9 September 2023)	
18.	Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Program Eksekutif Nasional (Jakarta, tanggal 10 s.d. 14 September 2023)	
19.	DKT Penyusunan Grand Design Model Pembelajaran Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
20.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Paskibraka Daerah Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur Tahun 2022 (Magelang, tanggal 11 s.d. 14 Oktober 2023)	
21.	Koordinasi Pelaksanaan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pegawai di Lingkungan BPIP (Bandung, tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023)	
22.	Pelaksanaan Pembekalan PIP Bagi Purna Paskibraka Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Indonesia Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 10 s.d. 12 November 2023)	
23.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Laporan Kinerja (Jakarta, 29 November s.d. 2 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Diklat Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, serta Tahun 2022 dan Sebelumnya Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Lebak (Banten, tanggal 6 s.d. 9 Desember 2023)	
25.	Diklat Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, serta Tahun 2022 dan Sebelumnya Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Banda Aceh (Aceh, 11 s.d. 14 Desember 2023)	
26.	Diklat Pembelajaran Aktif Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023, serta Tahun 2022 dan Sebelumnya Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Pontianak, (Kalimantan Barat, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023)	

F. Pengendalian dan Evaluasi PIP

PIP bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pelaksanaan PIP sesuai dengan standar kebijakan dan nilai-nilai Pancasila maka diperlukan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan kebijakan PIP, implementasi kebijakan PIP, aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarkat. dan pencegahan tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila.

Ukuran keberhasilan Sasaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi PIP adalah:

Tabel 2. 39. Indikator Keluaran Program Terlaksananya Pengendalian Dan Evaluasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KINERJA
Persentase Rekomendasi Pendalian PIP yang dimanfaatkan	100%	98,12%	98,12%
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	100%	100%	100%

Realisasi capaian kinerja program tersebut diperoleh dan dicapai sebagai berikut :

E.1.Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2023 adalah 100%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 98,12% rata-rata capaian indikator.

$$\frac{100\% + 96{,}25\%}{2} = 98{,}12\%$$

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan:

a. Terlaksananya Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila

b. Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Purna Paskibraka

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 40. Indikator Keluaran Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP	1	1	100% (Rekomendasi)
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Fasilitasi Pembinaan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila (PN)	6500	6256	96,25% (Orang)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

a. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila akan terdiri dari 3 (tiga) klaster yaitu Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan. Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Pengkajian Materi dan Pendidikan dan Pelatihan.

Saat ini pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila sudah selesai dan menghasilkan Dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Program Teknis Pembinaan

Ideologi Pancasila dan Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dimana prosesnya jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Berikut adalah beberapa hasil dari rekomendasi:

1. Diperlukan *Grand Design*, Pendidikan Formal yang mencakup leveling Diklat, Legalitas Pengajar, Sertifikasi dan Akreditasi;
2. Diperlukan kerja sama utamanya dengan Kemendikbud terkait database Pengajar Pancasila yang lengkap dan akurat untuk mempermudah pelaksanaan PIP di Seluruh Indonesia;
3. Diperlukan adanya Aktualisasi terkait Ekosistem Pancasila di Masyarakat. Aktualisasi tersebut dapat disisipkan melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik di Universitas;
4. Diperlukan adanya Sertifikasi Pengajar bagi Pegawai di internal BPIP sebagai legalitas dalam memberikan materi Pancasila di Masyarakat;
5. Diperlukan Pembinaan Ideologi Pancasila lebih lanjut serta pengawasan terhadap Sekolah Internasional yang berada di Indonesia;
6. Mempersiapkan peningkatan kualitas generasi muda dengan membangun transformasi digital, menyiapkan generasi muda yang memiliki kecakapan dan mampu berpikir maju memanfaatkan teknologi informasi dan platform media sosial;
7. Menyiapkan skema penthahelix, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat atau komunitas, dan media, bergotong royong dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menanggulang perilaku intoleran dan radikalisme;
8. Pemerintah terutama BPIP perlu membuka ruang dialog publik atau musyawarah antar tokoh agama, tokoh nasionalis, kelompok radikal dan kelompok budayawan dalam rangka memetakan permasalahan dan menjembatani pemikiran- pemikian setiap kelompok agar menemukan titik temu dan solusi;

9. Memperpersiapkan peningkatan kualitas generasi muda dengan pendidikan, keterampilan dan karakter dengan penekanan pentingnya aspek penanaman nilai-nilai Pancasila dan moralitas, Generasi muda Indonesia yang maju adalah generasi muda yang memiliki moral, karakter, kapasitas, inovasi, kreativitas, mandiri, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia;
10. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki kecakapan dan mampu berpikir maju memanfaatkan teknologi;
11. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus sering diadakan dari sekolah ke sekolah secara konsisten dan berkelanjutan terutama ke daerah-daerah yang belum pernah di jamah oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal tersebut agar kehadiran BPIP bisa dirasakan oleh seluruh pelajar yang merupakan kader-kader pemimpin bangsa Indonesia yang harus dibina dan dikuatkan Ideologi Pancasila untuk dilestarikan.
12. Menggali kebudayaan daerah yang mengandung nilai-nilai Pancasila untuk bisa dikolaborasikan dalam bentuk seni dan tari tradisional yang bisa dimodifikasi menyesuaikan perkembangan jaman. Hal tersebut agar mudah dicerna dan dilestarikan oleh para pemuda sebagai kader-kader pemimpin bangsa Indonesia. Harus secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan event-event untuk mempromosikannya agar bisa dilihat oleh masyarakat dan wisatawan mancanegara;
13. Melalui ekosistem Pancasila dapat dilakukan pendekatan pembelajaran kearifan lokal permainan dan tari tradisional Indonesia. Melalui sebuah ekosistem dapat dilakukan proses koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam upaya sosialisasi, internalisasi, serta institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dan budaya gotong royong. Pembumian Pancasila khususnya kepada generasi muda diperlukan strategi kekinian, yang digemari oleh generasi muda.

b. Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila

Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila pada adalah 6256 Purnapaskibraka Duta Pancasila (PDP). Sehingga capaian hingga adalah 96,25%

$$\frac{6256}{6500} x\ 100\% = 96{,}25\%$$

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka kegiatan pengendalian pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 41. Kegiatan Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Program Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 14 Januari 2023).	
2.	Rapat Lanjutan Persiapan Pelaksanaan Program Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 18 s.d. 21 Januari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Penerapan Nilai-Nilai Pancasila melalui Olahraga dan Senam Kreasi di Kalangan Purnapaskibraka Indonesia (Jakarta, tanggal 21 s.d 22 Januari 2023).	
4.	Rapat Persiapan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Program Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 24 s.d 27 Januari 2023)	
5.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Angkatan Sebelum Tahun 2021 (Jakarta, tanggal 27 Januari 2023)	
6.	Koordinasi terkait Program Paskibraka dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat (Bandung, tanggal 2 s.d 4 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Koordinasi terkait Metode Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Kearifan Lokal (Bandung, tanggal 2 s.d 4 Februari).	
8.	Sosialisasi Program Paskibraka dan Uji Coba Aplikasi Transparansi Paskibraka (Tangerang, tanggal 3 s.d. 5 Februari 2023).	
9.	Rapat Persiapan Rakor Program Paskibraka (Jakarta, tanggal 6 Februari 2023).	
10.	Rapat Persiapan Program Paskibraka Tahun 2023 dan Formasi Upacara 1 Juni 2023 (Jakarta, tanggal 8 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Rapat Koordinasi Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Jakarta, tanggal 8 s.d. 11 Februari 2023)	
12.	Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penanaman nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan sikap toleransi generasi muda di Kabupaten Bangka Selatan (Bangka Selatan, tanggal 8 s.d. 11 Maret 2023)	
13.	PIP pada Rekrutmen dan Seleksi Program Paskibraka Kota Tanjungbalai (Tanjungbalai, tanggal 20 s.d. 22 Maret 2023)	
14.	Persiapan Kegiatan Peningkatan Peran Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Angkatan Tahun 2021 (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Peningkatan Peran Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat Tahun 2021 (Cibubur, tanggal 1 s.d. 5 Maret 2023)	
16.	FGD Pengembangan Metode Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Festival Permainan Tradisional: Pancamain Indonesia dengan tema Toba Kaldera Pancamain Indonesia Festival 2023 (Toba, tanggal 7 s.d. 11 Maret 2023)	
17.	Pembinaan Ideologi Pancasila pada Siswa di Labscool Cibubur dalam rangka"*Nasional Is Me*" (Cibubur, tanggal 11 Maret 2023)	
18.	Bimbingan Teknis Kepamongan dan Penyelenggara Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Jakarta, tanggal 19 Maret s.d. 22 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Pendampingan Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 11 s.d. 19 Maret 2023)	
20.	Pengendalian Pembinaan ideologi Pancasila melalui Pemberitaan Media mengenai Program Paskibraka (Jakarta, tanggal 30 Maret)	
21.	Monitoring Seleksi Calon Paskibraka Provinsi Papua (Papua, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023)	
22.	Rapat penyusunan metode pemberdayaan Purnapaskibraka Duta Pancasila (Jakarta, tanggal 4 April 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
23.	Rapat Pengendalian dan Persiapan Monitoring Dan Evaluasi Rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Dan Provinsi Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 April 2023).	
24.	Rapat Persiapan Pembinaan dan Pelatihan (Jakarta, tanggal 17 s.d 18 April 2023).	
25.	PIP kepada Paskibraka Kabupaten Dharmasraya (Jakarta, tanggal 2 Mei 2023)	
26.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau, tanggal 2 s.d. 5 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (Medan, tanggal 2 s.d. 4 Mei 2023)	
28.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 2 s.d. 6 Mei 2023).	
29.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya, tanggal 8 s.d. 12 Mei 2023).	
30.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak, tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sumatera Barat (Padang, tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023)	
32.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Maluku (Ambon, tanggal 9 s.d. 12 Mei 2023)	
33.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi NTB (Lombok, tanggal 9 s.d. 13 Mei 2023)	
34.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin, tanggal 10 s.d. 12 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
35.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023)	
36.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Aceh (Aceh, tanggal 11 s.d. 16 Mei 2023)	
37.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah (Palu, tanggal 12 s.d. 17 Mei 2023)	
38.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari, tanggal 12 s.d. 17 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
39.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Jambi (Jambi, tanggal 14 s.d. 17 Mei 2023)	
40.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Maluku Utara (Maluku Utara, tanggal 14 s.d. 17 Mei 2023)	
41.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Bali Tahun 2023 (Denpasar, tanggal 14 s.d. 18 Mei 2023)	
42.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Jawa Barat (Bandung, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
43.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Gorontalo (Gorontalo, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023)	
44.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Jawa Tengah (Semarang, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023)	
45.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Bengkulu (Bengkulu, tanggal 15 s.d. 18 Mei 2023)	
46.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, tanggal 15 s.d. 18 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
47.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Lampung (Lampung, tanggal 15 s.d. 19 Mei 2023)	
48.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Papua Barat (Manokwari, tanggal 15 s.d. 20 Mei 2023)	
49.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda, tanggal 16 s.d. 19 Mei 2023)	
50.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara (Manado, tanggal 16 s.d. 21 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
51.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan (Palembang, tanggal 19 s.d. 23 Mei 2023)	
52.	Rapat Lanjutan Pengendalian PIP Pada Program Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Mei 2023)	
53.	Pengendalian PIP dan Program Paskibraka di Provinsi Jawa Timur (Surabaya, tanggal 21 s.d. 25 Mei 2023)	
54.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi NTT (Kupang, tanggal 22 s.d. 24 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
55.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Banten (Serang, tanggal 22 s.d. 25 Mei 2023)	
56.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Bangka Belitung (Pangkal Pinang, tanggal 22 s.d. 26 Mei 2023)	
57.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju, tanggal 23 s.d. 25 Mei 2023)	
58.	Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Paskibraka Provinsi Riau (Pekanbaru, tanggal 26 s.d. 29 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
59.	Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 23 Mei s.d. 3 Juni 2023)	
60.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Pusat dan Provinsi DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 1 Juni 2023)	
61.	Diskusi Penyusunan Modul Dan Standar Penilaian Untuk Purnapaskibraka Duta Pancasila (Jakarta, tanggal 13 Juni 2023)	
62.	PIP Pada Program Paskibraka Provinsi Papua Selatan (Marauke, tanggal 20 s.d. 24 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
63.	Rapat Sosialisasi Pemusatan Diklat Paskibraka Berdasarkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Penyusunan Juknis Pemusatan Diklat Paskibraka (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023).	
64.	Peninjauan Taman Rekreasi Wiladatika guna Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Depok, tanggal 7 Juli 2023).	
65.	Kegiatan Persiapan Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Bekasi, tanggal 10 s.d 12 Juli 2023).	
66.	Kegiatan Rapat Lanjutan Persiapan Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Depok, tanggal 13 s.d 14 Juli 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
67.	Pelaksanaan Bimtek Kepamongan Pemusatan Diklat Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Depok, tanggal 14 Juli 2023)	
68.	Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Cibubur, tanggal 15 Juli s.d. 23 Agustus 2023)	
69.	Pelaksanaan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Permainan Rakyat Pancamain Indonesia pada Hari Anak Nasional Tahun 2023 (Semarang, tanggal 23 Juli 2023).	
70.	Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 15 Agustus 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
71.	Pengibaran Bendera Pusaka Pada Peringatan HUT RI ke-78 RI (Jakarta, tanggal 17 Agustus 2023).	
72.	PI Kreasi Aktualisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dari Paskibraka untuk Indonesia P Pada Program Paskibraka Provinsi Sumatera Barat (Jakarta, tanggal 18 Agustus 2023).	
73.	Kunjungan Paskibraka ke K/L dan BUMN (Jakarta, tanggal 18 s.d. 22 Agustus 2023)	
74.	Penutupan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 22 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
75.	Pengantaran Kepulangan Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2023 (38 Provinsi, tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2023)	
76.	Rapat Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Program Paskibraka di Daerah dan Pembentukan DPPI di Daerah (Jakarta, tanggal 4 s.d. 5 September 2023)	
77.	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Paskibraka Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 8 September 2023)	
78.	Pembekalan PIP Paskibraka Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 13 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
79.	Pembekalan PIP Paskibraka Kota Palu Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 15 September 2023)	
80.	Diskusi Kelompok Terpumpun pengendalian aktualisasi demokrasi pancasila di kalangan generasi muda dengan tema “Peningkatan Peran PDP dalam Institusionalisasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024” (Bontang, tanggal 19 s.d. 21 September 2023)	
81.	Kegiatan Kemah Pancasila dengan Tema "Mewujudkan Pelajar Pancasila untuk Menanamkan Ideologi dalam Membangun Indonesia Maju“ di Kota Serang (Banten, tanggal 14 s.d. 17 September 2023)	
82.	Kegiatan Usulan Langkah Dan Strategi Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Menunjang Kehidupan Masyarakat Pesisir Melalui Gerakan Paskibraka Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kota Sabang (Aceh, tanggal 25 s.d. 28 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
83.	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Literasi Digital bagi Kalangan Pelajar di Kota Padang (Padang, tanggal 27 s.d. 30 September 2023)	
84.	Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Ekonomi Pancasila Dengan Tema "Gerakan Paskibraka Dalam Peningkatan UMKM" (Jawa Tengah, tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023)	
85.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Paskibraka Kota Denpasar, Kota Pangkalpinang, dan Kota Palembang Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 18 Oktober 2023)	
86.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Paskibraka Kabupaten Poso Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 30 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
87.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengendalian Aktualisasi Demokrasi Pancasila di Kalangan Generasi Muda dengan tema "Peningkatan Peran PDP dalam Institusionalisasi Demokrasi Pancasila dalam Pemilu Raya 2024" (Kalimantan Selatan, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023)	
88.	Pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Paskibraka Kota Bukit Tinggi Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 6 November 2023)	
89.	Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan pada Generasi Muda (Jakarta, tanggal 10 November 2023)	
90.	Kegiatan Penguatan Peran Paskibraka Putri dalam Membangun Perempuan Berdaya, Tangguh, dan Menginspirasi dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 14 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
91.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Se-Provinsi DIY Tahun 2022 (Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 s.d. 15 November 2023)	
92.	Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Program Paskibraka: Evaluasi Pelaksanaan Program Paskibraka Tahun 2023 (Bali, tanggal 14 s.d. 18 November 2023)	
93.	Pengendalian Aktualisasi Pancasila melalui Peran Paskibraka dalam Gerakan Bersih Pantai Guna Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Kepulauan Riau (Kepulauan Riau, tanggal 21 s.d. 24 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
94.	Pembekalan PIP kepada Paskibraka Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Tahun 2023 dan Rapat Persiapan Pengangkatan DPPI Daerah (Jakarta, tanggal 22 November 2023)	
95.	Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Pengendalian PIP dengan tema Membangun Karakter Generasi Pancasila Melalui Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 s.d. 30 November 2023)	
96.	Diskusi Kelompok Terpumpun pengendalian aktualisasi Demokrasi Pancasila di Kalangan Generasi Muda dengan tema “Peningkatan Peran PDP dalam Institusionalisasi Demokrasi Pancasila dalam Pemilu Raya 2024” dan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Kota Kendari (Sulawesi Tenggara, tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
97.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tingkat Kota Magelang Tahun 2023 dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Tema Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Ruang Digital (Jawa Tengah, tanggal 3 s.d. 6 Desember 2023)	
98.	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun 2022 dan Peningkatan Kompetensi Purnapaskibraka Duta Pancasila Dengan Tema "Pengenalan Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2024" (Sulawesi Tengah, tanggal 12 s.d. 15 Desember 2023)	
99.	Istana Bermain dengan Tema "Cinta Permainan dan Olah Raga Tradisional Indonesia"(Jakarta, tanggal 15 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
100.	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam Rangka Hari Nusantara 2023 (Jakarta, tanggal 16 Desember 2023)	
101.	PIP dan Pengenalan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa Pada Paskibraka di Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023 (Jawa Tengah, tanggal 12 s.d. 16 Desember 2023)	
102.	Pengendalian Aktualisasi Pancasila melalui Gerakan Paskibraka dalam Pembumian Nilai-Nilai Pancasila dan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Jawa Timur, tanggal 19 s.d. 22 Desember 2023)	

E.2. Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan.

Indikator Keberhasilan:

Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan. Target Tahun 2023 adalah 100%.

Pada Tahun 2023 capaian target tersebut adalah sebesar 100% ((100%+100%+100%+100%+100%)/5)x100%) rata-rata capaian indikator.

Capaian IKU sasaran program tersebut didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Evaluasi PIP.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 42. Indikator Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksananaan PIP yang ditindaklanjuti	Rekomendasi Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila	1	100%	- Pembahasan Data Variabel 1 Infrastruktur Hukum Daerah, Indikator 1: RPJMND, Indikator 2: Regulasi Daerah. - Pembahasan Data Variabel 2 Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator 3: Program Kerja, Indikator 4: Alokasi Anggaran, Indikator 5: Pernyataan Publik Pejabat Pemerintah Daerah. - Pembahasan Data Variabel 3 Aktualisasi Masyarakat,

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
				Indikator 6: Ruang Perjumpaan Masyarakat.
	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PIP	1	100%	- Pengkajian ulang instrument evaluasi pelaksanaan PIP bersama beberapa pakar. - Evaluasi kelompok sasaran kebijakan pada program Paskibraka di Banyuasin, Sumatera Selatan.
	Rekomendasi hasil evaluasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang terindikasi menentang Ideologi Negara **(PN)**	1	100%	- Penyusunan instrument evaluasi. - Pelaksanaan pilot survei instrument evaluasi di 6 (enam) kota Padang, Makassar, Bima, Singkawang, Yogyakarta, dan Jayapura - Analisis data pilot survey. - Pelaksanaan survei terhadap unsur-unsur yang menentang Ideologi Negara di 7 (tujuh) kota Denpasar, Surabaya, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, Manado dan Jakarta.
	Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan negara dan ASN yang terindikasi	1	100%	- Penyusunan instrument evaluasi. - Pelaksanaan pilot survei instrument

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
	menentang Ideologi Negara **(PN)**			evaluasi di 6 (enam) kota Padang, Makassar, Bima, Singkawang, Yogyakarta, dan Jayapura - Analisis data pilot survey. - Pelaksanaan survei terhadap unsur-unsur yang menentang Ideologi Negara di 7 (tujuh) kota Denpasar, Surabaya, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, Manado dan Jakarta.
	Rekomendasi hasil evaluasi Ormas, organisasi dan perusahaan asing, serta media yang menentang Ideologi Negara **(PN)**	1	100%	- Penyusunan instrument evaluasi. - Pelaksanaan pilot survei instrument evaluasi di 6 (enam) kota Padang, Makassar, Bima, Singkawang, Yogyakarta, dan Jayapura - Analisis data pilot survey. - Pelaksanaan survei terhadap unsur-unsur yang menentang Ideologi Negara di 7 (tujuh) kota Denpasar, Surabaya, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, Manado dan Jakarta

Dari tabel diatas dapat disimpulkan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2023 yaitu:

a. Persentase rekomendasi evaluasi Pelaksananaan PIP yang ditindaklanjuti

Dalam tahapannya rekomendasi evaluasi pelaksanaan PIP yang ditindaklanjuti sudah mencapai 100%. Rekomendasi yang sudah diselesaikan yakni:

1) Dokumen Hasil Pengukuran Pelembagaan Pancasila;
2) Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3) Dokumen Hasil Evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terindikasi menentang Ideologi Negara; dengan rekomendasi:
   a. Rekomendasi untuk Institusi yang bertugas mengeluarkan kebijakan, regulasi dan pelaksanaan pengembangan Pendidik, Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik

Rekomendasi Lingkungan Pendidikan	
1	Memastikan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional.
2	Pembinaan dan pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan pembentukan karakter peserta didik .
3	Melakukan pelatihan bagi guru-guru baru Pendidikan Pancasila
4	Penetapan standar kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	Menyediakan instrumen rekrutmen yang dapat menilai keyakinan dan pemahaman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penerimaan Pendidik/Tenaga Pendidikan yang baru.
6	Penetapan sistem merit yang memasukkan keyakinan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai indikator utama dalam jenjang karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7	Terkhusus untuk aspek kerohanian, perlu fasilitasi kebutuhan kerohanian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Dinas/Sekolah secara adil melalui penyediaan sarana dan prasarana
8	Penyediaan ruang-ruang perjumpaan dalam konteks keagamaan antar Pendidik/Tenaga Kependidikan serta antar Peserta Didik sehingga terbangun toleransi beragama yang pada akhirnya akan tercipta inklusi sosial yang tinggi antar Pendidik/Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik yang berbeda agama.
9	Dorongan terhadap gerakan-gerakan kebajikan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersifat inspiratif dan inovatif

Rekomendasi Lingkungan Pendidikan	
10	Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi maupun organisasi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
11	Pemantauan aktivitas keagamaan untuk mengantisipasi dan pencegahan sejak awal aktivitas yang berpotensi menyimpang.

b. Rekomendasi untuk Lembaga yang mengeluarkan kebijakan, regulasi dan pelaksana pembinaan Ideologi Pancasila

Rekomendasi Lingkungan Pendidikan	
1	Dalam arah kebijakannya, BPIP perlu memasukkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang menyangkut pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pendidikan Pancasila.
2	Penguatan penyusunan materi dan bahan ajar Pendidikan Pancasila maupun materi Diklat PIP kepada Pendidik dengan prioritas pada poin kritikal.
3	Penguatan penyusunan materi dan bahan ajar Pendidikan Pancasila maupun materi Diklat PIP kepada Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik
4	BPIP menyiapkan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan, regulasi dan penyelenggaraan negara/pemerintahan
5	BPIP menyiapkan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi Pendidikan Pancasila kepada Peserta Didik dengan indikator institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan, regulasi dan penyelenggaraan negara/pemerintahan

4) Dokumen Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menentang Ideologi Negara;

a. Rekomendasi untuk Lembaga yang mengeluarkan kebijakan, regulasi dan pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP dan Kementerian Dalam Negeri)

Rekomendasi ASN	
1	Dalam arah kebijakannya, BPIP perlu menekankan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang menyangkut Penyelenggara Negara dan ASN di Lembaga Negara, KL dan Pemerintah Daerah.

Rekomendasi ASN	
2	BPIP Menyiapkan instrumen penilaian keberhasilan pembinaan aparat Negara/Pemerintahan dengan indikator institusionalisasi nilai Pancasila dalam kebijakan, regulasi dan penyelenggaraan negara/pemerintahan di bidang pembinaan aparat negara/pemerintahan; dan indikator lainnya adalah aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan birokrasi.
3	BPIP menjadi pionir dalam gerakan keteladanan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam dimensi-dimensi kritis di atas.

b. Rekomendasi untuk Institusi yang bertugas mengeluarkan kebijakan, regulasi dan pelaksanaan pengembangan Aparatur (KEMENPANRB, BKN, LAN, dan BPSDM)

Rekomendasi ASN	
1	Penyusunan kebijakan pengembangan Aparatur yang ditekankan pada penanaman nilai Pancasila sehingga timbul keyakinan yang penuh bahwa nilai Pancasila adalah nilai yang paling tepat untuk Indonesia. perlu menebalkan aspek ideologis.
2	Lembaga Administrasi Negara menyediakan kurikulum pelatihan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai Pancasila kepada peserta pelatihan.
3	Mendorong peserta pelatihan untuk melakukan proyek perubahan yang dilandaskan dengan isu-isu kritikal.
4	Penetapan standar kompetensi yang diprioritaskan pada pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila serta aktualisasinya dalam profesi serta secara umum dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
5	BPSDM menyediakan kurikulum pelatihan yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai Pancasila kepada peserta pelatihan dan bila perlu ada kompetensi khusus untuk aparatur yang bekerja di OPD Pembinaan Ideologi Pancasila.
6	Dalam konteks kedaerahan, pengembangan Aparatur di Daerah perlu menekan tentang wawasan nusantara.
7	Menyediakan instrumen rekrutmen yang dapat menilai keyakinan dan pemahaman pada nilai-nilai Pancasila.
8	Penetapan sistem merit yang memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai indikator utama
9	Terkhusus untuk aspek kerohanian, perlu fasilitasi kebutuhan kerohanian ASN secara adil melalui penyediaan sarana dan prasarana termasuk penyediaan pembina rohan internal tetap.
10	Bila kita memperhatikan fenomena penggunaan media sosial dalam penyebarluasan agama, telah lahir ulama-ulama populer yang banyak dijadikan role-model oleh pengikutnya.
11	Ruang-ruang perjumpaan dalam konteks keagamaan antar Penyelenggara Negara dan ASN

Rekomendasi ASN	
12	Kerjasama dengan organisasi profesi maupun organisasi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan aparatur.
13	Pemantauan aktivitas keagamaan untuk mengantisipasi dan pencegahan sejak awal aktivitas yang berpotensi menyimpang
14	Gerakan-gerakan kebajikan oleh aparatur yang bersifat inspiratif dan inovatif

5) Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi Masyarakat, Organisasi; dan Perusahaan Asing, serta Media yang menentang Ideologi Negara.

a. Rekomendasi Ormas

Rekomendasi Ormas	
1	Dalam arah kebijakannya, BPIP perlu memasukkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang menyangkut pembinaan Organisasi Kemasyakatan.
2	Melakukan pemetaaan ormas di seluruh Indonesia berdasarkan berbagai kriteria penting.
3	Menetapkan skala prioritas ormas yang memerlukan PIP.
4	Menyusun program pembinaan Pancasila dengan metode yang kreatif dan menyesuaikan dengan jenis organisasinya.
5	Penguatan penyusunan materi dan bahan ajar Pendidikan Pancasila maupun materi Diklat PIP kepada Pendidik dengan prioritas pada poinkemampuan memaknai ajaran agama secara kontekstual, toleransi beragama, penghargaan terhadap keberagaman etnis, penghormatan terhadap kesetaraan, wawasan nusantara, penghargaan terhadap karya anak bangsa dan pengaruh ideologi khilafah, kerjasama dalam melawan ideologi radikal, keengganan bermusyawarah, serta kesetiakawanan sosial.
6	Melakukan gerakan-gerakan kebajikan dengan basis ormas atau komunitas dengan tema-tema strategis seperti revolusi mental, inklusi sosial, gerakan koperasi, pemilu damai, gerakan penurunan stunting sertapenghargaan pada seni dan budaya lokal.
7	Melibatkan figur-figur teladan maupuntokoh-tokoh populer dalam PIP kepada Ormas baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokohwanita, Ikon Pancasila dan Insan Pancasila

b. Rekomendasi SPK

Rekomendasi SPK	
1	Perlumemastikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila segera diimplementasikan kepada seluruh SPK di Indonesia, termasuk penyediaan BTU dan penyiapan guru-guru matapelajaran Pendidikan Pancasila
2	Penguatan penyusunan materi dan bahan ajar Pendidikan Pancasila maupun materi Diklat PIP kepada siswa-siswi di SPK,

Rekomendasi SPK	
	khususnya terkaittoleransi beragama, penghargaan terhadap keberagaman etnis dan kemajemukan, saling menghargai antar umat manusia, penghargaan terhadap karya bangsa sendiri, bela negara, nasionalisme, wawasan nusantara, keengganan bermusyawarah, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap hidup boros, kurangnya kesetiakawasanan sosial.
3	Mengintegrasikan program-program terkait Pancasila di sekolah seperti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
4	Menggelorakan perayaaan-perayaan hari besar Nasional di lingkungan sekolah dengan melibatkan partisipasi kreatif dari pelajar untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme.
5	Menciptakan ruang-ruang perjumpaan antar sekolah yang akanmendorong inklusi sosial sejak dini.
6	Bersama BPIP melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Pendidikan Pancasila di seluruh SPK.

c. Rekomendasi Media

Rekomendasi Media	
1	Media perlu ditempatkan sebagai Mitra strategis dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk itu perlu dibangun kolaborasi yang strategis, baik kepada media maintream maupun media sosial. Kolaborasi ini secara otomatis akan menempatkan Media sebagai duta-duta Pancasila yang akan berperan aktif mencegah perpecahan NKRI, suatu ancaman yang selama ini kerap disebabkan oleh berita-berita yang dihasilkan oleh Media. BPIP perlu memberikan sumberdaya yang mencukupi untuk mendukung kolaborasi dengan Media.
2	Aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan dan operasional media massa dan teknologi media yang ada saat ini sudah cukup memadai. Namun demikian regulasi tersebut belum mencakup media sosial, padahal penggunaan media sosial dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun hampir tanpa pembatasan. Regulasi media diarahkan tidak hanya untuk pengaturan hal-hal teknis namun memberi edukasi tentang nilai-nilai etika dalam memanfaatkan media.
3	BPIP membangun program yang melibatkan Media secara masif dan berkesinambungan. Media dapat menjadi corong yang efektif dalam melakukan sosialisasi. Dengan melakukan kerjasama dan sepakat atas program/kegiatan yang terencana, maka agenda PIP dapat dikomunikasi dengan efektif kepada masyarakat. Selain itu, BPIP juga dapat merespon isu-isu penting yang sedang berkembang dengan menggunakan kekuatan Media. Kolaborasi yang sporadis akan kurang efektif dalam membentuk kesadaraan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila karena penyampaikan informasi yang terpotong-potong.

Aktivitas dan kilas peristiwa dalam rangka capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 43. Aktivitas Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Paskibraka Dengan Lemhannas RI (Jakarta, tanggal 9 Januari 2023).	
2.	Rapat Penyiapan Bahan Laporan Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 9 Januari 2023)	
3.	Rapat Perbaikan Laporan RPJMN 2022 (Jakarta, tanggal 10 Januari 2023)	
4.	Rapat Pembahasan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 dan Tahun 2023 Bidang Polhukam (Jakarta, tanggal 6 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Pelaksanaan Evaluasi PIP pada Generasi Muda di Kabupaten Bangka Selatan (Bangka selatan, tanggal 13 Februari 2023)	
6.	Koordinasi Persiapan Evaluasi PIP di Lingkungan ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Singkawang, tanggal 21 s.d. 23 Februari 2023	
7.	Rapat Penyusunan Draft Laporan Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RPJMN (Sukuharjo, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2023)	
8.	Rapat Pedoman Evaluasi PIP (Jakarta, tanggal 28 Februari s.d. 1 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Singkawang, tanggal 15 Maret 2023)	
10.	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan ASN (Singkawang, tanggal 16 Maret 2023)	
11.	Penajaman Instrumen Pengukuran Evaluasi terhadap Hal-Hal yang Bertentangan dengan Pancasila (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 April 2023).	
12.	Rapat Penajaman Instrumen Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 s.d. 6 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Rapat Konsolidasi Kurikulum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Jakarta, tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023)	
14.	Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksananaan PIP yang ditindaklanjuti (Bekasi, tanggal 6 s.d. 7 Juni 2023)	
15.	Rapat Lanjutan Penyusunan Pedoman dan Metode Pelaksanaan Evaluasi PIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 13 Juni 2023)	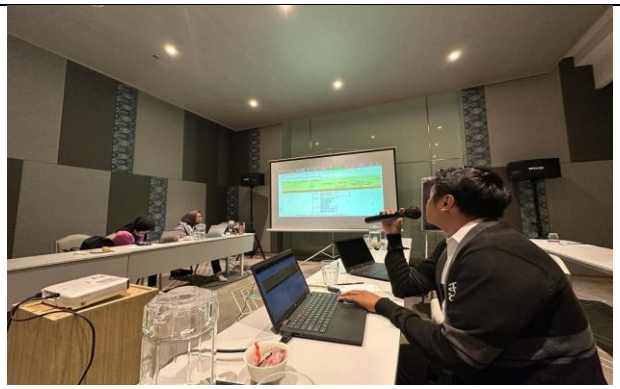
16.	Rapat Penajaman Instrumen Pengukuran Evaluasi terhadap Hal-Hal yang Bertentangan dengan Pancasila III (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan *Pilot Study* Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Pancasila (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023)	
18.	Pembekalan *Pilot Study* dalam rangka Evaluasi Hal-Hal yang Bertentangan dengan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 3 Juli 2023).	
19.	Evaluasi kelompok sasaran kebijakan pada program Paskibraka dan menghadiri undangan Presiden pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 Tahun 2023 (Banyuasin, tanggal 4 s.d. 7 Juli 2023)	
20.	Pelaksanaan *Pilot Study* dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Padang (Jakarta, tanggal 10 s.d. 13 Juli 2023))	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Pelaksanaan Pilot Study dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Singkawang (Kalimantan Barat, tanggal 17 s.d. 20 Juli 2023)	
22.	Pelaksanaan *Pilot Study* dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Bima (Nusa Tenggara Barat, tanggal 17 s.d. 20 Juli 2023)	
23.	Pelaksanaan *Pilot Study* dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Jayapura (Papua, tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023)	
24.	Pelaksanaan *Pilot Study* dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Makasar (Sulawesi Selatan, tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Pelaksanaan *Pilot Study* dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kota Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023)	
26.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pengembangan Kerangka Metodologi Indikator Inklusi Sosial Kabupaten (Jakarta, tanggal 31 Juli s.d. Agustus 2023)	
27.	Pengukuran Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kota Medan (Sumatera Utara, tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2023)	
28.	Pematangan Kerangka Metodologis Indeks Inklusi Sosial Indonesia (Daring Utara, tanggal 11 Agustus 2023)	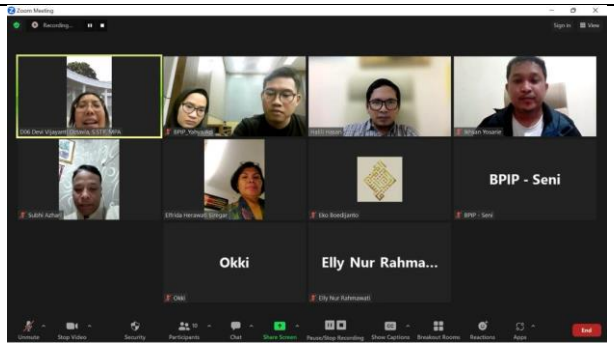

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
29.	Pengolahan Serta Interpretasi Data Pilot Survei (Sumatera Utara, tanggal 4 s.d. 6 September 2023)	
30.	Rapat Pembahasan Data Variabel Infrastruktur Hukum Daerah, Indikator 1 : RPJMD (Daring, tanggal 4 s.d. 6 September 2023)	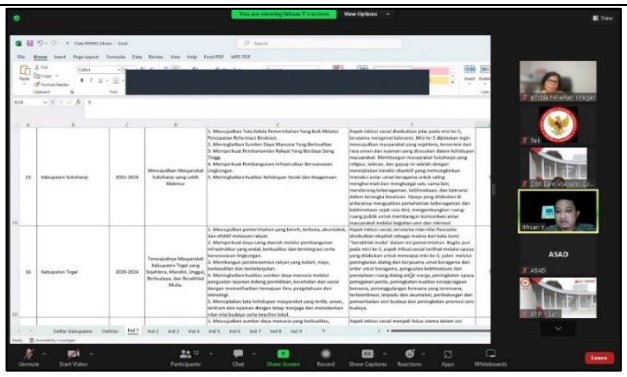
31.	Pengukuran Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kota Surabaya (Surabaya, tanggal 11 s.d. 13 September 2023)	
32.	Pengukuran Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan, tanggal 11 s.d. 13 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
33.	Pengukuran Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kota Bandar Lampung (Lampung, tanggal 13 s.d. 15 September 2023)	
34.	Pengukuran Nilai-Nilai Kehidupan Sosial Bermasyarakat di Kota Denpasar (Bali, tanggal 14 s.d. 16 September 2023)	
35.	Evaluasi Hal-Hal yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Jakarta (Jakarta, tanggal 5 Oktober 2023)	
36.	Rapat Finalisasi Instrumen Evaluasi Implementasi Program Paskibraka dan Persiapan Pengambilan Data (Jakarta, tanggal 16 s.d 17 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Diskusi Kelompok Tepumpun dalam rangka Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Jakarta, tanggal 25 s.d. 27 Oktober 2023)	
38.	Lanjutan Diskusi Kelompok Tepumpun dalam rangka Pengukuran Pelembagaan Pancasila (Yogyakarta, tanggal 8 s.d. 11 November 2023)	
39.	Evaluasi Pelaksanaan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tahun 2023 dan menghadiri kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan PIP Pada Program Paskibraka: Evaluasi Pelaksanaan Program Paskibraka Tahun 2023 (Bali, 14 s.d. 18 November)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
40.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kab. Pesisir Selatan (Sumatera Barat, tanggal 19 s.d. 22 November 2023)	
41.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kab. Sukabumi (Jawa Barat, tanggal 19 s.d. 22 November 2023)	
42.	Analisis Data Evaluasi Hal-Hal yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Media (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
43.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kabupaten Takalar (Sulawesi Selatan, tanggal 26 s.d. 29 November 2023)	
44.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kab. Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat, tanggal 26 s.d. 29 November 2023)	
45.	Evaluasi Hal-Hal yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Perusahaan Asing (Satuan Pendidikan Kerja Sama) (Semarang, Jawa Tengah, 29 November s.d. 2 Desember 2023)	
46.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kabupaten Merauke (Papua Selatan, 30 November s.d. 3 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
47.	Lokakarya Memaknai Hasil Survei Implementasi Pendidikan Pancasila (Batam, tanggal 5 s.d. 8 Desember 2023)	
48.	Diskusi Kelompok Terpumpun Evaluasi Implementasi Pendidikan Pancasila (Yogyakarta, tanggal 12 s.d. 15 Desember 2023)	
49.	Evaluasi Pelaksanaan Program Paskibraka dan Evaluasi Juknis Pembentukan Paskibraka Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 15 Desember 2023)	
50.	Evaluasi Hal-Hal yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila di Lingkungan Perusahaan Asing (Satuan Pendidikan Kerja Sama) dan Ormas (Jakarta, tanggal 15 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
51.	Studi Lapangan Penyusunan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) di Kabupaten Cirebon (Jawa Barat, tanggal 17 s.d. 20 Desember 2023)	
52.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Paskibraka di Provinsi Lampung (Lampung, 18 s.d. 21 Desember 2023)	
53.	Rapat Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Evaluasi PIP (RPJMN) (Jakarta, tanggal 20 s.d. 22 Desember 2023)	
54.	Penyelenggaraan Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Paskibraka Kelompok Sasaran Kebijakan DKI Jakarta (Jakarta, tanggal 22 Desember 2023)	

G. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Pelayanan PIP yang Berkualitas

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya meliputi kegiatan Kesekretariatan yang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan BPIP yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan PIP yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ukuran keberhasilan Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP Yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel adalah:

Tabel 2. 44. Indikator Keluaran Program Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Kelola BPIP yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	KET
Nilai Reformasi Birokrasi	82,5	63,7	Penilaian atas periode T.A. 2022
Indeks Sistem Merit	0,75	0,66%	Capaian Indeks Sistem merit Tahun 2023
Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	Opini atas Laporan Keuagan Tahun Anggaran 2022 oleh BPK
Nilai SAKIP	BB	B	Nilai evaluasi belum disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB
Indeks Profesionalisme ASN	82,5	64,59%	Capaian Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	80,42%	Survei terhadap *stakeholder*

Fokus layanan yang dilakukan dalam rangka dukungan manajemen BPIP diberikan kepada pihak internal BPIP dan K/L Pembina sebagai mitra BPIP dalam upaya penguatan kelembagaan BPIP adalah:

1. Layanan Perencanaan dan Keuangan
2. Layanan Hukum dan Organisasi;
3. Layanan Umum dan Sumber Daya Manusia;

4. Layanan Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi;
5. Layanan pengawasan Internal; dan
6. Layanan Pusat Data dan Informasi.

Indikator keberhasilan tata kelola BPIP menjadi perhatian: (i) Kementerian PAN dan RB, KASN, BKN dengan indeks RB, nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai sistem merit, nilai profesionalisme ASN; (ii) Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini pada laporan keuangan, dan (iii) Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait perencanaan, keuangan, dan monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Beberapa perkembangan capaian strategis tata kelola BPIP Tahun 2023, dicapai melalui kegiatan yaitu:

F.1. Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 45. Indikator Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan dan Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	100%	100% (Dokumen)
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	Layanan Manajemen Keuangan	1	100%	100% (Dokumen)
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	100%	100% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Layanan yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Dokumen Perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan, dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Biro Perencanaan dan Keuangan sudah melakukan layanan Perencanaan sebaik mungkin misalnya dari Revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka optimalisasi anggaran. Berikut adalah dokumen dan layanan perencanaan dan penganggaran yang telah diselesaikan hingga akhir periode 2023:

1. Revisi DIPA 13 (tiga belas) kali;
2. Revisi POK 16 (enam belas) kali;
3. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2024;
4. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif;
5. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran;
6. Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran;
7. Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2023 dengan tema Membangun “Ekosistem Pancasila dalam Tindakan”;
8. Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024;

9. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI sebanyak 4 kali;
10. Penelitian TOR dan RAB Unit Kerja BPIP Tahun Anggaran 2024;
11. Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja Unit Kerja;
12. Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Dan Penganggaran Berbasis Kinerja.

b. Layanan Manajemen Keuangan

Dalam menjalankan Layanan Manajen Keuangan Biro Perencanaan dan keuangan hingga akhir periode 2023 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Pelaksanaan Layanan Keuangan;
3. Pelaksanaan audit keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Rekonsiliasi laporan keuangan triwulan I, II, III, dan IV di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancsila;
6. Koordinasi dengan BSRe terkait implementasi tanda tangan elektronik pada dokumen keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
7. Sosialisasi Standar Biaya Masukan tahun 2024 terhadap pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun salah satu Capaian kinerja layanan manajemen keuangan adalah Opini Laporan Keuangan oleh BPK. Opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksaan menenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, BPK memberikan 5 jenis opini sebagai berikut:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal;
c. Opini wajar dengan pengecualian;
d. Opini Tidak Wajar;
e. Opini Tidak Memberikan Opini;

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. BPK telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat WTP yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Pada tahun Anggaran 2023 menargetkan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan nomor : 80/S/V-XVI.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022 mendapat Opini "WTP". Perolehan Opini WTP bukanlah tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. Keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat. Berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk mempertahankan Opini WTP diantaranya meliputi:

a. Tindaklanjut hasil temuan tahun sebelumnya.
b. Perbaikan pengelolaan keuangan, menggunakan aplikasi (SIMPATI) Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Terintegritas.
c. Perbaikan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
d. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
e. Penguatan pengendalian internal melalui penyusunan manajemen risiko sebagai bagian penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk keandalan pengendalian internal telah mendapatkan penilaian dari BPKP.

c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam menjalankan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan keuangan hingga akhir periode 2023 telah melaksanakan dokumen dan layanan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian program dan kegiatan setiap triwulan dari triwulan I, II, III dan IV;
2. Pemenuhan Monev Pelaksanaan Anggaran melalui e-monev Bappenas dan smart-dja;

3. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN);
4. Implementasi SAKIP berbasis elektronik melalui sistem APII Kinerja;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan;
6. Penyusunan tindaklanjut rekomendasi LHE implementasi SAKIP oleh KemenPANRB.
7. Kordinasi dan penyusunan laporan pada SISMONEV KP KSP setiap triwulan.

Adapun salah satu capaian kinerja Layanan Pemantauan dan Evaluasi adalah Nilai SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih menfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasive, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Hasil evaluasi SAKIP dengan nomor: B/124/AA.05/2023 menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh nilai 61,81 atau predikat “B”. meskipun dibawah target yang ditentukan yaitu BB tetapi Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah menunjukkan hasil

yang cukup baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan komitmen dal manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
1. Perencanaan Kinerja	30	21,60	21,64
2. Pengukuran Kinerja	30	16,80	16,93
3. Pelaporan Kinerja	15	9,90	10,07
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,90	13,17
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**61,20**	**61,81**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Aktivitas dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan, dan kinerja pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 46. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Januari 2023)	
2.	Rapat Pembahasan Capaian B-12 Program Prioritas Nasional Tahun 2022 (Daring, tanggal 17 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	Rapat Rancangan Awal Rencana Kerja K/L Tahun 2024 (Daring, tanggal 18 Januari 2023)	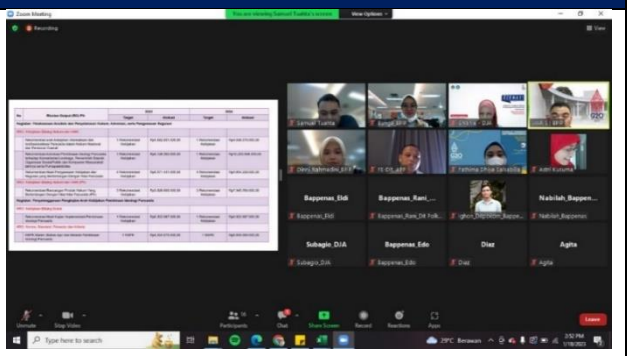
4.	Rapat Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited) di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 18 Januari 2023)	
5.	Pemenuhan permintaan berkas keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI berdasarkan surat BPK RI Nomor: 02/LK-BPIP/01/2023 (Jakarta, tanggal 29 Januari 2023)	
6.	Rapat Kerja BPIP 2023 (Bandung, tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Rapat Penyampaian Hasil Capaian Program Prioritas Nasional 2022 Bidang Polhukam Sistem Monitoring Evaluasi (SISMONEV) (Daring, tanggal 31 Januari 2023)	
8.	Rapat Pembahasan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 dan Tahun 2023 Bidang Polhukam (Jakarta, tanggal 6 Februari 2023)	
9.	Rapat Monitoring Perkembangan Laporan Kinerja Tahun 2022 Tingkat Kedeputian (Jakarta, tanggal 16 Februari 2023)	
10.	Studi Banding Pelaksanaan Penatausahaan Layanan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang (Sumatera Barat, tanggal 16 s.d. 19 Februari 2023	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Studi Banding Pengelolaan Idikator Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Aset Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat, tanggal 16 s.d. 19 Februari 2023)	
12.	Rapat Monitoring Perkembangan Laporan Kinerja Tahun 2022 Tingkat Kedeputian Lanjutan (Jakarta, tanggal 20 Februari 2023)	
13.	Diskusi Kelompok Terpumpun Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024 dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran (Jakarta, tanggal 2 s.d. 4 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Rapat Penajaman Keluaran Prioritas Sismonev KSP dan Pengelolaan Kinerja Organisasi (Yogyakarta, tanggal 5 s.d. 7 Maret 2023)	
15.	Rapat Penajaman Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2023 (Daring, tanggal 29 Maret 2023)	
16.	Rapat Penajaman Pertemuan Dua Pihak Perubahan Renstra BPIP Tahun 2020-2024(Daring, tanggal 4 April 2023)	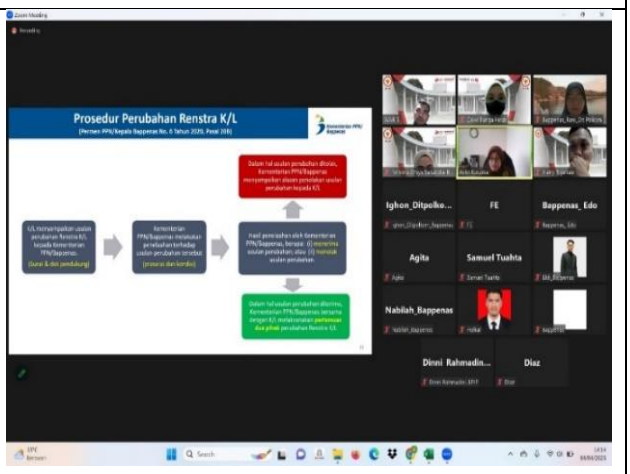
17.	Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 4 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
18.	Rapat Koordinasi Persiapan Tripartit di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 April 2023)	
19.	Kegiatan Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Mitra Direktorat Politik dan Komunikasi (Jakarta, tanggal 12 Mei 2023)	
20.	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kuartal I Tahun Anggaran 20 23 (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023)	
21.	Musrenbangnas dalam rangka Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 (Daring, tanggal 22 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI (Jakarta, tanggal 30 Mei 2023)	
23.	Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI(Jakarta, tanggal 8 Juni 2023)	
24.	Rapat Pembahasan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Aplikasi SAKTI Satuan Kerja BPIP (Jakarta, tanggal 13 Juni 2023)	
25.	Koordinasi Pemetaan Program dan Kegiatan Daerah yang mendukung BPIP sebagai Koordinator dalam Pelembagaan PIP Penyelenggaraan Negara pada K/L/D (Bali, tanggal 19 s.d. 21 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
26.	Koordinasi Pemangku Kepentingan Pemetaan Program dan Kegiatan Daerah yang mendukung Terwujudnya BPIP sebagai Koordinator dalam Pelembagaan PIP Penyelenggaraan Negara pada K/L/D (Karawang, tanggal 19 s.d. 21 Juli 2023)	
27.	Pemetaan Program dan Kegiatan Daerah yang menduukung Sasaran Strategis Terwujudnya BPIP sebagai Koordinator dalam Pelembagaan PIP Penyelenggaraan Negara pada K/L/D (Bogor, tanggal 22 s.d. 24 Juli 2023)	
28.	Rapat Penyusunan Laporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 6 s.d. 8 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
29.	Pembahasan Permohonan Pembukaan Blokir Automatic Adjustment BPIP T.A. 2023 (Jakarta, tanggal 12 Juli 2023)	
30.	Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Politik dan Komunikasi Triwulan I dan II Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 13 Juli 2023)	
31.	Rapat Penelaahan Usulan Revisi DIPA (Jakarta, tanggal 17 Juli 2023)	
32.	Rapat Penelaahan RKA-K/L BPIP Berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2024 (Jakarta, tanggal 25 s.d. 31 Juli 2023)	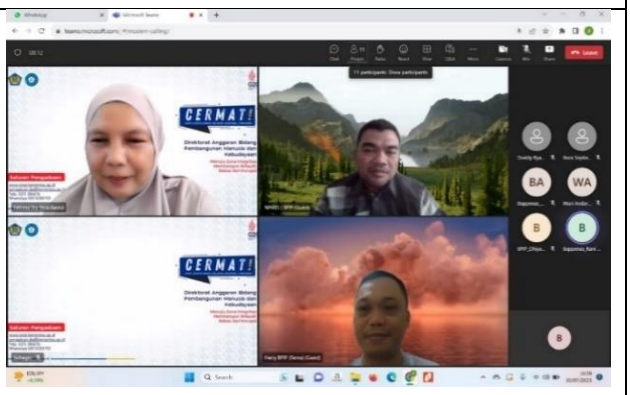

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
33.	Rapat Penelaahan Usulan Revisi DIPA Ke-6 (Jakarta, tanggal 16 Agustus 2023)	
34.	Rapat Penelitian TOR dan RAB Unit Kerja Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 14 s.d. 29 Agustus 2023)	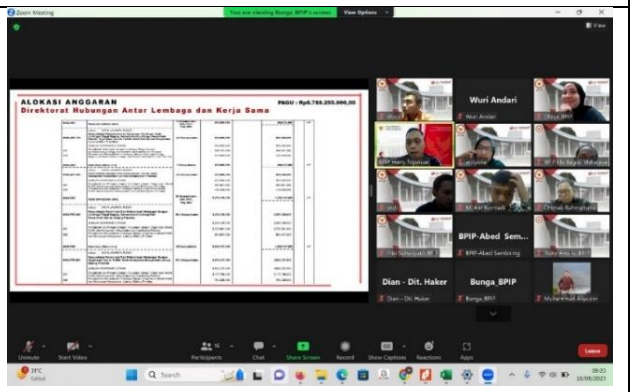
35.	Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI (Jakarta, tanggal 31 Agustus 2023)	
36.	Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI (Jakarta, tanggal 12 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
37.	Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja Unit Kerja (Jakarta, tanggal 14 s.d. 16 September 2023	
38.	Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Dan Penganggaran Berbasis Kinerja (Yogyakarta, tanggal 24 s.d. 28 September 2023)	
39.	Focus Group Discussion Implementasi Tanda Tangan Elektronik Bersertifikasi pada Dokumen DIPA (Jakarta, 4 Oktober 2023)	
40.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 4 s.d. 7 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
41.	Rapat Penelaahan Revisi DIPA ke-8 (Jakarta, 5 Oktober 2023)	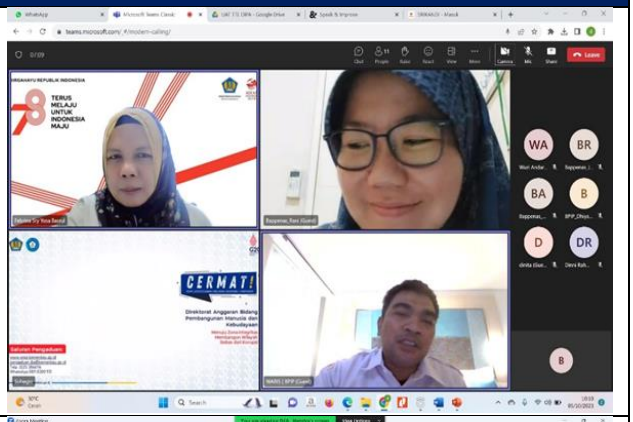
42.	Sosialisasi Standar Biaya Khusus Umum Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, 16 Oktober 2024)	
43.	Penyampaian Perbaikan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran (Jakarta, 24 Oktober 2023)	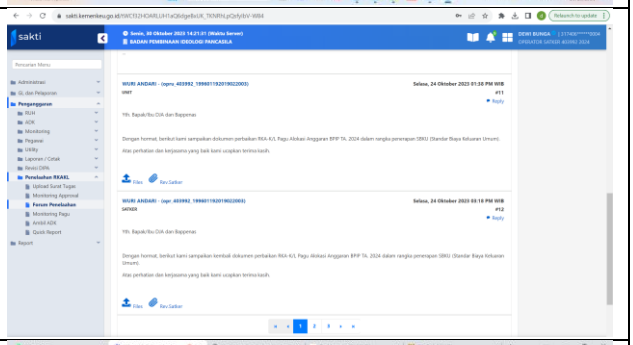
44.	Rapat Penelaahan Revisi DIPA ke-10 (Jakarta, 2 November 2023)	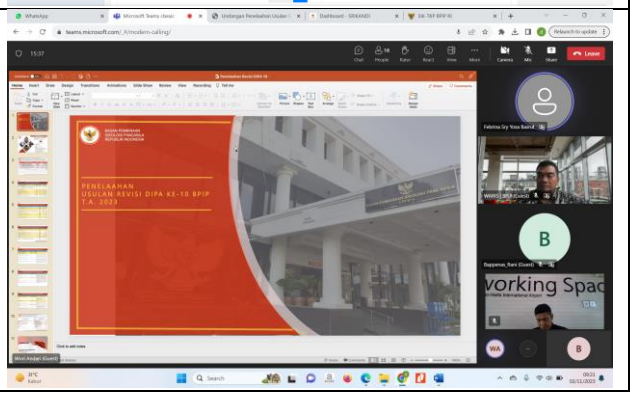

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
45.	Kick Off Penyusunan Renstra K/L 2025-2029 (Jakarta, 27 November 2023)	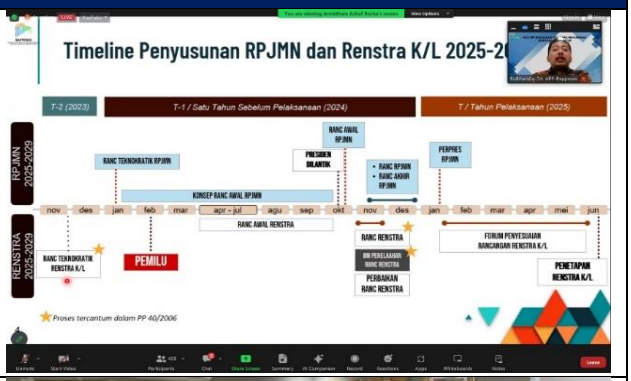
46.	Rapat Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) (Jakarta, tanggal 28 November 2023)	
47.	Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin) Tahun 2023, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dan Infokin Perubahan Struktur Organisasi (Bekasi, tanggal 14 s.d. 16 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
48.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 22 Desember 2023)	
49.	Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kedeputian I, Kedeputian II, dan Kedeputian III (Jakarta, tanggal 28 Desember 2023)	
50.	Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kedeputian IV, Kedeputian V, dan Sekretariat Utama (Jakarta, tanggal 29 Desember 2023)	

F.2. Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 47. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	Layanan Hukum	1	100%	100% (Layanan)
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang di tindaklanjuti	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	100%	100% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode tahun 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Uraian capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Persentase rancangan produk hukum dilaksanakan dengan rincian *output* layanan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023, tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan pemberian layanan hukum meliputi 2 (dua) klasifikasi utama sebagai berikut:

a. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan

b. Pemberian layanan hukum dalam kaitannya dengan penelaahan hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun masing-masing layanan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum

Rancangan peraturan perundang-undangan dalalm hal ini adalah peraturan BPIP, sedangkan produk hukum BPIP meliputi Keputusan Dewan Pengarah/Kepala/Sekretaris Utama/Deputi BPIP, selain juga instruksi dan surat edaran.

Penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo. Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tahapan kegiatan penyusunan Peraturan BPIP meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan. Dalam perencanaan akan ditetapkan Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala BPIP. Tahap penyusunan dilakukan oleh pemrakarsa untuk selanjutnya dilakukan penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Organisasi. Tahap pembahasan merupakan

pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelahnya Rancangan Peraturan BPIP akan ditetapkan oleh Kepala BPIP untuk selanjutnya diundangkan melalui pencatatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tahap penyusunan keputusan dan produk hukum lainnya meliputi penyusunan dan pembahasan internal. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, ahli, dan atau pihak lain yang terkait dengan materi produk hukum. Dalam beberapa penyusunan produk hukum memerlukan kegiatan studi banding dengan Kementerian/Lembaga dan/atau pemerintahan daerah sehingga produk hukum yang disusun tepat tujuan dan tepat sasaran serta dapat diimplementasikan.

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1) Penelaahan hukum merupakan kegiatan untuk melakukan kajian terhadap produk hukum dan berbagai permasalahan hukum, yang terdiri atas analisis hukum, evaluasi produk hukum, mediasi, dan pendampingan hukum serta asistensi penyusunan naskah kerja sama berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, kemitraan, dan naskah kerja sama lainnya.

   Objek kajian penelaahan adalah lembaga (BPIP) maupun individual (Pegawai BPIP), termasuk juga kajian terhadap produk hukum BPIP dalam kerangka pembentukan atau evaluasi produk hukum BPIP. Sedangkan mediasi dan pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum yang memerlukan penanganan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Asistensi penyusunan naskah kerja sama dilaksanakan dalam rangka menguatkan materi kerja sama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, kemitraan, dan naskah kerja sama lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

2) Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum di lingkungan BPIP meliputi pendokumentasian, penyebarluasan, dan pemeliharaan dokumen hukum. Dalam kaitan pengelolaan informasi hukum tersebut telah diundangkan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dimana BPIP diproyeksikan JDIH BPIP menjadi sentra informasi dan dokumentasi hukum terkait dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum merupakan kegiatan pengelolaan produk hukum BPIP meliputi pendokumentasian, inventarisasi, dan penyediaan informasi produk hukum. Pendokumentasian produk hukum BPIP dilakukan secara manual dan elektronik dalam JDIH BPIP yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Sedangkan penyediaan informasi hukum dilakukan melalui berbagai sarana, yaitu dapat melalui pencetakan/penjilidan produk-produk hukum BPIP, pamflet, *standing banner*, dan berbagai media lain serta media elektronik, selain juga melakukan sosialisasi dan/atau internalisasi produk hukum yang telah diterbitkan BPIP. Pengembangan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi

hukum juga memerlukan pembangunan perpustakaan *offline* dan *online*.

Sebagai salah satu sarana penyediaan informasi hukum berbasis elektronik, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan pengelolaan dan pengembangan terhadap JDIH secara berkala sehingga seluruh produk hukum BPIP dan segala dokumen berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dapat terinformasikan dan diakses oleh masyarakat luas dengan serta-merta.

Seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian Layanan Hukum dilakukan melalui berbagai tahapan yang harus dibangun secara bertahap, berkelanjutan dan perlu melibatkan koordinasi serta kerja sama dengan instansi lain (K/L/Pemda) serta didukung dengan tersedianya infrastruktur (sarana prasarana) yang memadai.

Sesuai dengan dokumen perencanaan tahun 2023, target kinerja Layanan Hukum tahun 2022 sebagai berikut:

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum BPIP, dengan volume rincian *output* 40 (empat puluh) rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum BPIP; dan

b. Penelaahan Hukum dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan volume rincian *output* 50 (lima puluh) dokumen penelahaan hukum, pengelolaan dokumentasi, dan informasi hukum.

Pada tahun 2023, penyusunan rancangan Peraturan BPIP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPIP Nomor 92 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2023 (Prosun 2023), dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 2. 48. Peraturan dan Produk Hukum Tahun 2023

PERATURAN BPIP			
No.	**Nama Produk Hukum**	**Pengajuan Tahun**	**Status**
1.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik BPIP	Lanjutan 2022	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2023
2.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Manajemen Talenta di Lingkungan BPIP	Lanjutan 2022	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022
3.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPIP Tahun 2020-2024	2023	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2023
4.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP	2023	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023
5.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	2023	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2023
6.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP	2023	Diundangkan, Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2023
7.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPIP	Lanjutan 2022	Penetapan

8.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan BPIP	2023	Proses penjadwalan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Lanjutan 2022	Proses penjadwalan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila di Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	2023	Penyelarasan internal, rancangan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk penyempurnaan
PRODUK HUKUM BPIP			
Keputusan Kepala BPIP			
11.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Quick Win* BPIP		
12.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Pertama Kali Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota		
13.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 27 Tahun 2023 tentang Panduan Umum Tata Kelola Kendaraan Dinas di Lingkungan BPIP		
14.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis BPIP		
15.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 31 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara BPIP Selama Bulan Ramadan 1444 Hijriah		

16.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 31.1 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE BPIP Tahun 2022-2024
17.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Ikon Prestasi Pancasila BPIP
18.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 37.1 Tahun 2023 tentang Peta Rencana SPBE BPIP
19.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip BPIP
20.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2020-2024 (Perubahan)
21.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 43.1 Tahun 2023 tentang Manajemen SPBE BPIP 2020-2024
22.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 43.2 Tahun 2023 tentang Aplikasi SPBE BPIP 2020-2023
23.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara BPIP
24.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPIP Tahun 2023
25.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
26.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
27.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 67.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP
28.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 73 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan BPIP Tahun 2024
29.	Keputusan Kepala BPIP Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila

Keputusan Sekretaris Utama BPIP	
30.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Biro Pengawasan Internal BPIP Tahun 2023
31.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 88 Tahun 2023 tentang Logo Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP
32.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 90 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan BPIP
33.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 93.1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kearsipan BPIP
34.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 98 Tahun 2023 tentang Panduan Penelaahan Etalase Produk Katalog Elektronik Sektoral Pakaian Dinas Upacara Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
35.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 108 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan BPIP
36.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 111 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan BPIP
37.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 113 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP
38.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 114 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan BPIP (*Pencabutan Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 113 Tahun 2023*)
39.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 120 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BPIP
40.	Keputusan Sekretaris Utama BPIP Nomor 134 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan BPIP

Surat Edaran Kepala BPIP	
41.	Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023
42.	Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 (*Pencabutan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 1 Tahun 2023*)
Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP	
43.	Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPIP Tahun 2022
44.	Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPIP Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023
45.	Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan Insiden Keamanan Siber dalam Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan BPIP
46.	Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan BPIP
47.	Surat Edaran Sekretaris Utama BPIP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan BPIP

Selain produk hukum BPIP tersebut di atas, terdapat produk hukum berupa Keputusan Kepala, Keputusan Sekretaris Utama, dan Keputusan Deputi sejumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) keputusan mengenai pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pengangkatan pegawai, pembentukan tim/kelompok kerja, dan keputusan lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi rutin unit organisasi/unit kerja di lingkungan BPIP.

Sedangkan jumlah penelaahan hukum berupa penelaahan rancangan perjanjian kerja sama BPIP, evaluasi Peraturan BPIP, dan kajian hukum sebagai berikut:

No.	Jenis Penelahaan Hukum	Jumlah
1	Penelaahan Rancangan Nota Kesepahaman	7
2	Penelaahan Rancangan Perjanjian Kerja Sama	21
3	Penelaahan Rancangan Kemitraan	3
4	Kajian Hukum	10
5	Evaluasi Peraturan BPIP	2

Berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), BPIP meraih penghargaan JDIHN Awards Terbaik Ke-IV Tingkat Lembaga Nonstruktural. Kemudian Dalam rangka penilaian terhadap reformasi hukum di lingkungan BPIP, pada tahun 20232 telah dilaksanakan pengukuran Indeks Reformasi Hukum tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan nilai 98,60 sebagaimana pemberitahuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PPH-LT.01.02.13 tanggal 27 November 2022 hal Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023.

Sedangkan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, BPIP telah mengajukan sampel 3 (tiga) kebijakan, yaitu Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila. Namun sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara.

2. Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi dilaksanakan dengan rincian *output* layanan

Organisasi dan tata kelola internal.

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal telah menghasilkan beberapa dokumen yaitu:

Layanan Organisasi yang meliputi:

a. Capaian Kinerja Layanan Tata Laksana Reformasi Birokrasi

Layanan ini telah menghasikan beberapa dokumen yaitu:

1. Telah tersusunnya Revisi Peta Proses Bisnis atas Keputusan Kepala BPIP Nomor 79 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis BPIP, yaitu Peta Proses Binisi Revisi melalui Keputusan Kepala BPIP nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis BPIP;
2. Perubahan Road Map RB BPIP 2020-2024 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 42 tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Telah dilakukan pengisian Rencana Aksi pada Portal RB Nasional
4. Peta Proses Bisnis BPIP (Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 28 tahun 2023 tentang peta Proses Bisnis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ;
5. Draft Rencana Kerja RB BPIP 2023;
6. BPIP telah melaksanakan Gerakan gotong royong percepatan penurunan angka stunting dalam rangka peningkatan kinerja RB BPIP pada tanggal 1 agustus 2023 di Banyuwangi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri PanRB; Kepala BPIP; Kepala BKKBN; Bupati Banyuwangi dan perwakilan dari KASN; Kementerian PPPA; Setwapres

b. Capaian Kinerja Layanan Organisasi

Layanan Organisasi telah menghasilkan beberapa dokumen, yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi;

   Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/554/m.kt.01/2023 Tanggal 11 Mei 2023 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPIP. Hal penataan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila poin dalam surat Menteri PANRB, diantaranya:

   a. Menyetujui penataan OTK BPIP sebagai upaya fungsi pengordinasian penyelenggaraan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
   b. Direktorat penyelenggaraan program paskibraka berada Pada Deputi Bidang Pendidikan Dan Pelatihan; dan
   c. Menyetujui penambahan satu direktorat pada Deputi Bidang Pengendalian Dan Evaluasi.

2. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pembinaan Ideologi Pancasila serta Naskah Akademik Pembentukan Badan Diklat. Telah tersusunnya:

   a. Naskah Akademik Jabatan Fungsional Pembina Ideologi Pancasila;
   b. Naskah Akademik Pembentukan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
   c. Akan segera dilakukan pembahasan dan masukan dari setiap Unit Organisasi dilingkungan BPIP.

3. Melakukan kegiatan evaluasi kelembagaan;

   a. Penyusunan tim evaluasi kelembagaan melalui Keputusan Kepala BPIP Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Evaluasi Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023
   b. Laporan Evaluasi Kelembagaan

4. SK Tim Percepatan Evaluasi Kelembagaan BPIP Tahun 2023.

c. Capaian Tata kelola Adminstrasi Biro Hukum dan Organisasi

dilaksanakan untuk mendukung kinerja Biro Hukum dan Organisasi

a. Administrasi dan Kerumahtanggaan:

Kinerja yang dilakukan terkait ketatusahaan adalah urusan tata usaha dan rumah tangga serta penyiapan laporan berkala mengenai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Biro Hukum dan Organisasi di dalam Korespondensi yang terdiri Surat Masuk dan Surat Keluar mengalami perubahan terdiri dari Jumlah Kualitas dan Kuantitas. Didalam surat masuk yang meliputi nota dinas, memorandum, undangan, surat perintah, surat edaran, surat keputusan, intruksi atau surat edaran dari unit kerja lain. Surat Keluar terdiri dari nota dinas, memorandum, sprint, undangan, dan surat keluar biasa.

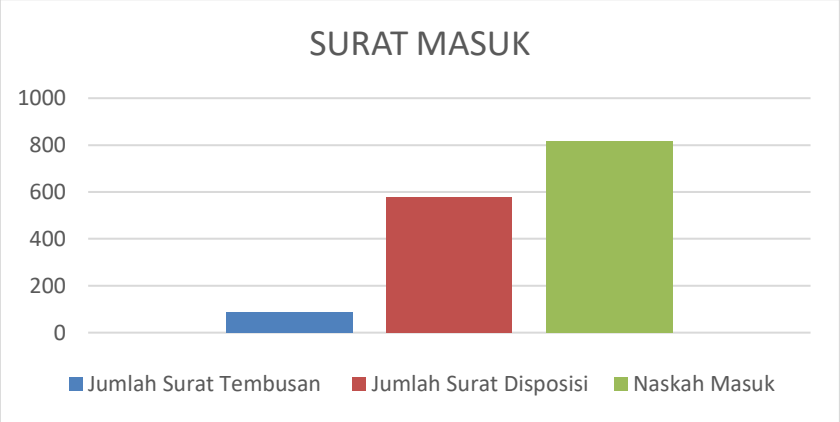

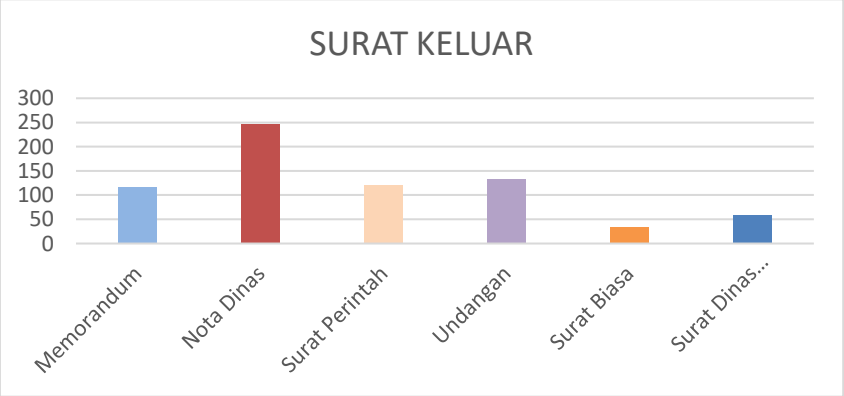

b. Survei Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Hukum dan Organisasi sebagai salah satu penyedia dukungan manajemen di Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka perlu diselenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penilaian pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Stakeholder yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan Stakeholder Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Stakeholder, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Pengolahan data SKM menggunakan menggunakan quisioner dan diambil diolah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	2,58	2,94	2,92	3,88	3,08	3,13	3,21	3,54	3,71
Kategori	C	C	C	A	B	B	B	A	A
IKM Unit Layanan	80,42 (B atau Baik)								

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen hukum dan organisasi pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 49. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Penyelarasan Internal Peraturan BPIP dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum BPIP (Jakarta, tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Kegiatan Pengharmonisasian dan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP (Solo, tanggal 22 s.d. 25 Januari 2023)	
3.	Kegiatan Pembahasan Awal Kebutuhan Atas Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Januari 2023)	
4.	Kegiatan Penyusunan Awal Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2020 dan Penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 (Jakarta, tanggal 07 s.d. 10 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
5.	Kegiatan Pembahasan dan Perumusan Naskah Urgensi Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, dan Kajian terhadap Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Pembinaan Idelologi Pancasila serta Jabatan Fungsional Kepaskibrakaan (Karawang, tanggal 13 s.d. 17 Februari 2023)	
6.	Kegiatan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP, Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPIP, dan Penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP (Bandung, tanggal 20 s.d. 25 Februari 2023)	
7.	Kegiatan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP dan Penyusunan Awal pedoman Kearsipan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Kegiatan Diskusi dan Pembahasan Reformasi Birokrasi Tematik bagi BPIP dan Penyusunan Rencana Kerja SPBE BPIP; Harmonisasi Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisais dan Tata Laksana (Karawang, tanggal 7 s.d. 10 Maret 2023)	
9.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 19 s.d. 21 Maret 2023)	
10.	Kegiatan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP tentang Kelas Jabatan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 27 s.d. 31 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Penyusunan Awal Rancangan Peraturan BPIP tentang Peraturan BPIP No. 6 Tahun 2019, Penerjemahan Perpres No. 51 Tahun 2022, dan Pengembangan JDIH BPIP (Bandung, tanggal 2 s.d. 6 April 2023)	
12.	Koordinasi Penerjemahan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP dan Perpres No. 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka ke Kementerian Hukum dan HAM (Jakarta, tanggal 10 Aprili 2023)	
13.	Pembahasan Awal Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Review Peta Proses Bisnis BPIP (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 April 2023)	
14.	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020–2024 (Daring, tanggal 17 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
15.	Rapat Pembangunan Aplikasi Pendukung untuk Penyusunan Produk Hukum Lainnya BPIP (Daring, tanggal 17 April 2023)	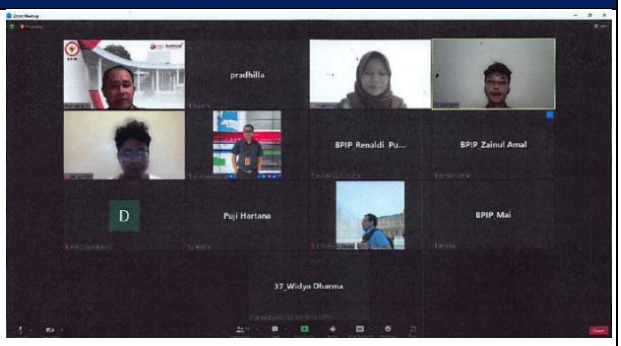
16.	Rapat Pembangunan Aplikasi JDIH BPIP Berbasis Android (Jakarta, tanggal 17 April 2023)	
17.	Penyusunan Konsep Awal Arah Kebijakan PIP, Persiapan Penilaian JDIH Awards dan Pengembangan JDIH BPIP, dan Penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dalam Bahasa Inggris (Bali, tanggal 2 s.d. 6 Mei 2023)	
18.	Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Logis Kinerja Reformasi Birokrasi Tematik BPIP dan Penyelarasan Internal Rancangan Keputusan Kepala BPIP tentang Pedoman Akreditasi Diklat PIP (Karanganyar, tanggal 6 s.d. 10 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
19.	Rapat Pengharmonisasian Lanjutan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020 – 2024 (Solo, tanggal 10 s.d. 13 Mei 2023)	
20.	Koordinasi Surat Selesai Harmonisasi Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP ke Kementerian Hukum dan HAM (Jakarta, tanggal 22 Mei 2023)	
21.	Koordinasi dengan BPSDM Kemenkumham dalam rangka kegiatan Pembukaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Depok, tanggal 29 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Koordinasi Pengundangan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020 – 2024 ke Kementerian Hukum dan HAM (Jakarta, tanggal 5 Juni 2023)	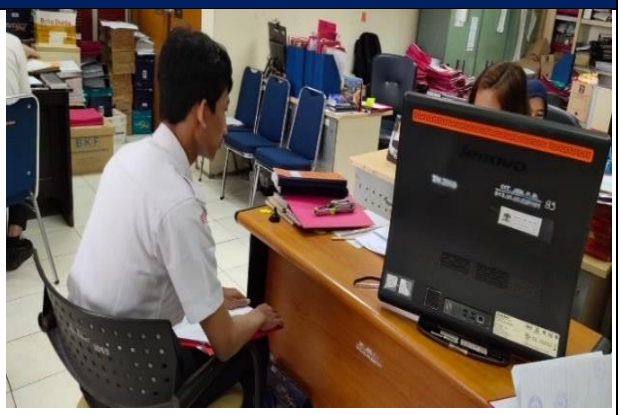
23.	Pembahasan Juknis Keprotokolan dan Pedoman Kearsipan (Bandung, tanggal 7 s.d. 10 Juni 2023)	
24.	Bimbingan Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Evaluasi Klembagaan BPIP (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Pembahasan Kinerja Reformasi Birokrasi General BPIP dan Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Utama Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023)	
26.	Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Naskah Urgensi Dalam Rangka Perubahan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2019 (Karawang, tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023)	
27.	Grand Launching Aplikasi Mobile JDIH BPIP, Brainstorming Rencana Kerja JDIH BPIP 2024, dan Pengumpulan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum BPIP 2023 (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengundangan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP No. 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020 – 2024 ke Kementerian Hukum dan HAM (Jakarta, tanggal 7 Juli 2023)	
29.	Perumusan dan Pembahasan Analisis SWOT dalam rangka Pembentukan Badan Diklat di Lingkungan BPIP (Tangerang, tanggal 12 s.d. 15 Juli 2023)	
30.	Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Rapat Koordinasi Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Pancasila dengan Tim Pengkaji dan Perumus (Yogyakarta, tanggal 21 s.d. 24 Juli 2023)	
32.	Penyusunan Perubahan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 dan Persiapan Implementasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023)	
33.	Penyebarluasan Informasi Hukum terkait Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Komponen Masyarakat Lainnya (Kudus, tanggal 29 s.d. 31 Juli 2023)	
34.	Peningkatan Kinerja RB BPIP Melaui Launching Gerakan Gotong Royong dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Banyuwangi, tanggal 29 Juli s.d. 04 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
35.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Agustus 2023)	
36.	Penyusunan Rancangan Peraturan BPIP tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 sebagai Tindak Lanjut Hasil Harmonisasi (Jakarta, tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2023)	
37.	Pembahasan Penerjemahan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila ke Dalam Bahasa Inggris, Pengumpulan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum BPIP 2023, dan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Naskah Dinas (Jakarta, tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
38.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Bantul (Bantul, tanggal 30 Agustus 2023)	
39.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Padang, tanggal 30 Agustus 2023)	
40.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar, tanggal 31 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
41.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo, tanggal 31 Agustus 2023)	
42.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kota Padang (Padang, tanggal 31 Agustus 2023)	
43.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Subang (Subang, tanggal 31 Agustus 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
44.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Kota Cirebon (Cirebon, tanggal 1 September 2023)	
45.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Maros (Maros, tanggal 1 September 2023)	
46.	Pengharmonisasian Finalisasi Rancangan Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Laksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Rancangan Perubahan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 2022 (Daring, tanggal 4 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
47.	Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ekonomi Pancasila serta Rancangan Peraturan BPIP tentang Arah Kebijakan Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila (Anyer, tanggal 4 s.d. 8 September 2023)	
48.	Studi Banding Pengelolaan Perpustakaan dan JDIH berbasis Artificial Intellegence (AI) di Pemerintah Kabupaten Gresik (Gresik, tanggal 10 s.d. 13 September 2023)	
49.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram, tanggal 13 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
50.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kota Manado (Manado, tanggal 13 September 2023)	
51.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Mataram, tanggal 14 September 2023)	
52.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kota Tomohon (Tomohon, tanggal 14 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
53.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Garut (Garut, tanggal 14 September 2023)	
54.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kota Sukabumi (Sukabumi, tanggal 14 September 2023)	
55.	Studi Banding Penyusunan Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya di Pemerintah Kabupaten Bandung (Soreang, tanggal 14 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
56.	Pengharmonisasian Rancangan Peraturan BPIP, Penyelarasan Internal Petunjuk Teknis Diklat PIP, Evaluasi Kelembagaan, Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Organisasi Kediklatan BPIP dan Jabatan Fungsional Pembinaan Ideologi Pancasila (Bekasi, tanggal 18 s.d. 23 September 2023)	
57.	Penerjemahan Lanjutan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Evaluasi Produk Hukum BPIP, Koordinasi Dokumentasi Dan Informasi Produk Hukum Pengelola JDIH, dan Pembahasan Indeks Kualitas Kebijakan (Yogyakarta, tanggal 25 s.d. 29 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
58.	Kegiatan Penilaian Mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 3 s.d. 6 Oktober 2023)	
59.	Kegiatan Pembentukan Produk Hukum serta Monev Program Penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023)	
60.	Kegiatan Penyelarasan Internal Rancangan Peraturan BPIP di (Jakarta, tanggal 21 s.d. 24 November 2023)	
61.	fKegiatan Finalisasi Evaluasi Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; Penyusunan SKM Biro Hukum dan Organisasi dan pemutakhiran Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi BPIP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 27 November s.d. 01 Desember 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
62.	Kegiatan RBXperience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center (Bali, tanggal 04 s.d. 07 Desember 2023)	
63.	Kegiatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPIP (Bandung, tanggal 11 s.d. 14 Desember 2023)	
64.	Kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum (Jakarta, tanggal 15 s.d. 20 Desember 2023)	

F.3. Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 50. Capaian Target Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	Layanan BMN	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Umum	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Perkantoran	1	1	100% (Layanan)
	Layanan Sarana Internal	30	100%	100% (Unit) Proses
	Layanan Manajemen SDM	326	100%	100% (Orang)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	306	100%	100% (Orang)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen program, keuangan dan kinerja adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Beberapa capaian tersebut didukung sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara

Barang Milik Negara milik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terus bertambah setiap tahunnya. Hal tersebut

menandakan perkembangan organisasi yang semakin besar serta semakin harus menguatkan pengelolaan Barang Milik Negara. Berikut adalah Neraca Barang Milik Negara per 31 Desember 2023:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,194,056,917
132111	Peralatan dan Mesin	76,244,477,636
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(35,900,439,892)
162151	Software	1,951,126,700
162161	Lisensi	1,411,716,525
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	923,030,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,073,802,500
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	178,975,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,040,020,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,490,584,050)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(55,378,826)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(122,952,500)
J U M L A H		**45,367,810,010**

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin bertambah kurang lebih 10 Milyar Rupiah yang menandakan bahwa terdapat penambahan barang yang dapat digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi. Peralatan dan Mesin tersebut berupa Kendaraan Dinas, Laptop, PC Unit, dan barang-barang lain.

Pada tahun 2023, Layanan Barang Milik Negara, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran memberikan dukungan berupa layanan kerumahtanggan seperti dukungan snack rapat, pemeliharaan barang, pemeliharaan Gedung, dan pemberian Voucher BBM untuk mendukung pejabat dan pegawai BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pada saat bekerja pejabat dan pegawai terasa aman dan nyaman menggunakan fasilitas kantor.

b. Layanan Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara yang menunjang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan khususnya Kendaraan dan anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Negara yang saat ini berada pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin bertambah kurang lebih 10 Milyar Rupiah yang menanda

c. Layanan Perkantoran

Pada tahun 2023, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

d. Layanan Saran Internal

Pada tahun 2023, layanan perkantoran melakukan dukungan perkantoran seperti proses pembayaran gaji dan tunjangan/hak keuangan pejabat dan pegawai BPIP dari Dewan Pengarah hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Layanan perkantoran juga memberikan layanan berupa dekorasi kantor dan proses dukungan pemeliharaan peralatan dan mesin sehingga menunjang tugas dan fungsi pegawai. Pengelolaan kendaraan dinas seperti pemeliharaan dan pembayaran pajak

dilakukan sehingga pejabat atau pegawai yang menggunakan fasilitas tersebut terasa aman pada saat menggunakan dan tidak mengalami hambatan.

e. Indeks Profesionalitas ASN

Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2022 dari 234 PNS yang diukur sebesar 64,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dimensi kualifikasi sebesar 22,27
2. Dimensi kompetensi sebesar 14,62
3. Dimensi Kinerja sebesar 22,37
4. Dimensi Disiplin sebesar 5,00

Untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka perlu koordinasi dengan unit kerja terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pemenuhan sasaran penilaian kinerja pegawai.

f. Penilaian Indeks Sistem Merit

Bobot aspek penilaian yang terbesar merupakan pengembangan karier diikuti oleh aspek perencanaan. Dalam hal ini tentunya apabila dapat difokuskan pada kedua hal tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau meningkat dengan tahun sebelumnya.

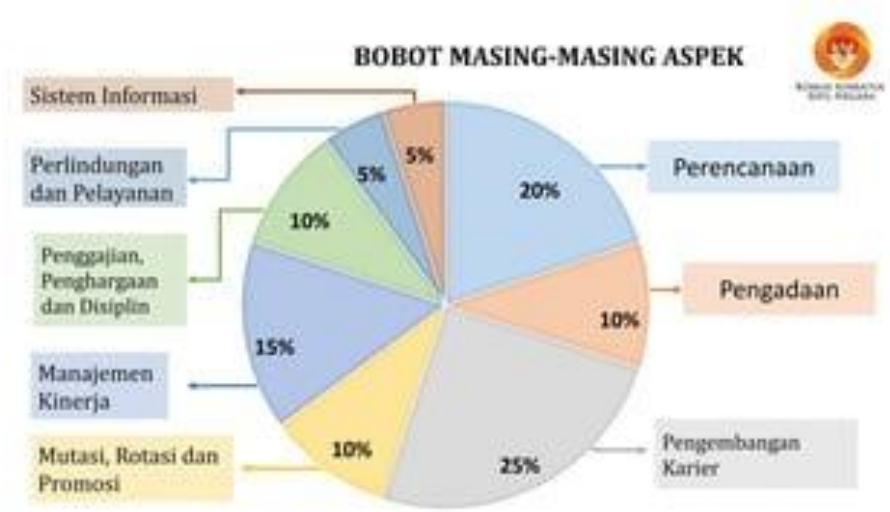

Penjelasan terkait dengan aspek tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Kondisi Ideal
1.	Perencanaan Kebutuhan	Instansi sudah mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun.
2.	Pengadaan	Instansi sudah mempunyai kebijakan internal terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dari jalur CPNS, PPPK, dan juga PNS yang berasal dari instansi lain.
3.	Pengembangan Karir	Instansi sudah mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang

		dimulai dengna pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk emngatasi kesenjangan dan pembentukan talent pool dan rencana suksesi.
4.	Promosi dan Mutasi	Instansi mempunyai kebijakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *Talent Pool.*
5.	Manajemen Kinerja	Instansi sudah menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta Diklat.
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Instansi sudah mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dalam membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku
7.	Perlindungan dan Pelayanan	Instansi mempunyai program perlindungan dan memberikan pelayanan kepada pegawai
8.	Sistem Informasi	Instansi mempunyai sistem yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit, seperti Sistem Informasi Kepegawaian, *Assessment Center, e-performance, e-office*, dll

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun

2023 mencapai nilai 305,5 dan indeks 0,75. Adapun langkah-langkah penataan/ perbaikan aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan sebesar 40
2. Pengadaan sebesar 38
3. Pengembangan karier sebesar 77,5
4. Promosi dan mutasi sebesar 27,5
5. Manajemen kinerja sebesar 60
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin sebesar 27,5
7. Penggajian, penghargaan, dan disiplin sebesar 27,5
8. Perlindungan dan pelayanan sebesar 16
9. Sistem informasi sebesar 19

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen SDM, BMN, dan ketatausahaan pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 51. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen SDM, BMN, dan Ketatausahaan

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Kegiatan Seleksi Wawancara Jabatan Deputi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 8 s.d. 11 Januari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
2.	Kegiatan Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 16 s.d. 19 Januari 2023).	
3.	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di lingkungan BPIP (Bogor, tanggal 19 s.d. 21 Januari 2023).	
4.	Kegiatan Computer Assessment Test dan Wawancara Assessor untuk Para Pejabat dan Pegawai Pegawai di Lingkungan BPIP 2023 (Jakarta, tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023).	
5.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 Februari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Penyusunan Laporan Barang Pengguna T.A. 2022 *Unaudited* (Jakarta, tanggal 16 s.d. 18 Februari 2023).	
7.	Kegiatan Koordinasi Perhitungan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis, Pranata Humas, Widyaiswara dan Koordinasi Penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), Pensiun Pejabat Negara serta Kenaikan Pangkat dan Penambahan Nama Gelar di lingkungan BPIP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 27 Februari s.d. 3 Maret 2023).	
8.	Kegiatan Pelantikan Bagi Pegawai di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 21 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
9.	Kaji Ulang dan Pengumuman RUP 2023 serta Bimbingan Teknis Pembuatan KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak PBJ (Jakarta, tanggal 14 s.d. 17 Maret 2023).	
10.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Barang Pengguna T.A 2022 (Jakarta, tanggal 27 s.d. 29 Maret 2023).	
11.	Kegiatan FGD Pengelolaan Kerumah tanggaan di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dalam rangka pelaksanaan program layanan umum di Lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 16 s.d. 19 Mei 2023).	
12.	Persiapan Pelantikan dan Rapat Pleno Dewan Pengarah (Jakarta, tanggal 6 April 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Konsultasi Subbagian Layanan Pengadaan ke LKPP (Jakarta, 2023).	
14.	Studi Komparatif Tingkat Kematangan UKPBJ pada Pemerintah Kota Bandung (Bandung, 2023).	
15.	Kegiatan Koordinasi Studi Komparatif Tingkat Kematangan UKPBJ pada Pemerintah Kota Padang (Padang, 2023).	
16.	Kegiatan rapat Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sewa Records Centre (Gudang Penyimpanan Arsip) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Kegiatan Asistensi Perhitungan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pembahasan Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan BPIP (Jakarta, 2023).	
18.	Kegiatan Perhitungan Dupak Analis Hukum, Pembahasan Kelas Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan Dan Entry Meeting Penanganan Serta Pengelolaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (Jakarta, 2023).	
19.	Forum Diskusi Finalisasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Lombok, 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
20.	Kegiatan Kegiatan Pembahasan Instrumen Kearsipan Identifikasi Arsip Terjaga dan Bimbingan Teknis JIKN, SIKN (Jakarta, 2023).	
21.	Penetapan Status Penggunaan Terhadap Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta. tanggal 8 Agustus 2023)	
22.	FGD Koordinasi Pengelolaan Aset dan Persediaan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2023)	
23.	Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas dan Pengurusan STNK dan TNKB Khusus	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Koordinasi Penyusunan Rancangan Aksi Perubahan Tentang Penatausahaan Persediaan di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung (Bandung, tanggal 4 s.d. 7 September 2023)	
25.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis (KKT) Dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (Jakarta, tanggal 3 s.d 8 Juli 2023)	
26.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pembahasan Jam Kerja Pegawai, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Integrasi SIASN BKN dengan SIATAP BPIP (Jakarta, tanggal 11 s.d. 14 Juli 2023)	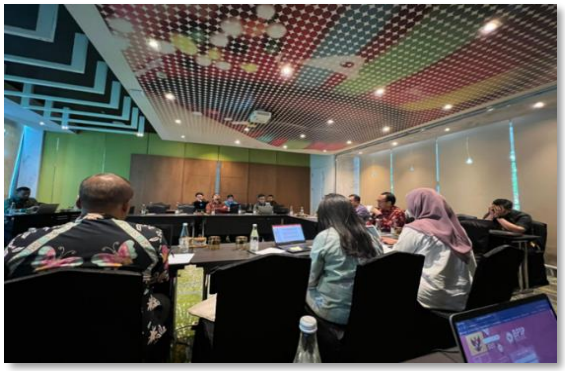
27.	Kegiatan Seleksi Assesmen Center (Psikologi) Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 31 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Bimtek Penyusunan Rencana Perkembangan Sumber Daya Manusia, Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dan Pengembang Teknologi (Jakarta, tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2023)	
29.	Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Manajemen Talenta, Persiapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Koordinasi Sistem Penggajian Pegawai (Jakarta, tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2023)	
30.	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV PNBP di PPSDM Regional Bandung (Bandung, tanggal 13 Agustus s.d. 8 September 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN di LAN (Jakarta, tanggal 25 s.d. 29 September 2023)	
32.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Bogor, tanggal 7 s.d. 14 September 2023)	
33.	Persiapan Pengadaan PPPK, Bimtek SSCASN, dan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 11 s.d. 15 September 2023)	
34.	Kegiatan Seleksi Administrasi Dalam Rangka Verifikasi Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (jakarta, tanggal 2 s.d. 6 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
35.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dan Petunjuk Teknis Manajemen Talenta Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Semarang, 9 s.d. 13 Oktober 2023)	
36.	Kegiatan Pelaksanaan Jawab Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK BPIP Tahun 2023 (Jakarta, 22 s.d. 25 Oktober 2023)	
37.	Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, 29 Oktober s.d. 1 November 2023)	
38.	Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, 13 s.d. 15 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
39.	Koordinasi Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Dalam Rangka Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (Surabaya, 14 s.d. 16 November 2023)	
40.	Tindaklanjut Undangan KASN Sebagai Peserta *Community Of Practice* Manajemen Talenta pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Balikpapan, tanggal 20 s.d. 22 November 2023)	
41.	Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 22 s.d 23 November 2023)	
42.	Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Makassar, tanggal 24 s.d 26 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
43.	Kegiatan Benchmarking Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Manajemen Aparatur Sipil Negara (Sukoharjo, tanggal 20 s.d. 22 Desember 2023)	

F.4. Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 52. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase tingkat kepuasan terhadap dukungan teknis dan administrasi bagi dewan pengarah, staf khusus dewan pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli yang diberikan	Layanan Protokoler	1	1	100% (Layanan)
Nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP	Layanan Hubungan masyarakat	1	1	100% (Layanan)
Nilai pengawasan kearsipan	Layanan Penyelenggaraaan Kearsippan	1	1	100% (Dokumen)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat, dan administrasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga bulan Desember 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Adapun layanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Protokoler dengan Indikator Kinerja kegiatan adalah Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan, meliputi:
   1. Pendampingan Unsur Pimpinan;
   2. Pengurusan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Unsur Pimpinan; dan
   3. Pembuatan Materi serta Protokol Kegiatan Unsur Pimpinan.

Adapun terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Layanan Protokoler sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana layanan protokoler memenuhi standar tertentu dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam bentuk persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan dengan indikator kinerja yang telah terlaksana hingga tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

1) Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan:
   Menilai kepuasan peserta, tamu, dan pihak terkait terhadap layanan protokoler.

2) Ketepatan Waktu:
   Memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan layanan protokoler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3) Kesesuaian dengan Protokol dan Etiket Resmi:

Menilai sejauh mana layanan protokoler mematuhi protokol dan etiket yang berlaku.

4) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:
Menilai efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya selama pelaksanaan layanan protokoler.

5) Ketepatan Informasi:
Memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam layanan protokoler akurat dan tepat waktu.

6) Manajemen Risiko dan Keamanan:
Menilai kemampuan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko serta memastikan keamanan selama acara.

7) Koordinasi dan Kemitraan:
Menilai sejauh mana kolaborasi dan koordinasi antarinstansi atau pihak terkait dalam penyelenggaraan layanan protokoler.

8) Pelaporan dan Evaluasi:
Menilai kualitas pelaporan dan evaluasi terkait pelaksanaan layanan protokoler.

9) Pemanfaatan Teknologi:
Menilai sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan protokoler.

10) Ketersediaan dan Pelengkap Dokumentasi:
Menilai apakah semua dokumen dan catatan terkait protokoler telah tersedia dan lengkap.

11) Kemampuan Manajemen Krisis:
Menilai seberapa baik tim protokoler dapat menangani situasi darurat atau krisis selama acara.

12) Pelatihan dan Pengembangan SDM:
Menilai keterampilan dan pengetahuan staf yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan protokoler.

Penggunaan indikator kinerja guna mengukur dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan protokoler yang diselenggarakan. Persentase indeks kinerja Layanan Protokoler pemerintahan dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = \left(\frac{\text{Skor yang Dicapai}}{\text{Skor Maksimum yang Dapat Dicapai}} \right) \times 100\%$$

- Skor yang Dicapai
  Jumlah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi atau pengukuran berbagai indikator kinerja. Skor ini diperoleh dari survei internal dan evaluasi kinerja lainnya.
- Skor Maksimum yang Dapat Dicapai
  Jumlah maksimum skor yang dapat dicapai jika semua indikator kinerja memenuhi standar yang ditetapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Layanan Protokoler memperoleh skor 100 dari skor maksimum 100, maka persentase indeks kinerja dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Indeks Kinerja} = \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, indeks kinerja Layanan Protokoler pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi mencapai 100%. Persentase ini mencerminkan sejauh mana layanan protokoler memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan bahwa semakin tinggi persentase, semakin baik kinerja Layanan Protokoler.

Layanan Protokoler telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dengan kegiatan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, dengan konsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Adapun layanan yang dilakukan berfokus pada pendampingan Unsur Pimpinan, Pengurusan tata usaha dan rumah tangga, serta

pembuatan materi (berupa *speech notes* dan/atau bahan paparan), rapat pimpinan dan protokol kegiatan Unsur Pimpinan yang sejalan dengan pendampingan unsur pimpinan.

b. Layanan Hubungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Indeks Keterbukaan Informasi publik BPIP yang meliputi:
   1. Penilaian atas sarana dan prasarana BPIP;
   2. Penilaian atas kualitas informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
   3. Penilaian atas jenis informasi yang diberikan BPIP kepada publik;
   4. Penilaian atas komitmen BPIP melaksanakan tugas dan fungsinya;
   5. Penilaian atas inovasi dan strategi dalam BPIP; dan
   6. Penilaian atas digitalisasi di lingkungan BPIP.

Sebagai respons terhadap ekspektasi akan transparansi dan akuntabilitas, Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dari Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi menghadirkan hasil evaluasi keterbukaan informasi sebagai refleksi mendalam atas pelaksanaan amanah publik. Dalam penilaian ini, secara cermat mengevaluasi aspek-aspek kritis yang terdapat dalam seluruh lapisan keterbukaan informasi di lingkungan BPIP dengan gambaran rinci dan objektif mengenai hasil penilaian sebagai berikut:

Layanan Hubungan Masyarakat

Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi

No.	Aspek Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPIP	Periode	Skor Maksimal	Skor Perolehan	Nilai Indeks (%)
1	Penilaian Sarana dan Prasarana BPIP	12 bln	100	100	100
2	Penilaian Kualitas Informasi yang Diberikan kepada Publik	12 bln	100	100	100
3	Penilaian Jenis Informasi yang Diberikan kepada Publik	12 bln	100	100	100
4	Penilaian Komitmen BPIP dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya	12 bln	100	100	100
5	Penilaian Inovasi dan Strategi yang Diterapkan dalam BPIP	12 bln	100	100	100
6	Penilaian Tingkat Digitalisasi di Lingkungan BPIP	12 bln	100	100	100

Keterangan:

- Periode: Mencakup periode waktu tertentu yang diukur (misalnya, bulan, kuartal, atau tahun).
- Skor Maksimal: Menunjukkan skor maksimal yang dapat dicapai untuk setiap aspek penilaian.
- Skor Perolehan: Menunjukkan skor yang diperoleh pada setiap aspek penilaian.
- Nilai Indeks (%) dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Indeks} = \left(\frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \right) \times 100\%$$

Dengan nilai indeks sebesar 100 pada setiap aspek penilaian mencerminkan pencapaian optimal dalam keterbukaan informasi publik di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\% \qquad = 100\%$$

Hasil pengukuran ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang evaluasi yang kami lakukan untuk memahami tingkat keterbukaan informasi di BPIP selama Triwulan IV. Pengukuran ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk

perumusan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023 tercatat bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah berhasil meraih peringkat "Menuju Informatif" dengan skala penilaian sebesar 81/100 secara Nasional. BPIP berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Pencapaian ini menjadi landasan penting dalam upaya terus-menerus meningkatkan standar keterbukaan dan akuntabilitas lembaga di masa depan.

c. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Nilai Pengawasan Kearsipan sebagai pengukuran indeks kinerja. Tujuan dari pengukuran ini mencakup:
   1. Perencanaan dan Pengambil Keputusan:
      Memastikan data dan informasi arsip yang akurat untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang efektif.
   2. Dukungan Pelayanan Publik:
      Menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi arsip yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik.
   3. Pelindungan Terhadap Hak Keperdataan Rakyat:
      Memastikan keamanan dan integritas dokumen penting seperti buku nikah, akta nikah, kartu keluarga, ijazah, dan sertifikat.
   4. Bahan Pertanggungjawaban:

Menyediakan basis data yang dapat diandalkan untuk pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan organisasi.

5. Pelindungan Aset dan Kekayaan Intelektual:
   Menjaga keberlanjutan dan keutuhan informasi yang berharga sebagai aset dan kekayaan intelektual organisasi.
6. Pembelajaran Bagi Generasi Sekarang dan yang Akan Datang:
   Menyimpan dan menyajikan informasi yang berharga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi saat ini dan yang akan datang.
7. Identitas dari Memori Kolektif:
   Menyajikan dan memelihara arsip sebagai identitas dan memori kolektif masyarakat.
8. Pelindungan Eksistensi Bangsa (Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa):
   Menggunakan arsip sebagai alat pemersatu dan penjaga eksistensi bangsa.
9. Sebagai Alat Bukti Hukum:
   Menyediakan arsip sebagai bukti hukum yang sah dan dapat diandalkan.

Dengan mengukur indeks kinerja Layanan Penyelenggaraan Kearsipan melalui indikator ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem kearsipan berkontribusi secara positif pada tujuan-tujuan strategis yang lebih luas. Pencapaian Layanan Penyelenggaraan Kearsipan pada Triwulan IV secara pengukuran Nasional telah berhasil mencapai predikat BB atau “Sangat Baik”. Hal ini tercantum dalam Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 Nomor Ak.01.00/23/2023 tanggal 14 Desember 2023

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen fasilitasi pimpinan, hubungan masyarakat dan administrasi pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 53. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung (Banda Lampung, tanggal 19 s.d. 20 Januari 2023)	
2.	Peresmuan Masjid Luthfi Al-Mukhlisin Solo (Surakarta, tanggal 23 s.d. 24 Januari 2023)	
3.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pancasila kepada Pimpinan dan ANggota DPRD Kota Bandung (Jakarta, tanggal 23 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Jakarta, tanggal 25 Januari 2023)	
5.	Perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili tingkat Nasional (Jakarta, tanggal 26 Januari 2023)	
6.	Bimbingan Teknis dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Jambi (Jakarta, tanggal 26 Januari 2023)	
7.	Pengangkatan 399 Purnapaskibraka sebelum tahun 2021 menjadi Duta Pancasila (Jakarta, tanggal 27 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
8.	Bimbingan Teknis Pancasila kepada Pimpinan dan ANggota DPRD Kabupaten Pasuruan (Malang, tanggal 27 s.d. 28 Januari 2023)	
9.	Perayaan Hari Imlek Nasional tahun 2023 (Jakarta, tanggal 29 Januari 2023)	
10.	Sarasehan Nasional Satu Abad Nadhlatul Ulama “Satu Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa (Jakarta, tanggal 30 Januari 2023)	
11.	Rapat Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Bandung, tanggal 30 Januari s.d. 2 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
12.	Pelantikan Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang (Semarang, tanggal 30 Januari 2023)	
13.	Konferensi Nasional 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) (Surabaya, tanggal 6 Februari 2023)	
14.	Peringatan Hari Lahir 1 Abad Nahdlatul Ulama (Surabaya, tanggal 7 Februari 2023)	
15.	Kunjungan Kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Jakarta, tanggal 8 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
16.	Rapat Koordinasi Kick-off Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, tanggal Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, tanggal KDRT dan Antisipasi bencana (Jakarta, tanggal 10 Februari 2023)	
17.	Audiensi Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) (Jakarta, tanggal 10 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
18.	Rapat Koordinasi Nasional Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Jakarta, tanggal 10 Februari 2023)	
19.	Diskusi Penguatan nilai Pancasila dan Strategi Penerapan Mata Ajar Pancasila bagi Satuan Pendidikan Formal Jenjang PAUD hingga Universitas (Pangkalpinang, tanggal 10 Februari 2023)	
20.	Dialog Gotong Royong Pembumian Pancasila (Pangkalpinang, tanggal 13 Februari 2023)	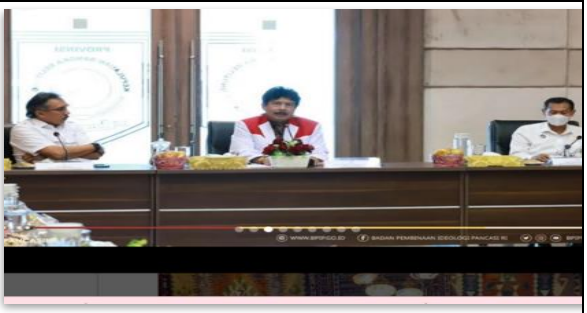
21.	Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kepada KH Yahya Cholil Staquf, tanggal Sudibyo Markus, tanggal dan Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot di UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, tanggal 13 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
22.	Dialog Kebangsaan Mewujudkan Kampus Kebangsaan (Semarang, tanggal 14 Februari 2023)	
23.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Tugas Tim Advokasi Identitas Keindonesiaan Paskibraka pada Pembentukan Paskibraka tahun 2023 di seluruh Indonesia (Jakarta, tanggal 15 Februari 2023)	
24.	Dialog Kebangsaan bersama Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, tanggal 15 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
25.	Kick-off Sosialisasi Pancasila Dalam Tindakan dengan tema “Gerakan Semesta Berencana mencegah Stunting, tanggal Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, tanggal Kekerasan dalam Rumah Tangga, tanggal serta Mengantisipasi Bencana” (Jakarta, tanggal 16 Februari 2023)	
26.	Konsultasi Pansus Raperda Internalisasi Nilai Pancasila di DPRD Kota Surakarta (Jakarta, tanggal 21 Februari 2023)	
27.	Keynote Speech Sekolah Toleransi Universitas Hindu dan UIN Syarif Hidayatullah Bali (Denpasar, tanggal 22 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	Halaqah Nasional Pengurus Pesantren se-Indonesia (Jakarta, tanggal 24 Februari 2023)	
29.	Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada Pemuka Agama Kristen (Malang, tanggal 24 Februari 2023)	
30.	Pengenalan Salam Pancasila pada Alumni Universitas Terbuka (Jakarta, tanggal 25 Februari 2023)	
31.	Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Ende (Jakarta, tanggal 27 Februari 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
32.	Sosialisasi dan Bedah Buku: Islam dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah di UIN Mataram (Sumbawa, tanggal 28 Februari 2023)	
33.	Kunjungan ke Desa Adat Bengkala, tanggal Kecamatan Kubutambahan, tanggal Kabupaten Buleleng Bali (Buleleng, tanggal 1 Maret 2023)	
34.	Focus Group Discussion Program Implementasi dan Pengkajian Pembinaan Ideologi Pancasila (Bali, tanggal 2 Maret 2023)	
35.	Mata Kuliah Program Pasca Studi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN (Jakarta, tanggal 4 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
36.	Rapat Kerja Nasional dan Konferensi Pendidikan Tinggi NU (Medan, tanggal 8 Maret 2023)	
37.	Penguatan Pancasila kepada Rektor Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia (Medan, tanggal 9 Maret 2023)	
38.	Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Diplomat Senior (Jakarta, tanggal 10 Maret 2023)	
39.	Rangkaian Jejaring Panca Mandala di Provinsi Bangka Belitung (Pangkalpinang, tanggal 12 s.d. 16 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
40.	Penyusunan Dokumen Ekonomi Pancasila (Jakarta, tanggal 14 s.d. 15 Maret 2023)	
41.	Narasumber di Radio Republik Indonesia (Pangkalpinang, tanggal 16 Maret 2023)	
42.	Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Aparatur Sipil Negara di Singkawang (Singkawang, tanggal 16 Maret 2023)	
43.	Penyusunan Produk Hukum Daerah berlandaskan Pancasila (Bali, tanggal 17 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
44.	Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang, tanggal 17 Maret 2023)	
45.	Hari Desa Nasional ke-9 (Jakarta, tanggal 19 Maret 2023)	
46.	Bimbingan Teknis Kepamongan dan Penyelenggara Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka se-Indonesia (Jakarta, tanggal 20 Maret 2023)	
47.	Diskusi Kelompok Terpumpun Penelaahan Buku Teks Utama Pancasila bagi PAUD sampai dengan SMA (Jakarta, tanggal 20 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
48.	Dialog Peluncuran Program Cukup Dua Telur Semesta Mencegah Stunting (Jakarta, tanggal 21 Maret 2023)	
49.	Diskusi Kelompok Terpumpun Pembahasan Hasil Penalaahan Paripurna Pertama Buku Teks Utama Pendidikan melalui Rapat Kerja Penelaahan Tahap II Buku Pendidikan Pancasila Jenjang SD s.d. SMA (Jakarta, tanggal 27 Maret 2023)	
50.	Ceramah Keagamaan dan Kebangsaan di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
51.	Kunjungan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Jakarta, tanggal 3 April 2023)	
52.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal (Jakarta, tanggal 3 – 6 April 2023)	
53.	Rapat Terbatas Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 5 April 2023)	
54.	Pelantikan & Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Pengarah BPIP Periode 2022-2027, beserta Rapat Pleno Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 6 April 2023)	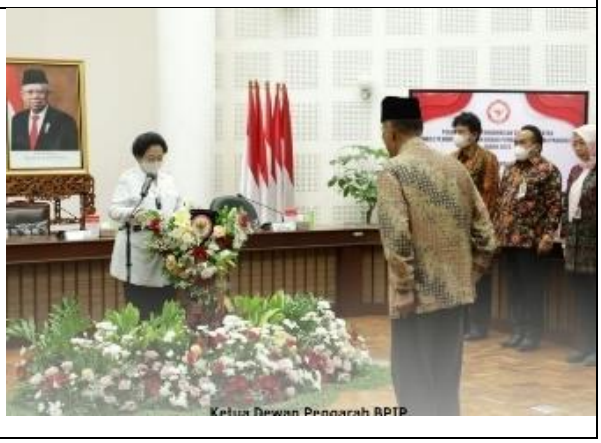

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
55.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal oleh ANRI (Jakarta, tanggal 3 – 5 Mei 2023)	
56.	Penerimaan Kunjungan Kerja Bupati Ende (Jakarta, tanggal 9 Mei 2023)	
57.	Rapat koordinasi teknis persiapan pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2023 (Jakarta, tanggal 16 Mei 2023)	
58.	Peninjauan lokasi Upacara tepatnya di Monumen Nasional (Monas) (Jakarta, tanggal 17 Mei 2023)	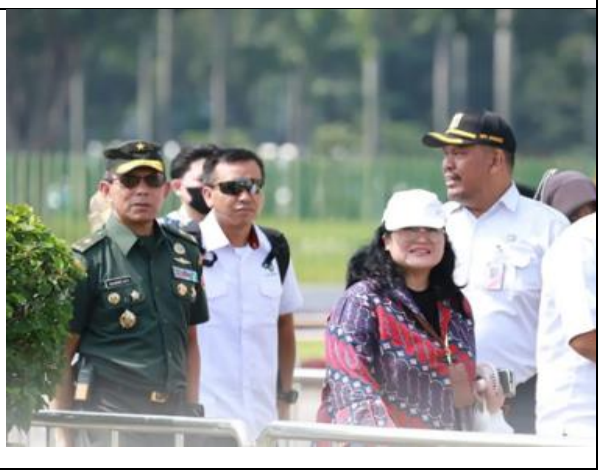

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
59.	Peluncuran 58 Judul Buku di Ruang Dwi Warna Purwa Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) (Jakarta, tanggal 20 Mei 2023)	
60.	"Dialog Kebangkitan Nasional Menuju Indonesia Raya, Sekaligus Pencanangan Penerapan Buku Pendidikan Pancasila" (Semarang, tanggal 22 Mei 2023)	
61.	Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Jakarta, tanggal 23 Mei 2023)	
62.	Pembahasan instrumen Kearsipan dan Pedoman Kearsipan dengan ANRI terkait Produk Hukum yang berlaku di BPIP (Jakarta, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
63.	Rapat Terbatas Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 23 Mei 2023)	
64.	Rapat Pleno Unsur Pimpinan (Jakarta, tanggal 24 Mei 2023)	
65.	Personel Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 menggelar Latihan Gabungan di lapangan Monumen Nasional (Jakarta, tanggal 26 Mei 2023)	
66.	Talkshow dengan tema "Peduli Politik dan *Bonum Commune*" (Kupang, tanggal 28 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
67.	Gladi Bersih sekaligus meninjau lokasi Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 30 Mei 2023)	
68.	Konferensi Pers menjelang Hari Lahir Pancasila (Jakarta, tanggal 31 Mei 2023)	
69.	Pameran Bulan Bung Karno bertajuk “Dengan Semangat Kemandirian Ekonomi Kita Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Jakarta, tanggal 1 Juni 2023)	
70.	Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023 dengan mengusung tema “Gebyar Budaya dan Syiar Agama, Galuh Eunder” (Ciamis, tanggal 4 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
71.	Pertemuan/Silaturahmi dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Jakarta, tanggal 12 Juni 2023)	
72.	Konsinyering Pengawasan Kearsipan Internal (Jakarta, tanggal 12 s.d. 14 Juni 2023)	
73.	Rapat Koordinasi Persiapan Hari Keluarga Nasional dengan BKKBN (Jakarta, tanggal 14 Juni 2023)	
74.	Talkshow dengan tema 'Gotong royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global (Jakarta, tanggal 21 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
75.	Kunjungan kerja ke BKN (Jakarta, tanggal 27 Juni 2023)	
76.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Dewan Pengarah (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari-Desember Tahun 2023)	
77.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Kepala (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari-Desember Tahun 2023)	
78.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Wakil Kepala (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari-Desember Tahun 2023)	

No.	Kegiatan, tanggal Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
79.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Staf Khusus (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari-September)	
80.	Pendampingan Kegiatan Unsur Pimpinan- Dewan Pakar (Protokol, Tata Usaha, dan Peliputan) (Januari-Desember Tahun 2023)	

F.5. Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 54. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	1	1	100% (Dokumen)
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP	2,5	2,9	116% (Penilaian Tim BPKP)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode tahun 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%.

Biro Pengawasan Internal telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan diantaranya Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, dan Monitoring (pemantauan) Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan BPIP, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Capaian indikator kinerja kegiatan pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada indikator kinerja kegiatan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti memiliki capaian dengan persentase 100%. (sejumlah 78 rekomendasi dari 81 rekomendasi) Sedangkan nilai tingkat SPIP telah mencapai 100% dari target yakni perolehan nilai SPIP 2,9 dari target 2,5 oleh Tim BPKP. Biro Pengawasan Internal telah melaksanakan mandat

pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai.

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen pengawasan internal pada Tahun 2023 adalah adalah:

Tabel 2. 55. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Pembahasan dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Biro Pengawasan Internal Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 3 Januari s.d. 11 Januari 2023).	
2.	Bimbingan Teknis Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi TA 2021 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 9 Januari s.d. 10 Januari 2023).	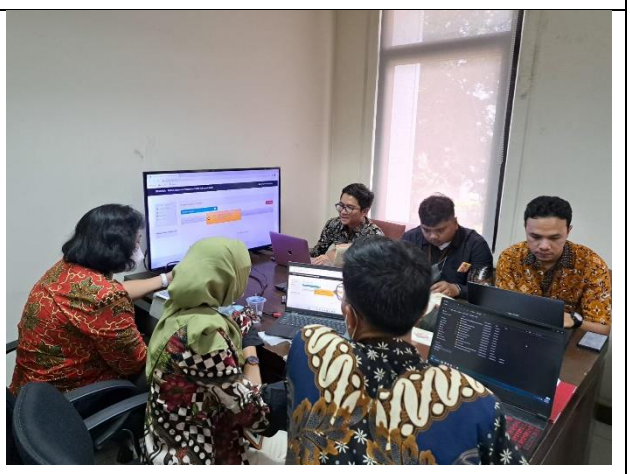

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
3.	*Entry Meeting* atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 10 Januari 2023).	
4.	Pelaksanaan Reviu Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila TA 2022 (Jakarta, tanggal 14 s.d. 23 Februari 2023).	
5.	Rapat Monitoring Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas Persetujuan Pengangkatan JFA yang Terbit Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 20 Februari 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
6.	Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dan Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 22 s.d. 24 Februari 2023).	
7.	Koordinasi dan Pendampingan Tim Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 28 Februari s.d. 20 April 2023).	
8.	Rapat Penajaman Keluaran Proritas Sismonev KSP Tahun 2023 dan Pengelolaan Kinerja Organisasi di Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2023)	
9.	Kegiatan Diskusi dan Pembahasan RB Tematik bagi BPIP, Penyusunan Rencana Kerja SPBE BPIP dan Harmonisasi Rancangan Peraturan BPIP (Karawang, tanggal 7 s.d. 10 Maret 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
10.	Pelatihan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Ciawi tanggal 12 s.d. 18 Maret 2023).	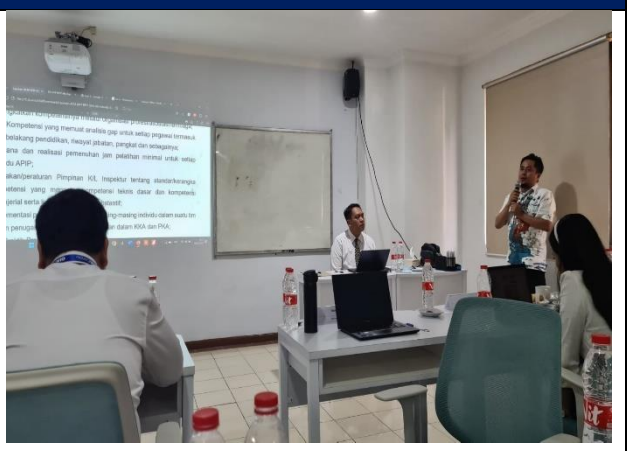
11.	Rapat Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 17 s.d. 20 Maret 2023).	
12.	Rapat Penyampaian Hasil Pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Jakarta, tanggal 28 s.d. 31 Maret 2023).	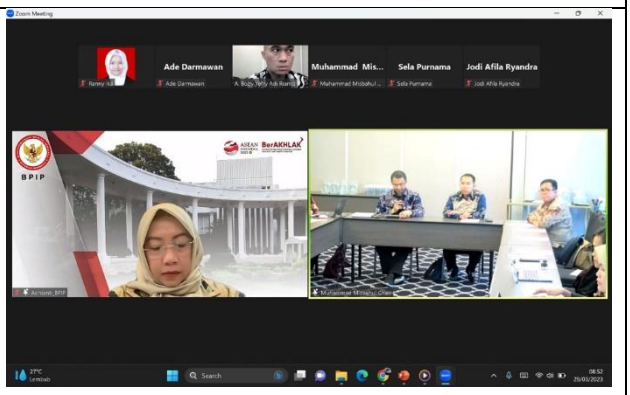

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
13.	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPIP (Bogor, tanggal 3 s.d. 6 April 2023).	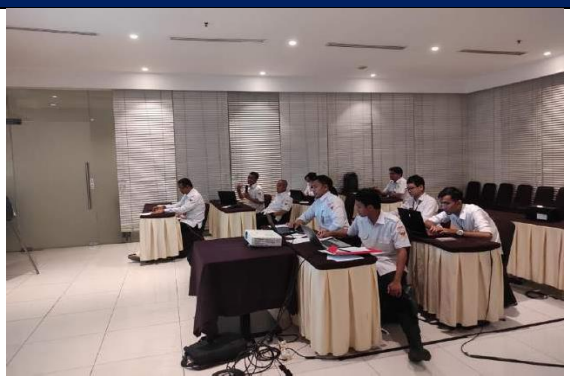
14.	Kegiatan Rapat Kerja Persiapan, Penguatan, dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Biro Pengawasan Internal BPIP Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 12 s.d. 16 April 2023).	
15.	Rapat Koordinasi Penilaian Risiko K3HKP pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan BPIP Tahun 2023 dan Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (Jakarta, tanggal 17 s.d. 19 April 2023).	
16.	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 5 s.d. 18 April 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi *Internal Audit Capability Model* Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 17 s.d. 20 Mei 2023).	
18.	Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan SPI Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 21 s.d. 23 Mei 2023).	
19.	Kegiatan Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP secara *E-learning* (Daring, tanggal 5 s.d. 19 Juni 2023).	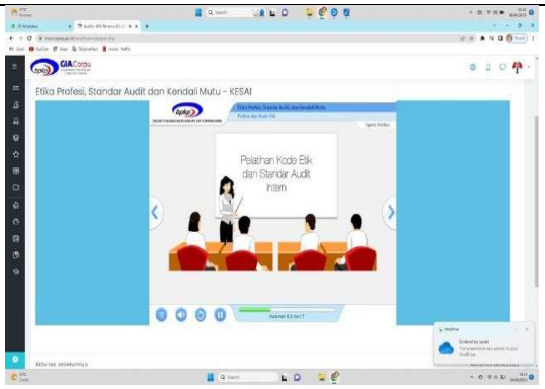
20.	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 6 s.d. 10 Juni 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Rapat *Exit Meeting* Tim Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPIP Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 8 Juni 2023).	
22.	Pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BPIP (Jakarta tanggal 13 s.d. 16 Juni 2023).	
23.	Rapat Teknis Audit TIK dan Migrasi Server ke PDN Dalam Rangka Penguatan SPBE BPIP pada Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP (Malang, tanggal 13 s.d. 16 Juni 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Rapat Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN serta Identifikasi *Area of Improvement* di Lingkungan BPIP (Ciawi tanggal 19 s.d. 23 Juni 2023).	
25.	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BPIP Tahun 2023 (Bekasi, tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023).	
26.	Mengikuti Konferensi Auditor Internal Building Resilience In Tuna World: "*Control Your Future Or Someone Else Will*" Oleh Yayasan Pendidikan Internal Auditor Dan Koordinasi Penggunaan Aplikasi Risk Management Information System (RMIS) pada BPKP Perwakilan Yogyakarta (Yogyakarta, tanggal 4 s.d. 8 Juli 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
27.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Semester I Tahun Anggaran 2023 (Jakarta, tanggal 13 s.d. 15 Juli 2023).	
28.	Kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Awal Rancangan Peraturan BPIP tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan BPIP (Purwokerto, tanggal 23 s.d. 26 Juli 2023).	
29.	Kegiatan Forum Diskusi Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Semarang, tanggal 7 s.d. 11 Agustus 2023).	
30.	*Benchmarking* Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) pada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat (Bandung, tanggal 8 s.d. 11 Agustus 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tim Pendamping Kegiatan Sosialisasi Pancasila Tahun 2022 pada 27 titik lokasi (Jakarta, tanggal 15 Agustus s.d. 1 September 2023).	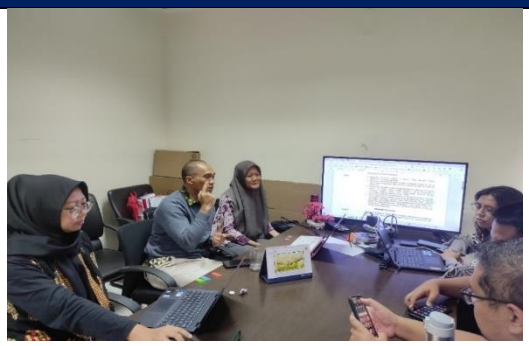
32.	*Entry Meeting* Pemeriksaan Kinerja Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (Jakarta, tanggal 18 Agustus 2023).	
33.	Konsinyering Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPIP Tahun 2022 (Jakarta, tanggal 4 s.d. 7 September 2023).	
34.	Rapat Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 18 September 2023).	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
35.	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP secara tatap muka (Bogor, tanggal 7 s.d. 14 September 2023).	
36.	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 8 s.d. 22 September 2023).	
37.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024 (Jakarta, tanggal 2 s.d. 20 Oktober 2023)	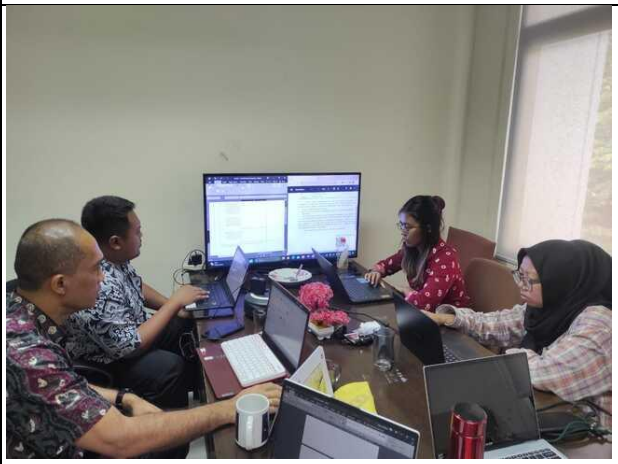

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
38.	Kegiatan Konsinyering Reviu Rencana Kerja Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Pagu Alokasi Anggaran) Tahun Anggaran 2024 (Cirebon, tanggal 17 s.d. 21 Oktober 2023)	
39.	Audit Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2023 (Jakarta tanggal 14 Noember s.d. 7 Desember 2023)	
40.	Rapat Kerja Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPIP Tahun 2023 (Bandung, tanggal 24 s.d. 28 Oktober 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
41.	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 1 s.d. 15 Desember 2023)	
42.	Konsinyering Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Triwulan IV Tahun 2023 (Jakarta pada tanggal 14 s.d. 17 Desember 2023)	
43.	Konsinyering pelaksanaan reviu dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan BPIP TW III TA 2023 (Jakarta, tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023)	

F.6. Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi Pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 56. Indikator Keluaran Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN *OUTPUT* (RO)	TARGET	CAPAIAN	KET
Tingkat maturitas SPBE/ layanan data dan informasi	Layanan Data dan Informasi	1	100%	100% (Layanan)

Perhitungan kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi adalah periodisasi waktu pelayanan yang dilakukan selama 12 bulan (satu tahun) dan pelaporan-pelaporan yang diberikan setiap bulannya kepada instansi pembina. Hingga akhir periode tahun 2023 telah terlaksana layanan selama 12 bulan dari 12 bulan yang dimana jika dipersentasikan adalah sebesar 100%. Berikut adalah Layanan yang telah diberikan Pusat Data dan Teknologi sampai dengan :

Di tahun 2023 ini, Pusat Data dan Teknologi Informasi, telah melakukan migrasi server Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada akhir tahun 2023 guna mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta menunjang kinerja di lingkungan BPIP. berikut adalah rincian-nya :

a. Pemanfaatan Kapasitas

Kapasitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Pusat Data Nasional saat ini adalah sebesar 619 GHz CPU, 1 TB Memory, 48.1 TB Storage. Seperti pada tangkapan layar berikut ini;

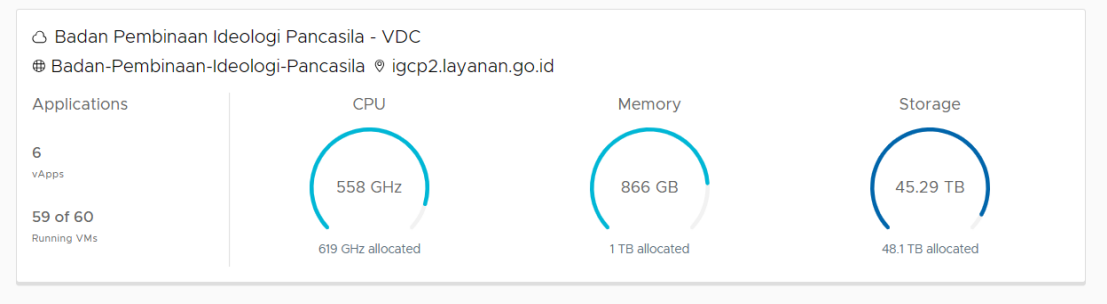

Pemanfaatan terdiri dari 6 vApps dan 60 VMs

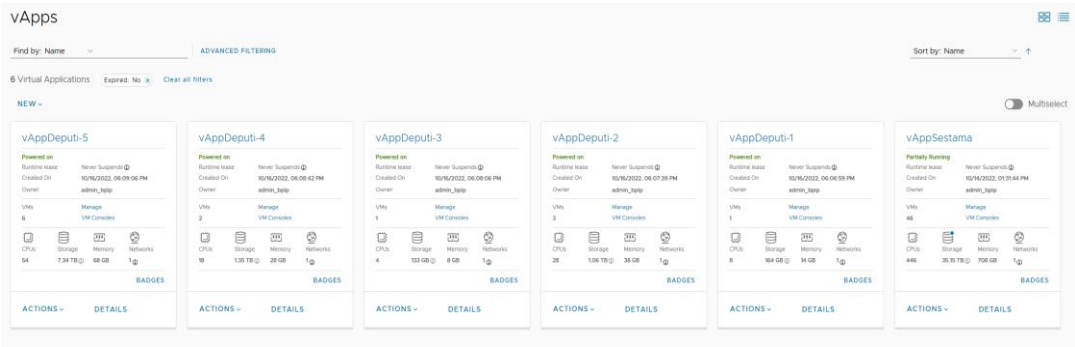

b. Pemindahan Konfigurasi *Website* dan Penunjang-nya

Untuk Konfigurasi IP Publik Pusat Data Nasional, saat ini sudah di hosting mengarah ke IP Publik Kementerian Kominfo selaku pengelola Pusat Data Nasional dengan detail:

1. Portal *Website* Utama BPIP (https://bpip.go.id) menggunakan IP Publik 103.16.48.35 seperti pada tangkapan layar berikut:

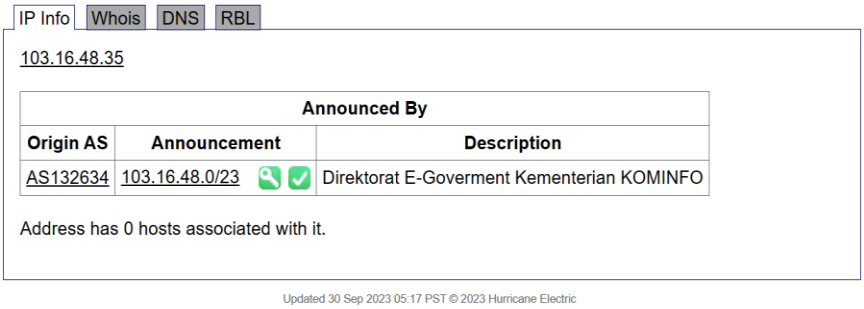

IP Info | Whois | DNS | RBL

103.16.48.35

Announced By		
Origin AS	Announcement	Description
AS132634	103.16.48.0/23	Direktorat E-Goverment Kementerian KOMINFO

Address has 0 hosts associated with it.

Updated 30 Sep 2023 05:17 PST © 2023 Hurricane Electric

2. Portal *Website* lain BPIP menggunakan IP Publik 103.6.34.88 seperti pada tangkapan layar berikut:

Zone Records for "bpip.go.id"

103.6.34.88

Filter: All A CNAME MX TXT

Displaying 1 to 45 out of 45 items

Actions | Save All Records | + Add Record

Name	TTL	Type	Record	Actions
ppid.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
data.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
testsso.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
testapi.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
testapi-simpeg.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
testsimpeg.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
sso.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
api.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
api-siatap.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
siatapv2.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
manrisk.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
paskibraka.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
dppi.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
lms.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete
helpdesk.bpip.go.id.	14400	A	103.6.34.88	Edit Delete

IP Info | Whois | DNS | RBL

103.6.34.88

Announced By		
Origin AS	Announcement	Description
AS132634	103.6.34.0/24	Direktorat E-Goverment Kementerian KOMINFO

Address has 0 hosts associated with it.

Updated 30 Sep 2023 05:17 PST © 2023 Hurricane Electric

c. Selama tahun 2023 *website* utama BPIP https://bpip.go.id telah dikunjungi sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini:

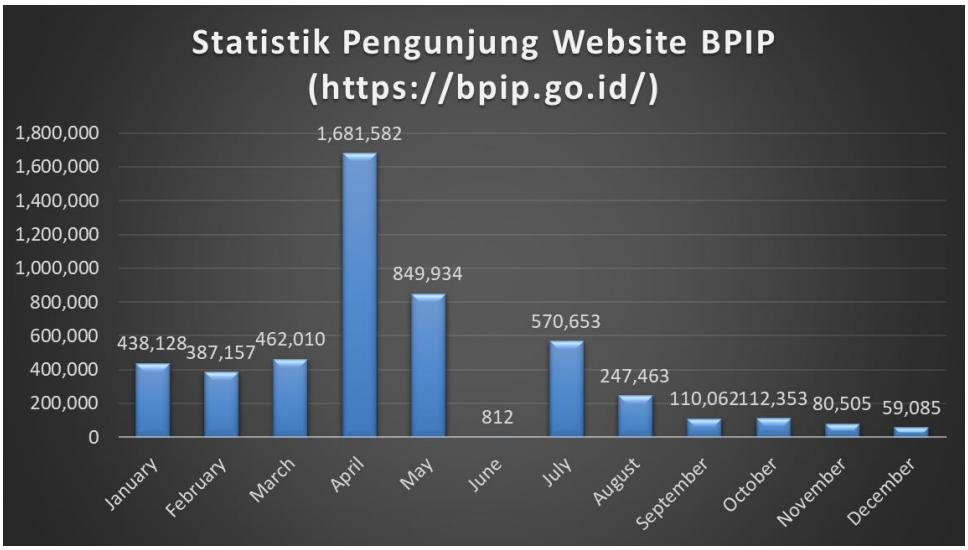

Dari grafik tersebut terlihat traffic pengunjung *website* utama BPIP. Namun di bulan Juni 2023 terjadi banyak serangan Deface Slot Gacor pada *website* portal BPIP yang menyebabkan semua website yang berada di bawah domain https://bpip.go.id sempat hilang dari mesin pencari Google. Solusi dari kejadian tersebut, telah dilakukan hardening *website* dan pembaruan framework *website*, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran ulang domain https://bpip.go.id ke Google untuk bisa muncul kembali di daftar pencarian.

d. Daftar *Website* yang sudah di lakukan Migrasi ke Pusat Data Nasional Untuk Daftar Website yang sudah dilakukan Migrasi ke Pusat Data Nasional adalah sebagai berikut:

Sudah di PDN	
Nama Website	**Domain/Subdomain**
Portal *Website* Utama BPIP	https://bpip.go.id
Portal JDIH BPIP	https://jdih.bpip.go.id
Portal Paskibraka BPIP	https://paskibraka.bpip.go.id
Single Sign On BPIP	https://sso.bpip.go.id
Portal Intra BPIP	https://intra.bpip.go.id
Portal Kepegawaian (Siatap)	https://siatapv2.bpip.go.id
Portal Sistem Jurnal Kinerja	https://sijuki.bpip.go.id
Portal Daftar Hadir BPIP	https://daftarhadir.bpip.go.id
Portal API (*Application Programming Interface*) BPIP	https://api.bpip.go.id
Portal Satu Data BPIP	https://data.bpip.go.id
Portal BPIP-CSIRT	https://csirt.bpip.go.id
Portal Layanan Aduan BPIP / *Helpdesk* BPIP	https://helpdesk.bpip.go.id
Portal Duta Pancasila Purna Paskibraka BPIP	https://dppi.bpip.go.id

Portal Layanan Aset BPIP	https://glpi.bpip.go.id
Portal Kedeputian Bidang Diklat BPIP	https://diklat.bpip.go.id
Portal Sistem Perjalanan Dinas BPIP	https://siperjadin.bpip.go.id
Portal Manajemen Risiko SPBE BPIP	https://manrisk.bpip.go.id
Portal Audit Elektronik BPIP	https://e-audit.bpip.go.id
Portal Layanan SPBE terpadu BPIP	https://spbe.bpip.go.id
Portal Sistem Pembentukan Produk Hukum BPIP	https://snipper.bpip.go.id
Portal Hari Lahir Pancasila	https://harlahpancasila.bpip.go.id
Portal layanan Sarana Prasarana BPIP	https://sarpras.bpip.go.id
Portal Rapat Kerja BPIP	https://raker.bpip.go.id
Portal *Storage* / *Cloud* Baru BPIP	https://files.bpip.go.id
Portal Sistem Sasaran Kinerja Pegawai BPIP	https://skp.bpip.go.id
Portal Gerakan Gotong Royong Percepatan Penurunan Angka Stunting BPIP	https://graktops.bpip.go.id
Portal Layanan Uji Kompetensi Calon Purna Paskibraka BPIP	https://perisai.bpip.go.id
Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIP	https://ppid.bpip.go.id
Portal Ikon Prestasi Pancasila BPIP versi Baru	https://ikonv2.bpip.go.id
Portal *Backend* Kehadiran Pegawai BPIP	https://absensi.bpip.go.id

Portal *Frontend* Kehadiran Pegawai BPIP	https://presensi2.bpip.go.id

e. Proses *Backup Data* VMs BPIP di Pusat Data Nasional

Proses Backup Data VMs merupakan hal yang penting guna melindungi data dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari pada seluruh VMs BPIP di Pusat Data Nasional. Bekerja sama dengan pengelola Pusat Data Nasional BPIP telah melaksanakan proses backup VMs seperti pada tangkapan layar berikut:

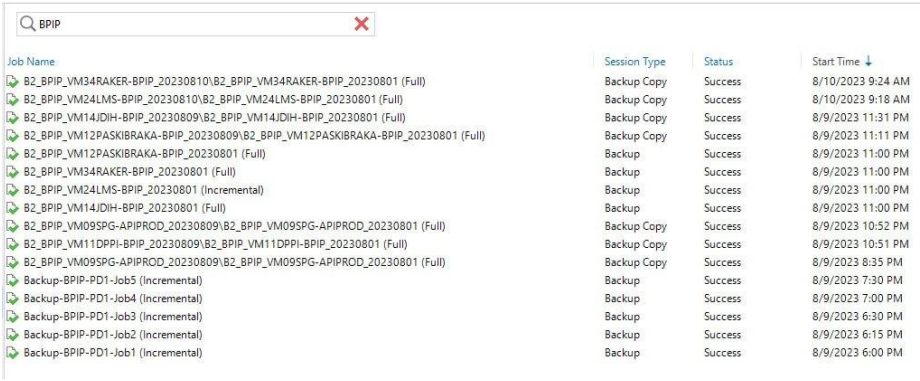

BPIP

Job Name	Session Type	Status	Start Time
B2_BPIP_VM34RAKER-BPIP_20230810\B2_BPIP_VM34RAKER-BPIP_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/10/2023 9:24 AM
B2_BPIP_VM24LMS-BPIP_20230810\B2_BPIP_VM24LMS-BPIP_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/10/2023 9:18 AM
B2_BPIP_VM14JDIH-BPIP_20230809\B2_BPIP_VM14JDIH-BPIP_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/9/2023 11:31 PM
B2_BPIP_VM12PASKIBRAKA-BPIP_20230809\B2_BPIP_VM12PASKIBRAKA-BPIP_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/9/2023 11:11 PM
B2_BPIP_VM12PASKIBRAKA-BPIP_20230801 (Full)	Backup	Success	8/9/2023 11:00 PM
B2_BPIP_VM34RAKER-BPIP_20230801 (Full)	Backup	Success	8/9/2023 11:00 PM
B2_BPIP_VM24LMS-BPIP_20230801 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 11:00 PM
B2_BPIP_VM14JDIH-BPIP_20230801 (Full)	Backup	Success	8/9/2023 11:00 PM
B2_BPIP_VM09SPG-APIPROD_20230809\B2_BPIP_VM09SPG-APIPROD_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/9/2023 10:52 PM
B2_BPIP_VM11DPPI-BPIP_20230809\B2_BPIP_VM11DPPI-BPIP_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/9/2023 10:51 PM
B2_BPIP_VM09SPG-APIPROD_20230809\B2_BPIP_VM09SPG-APIPROD_20230801 (Full)	Backup Copy	Success	8/9/2023 8:35 PM
Backup-BPIP-PD1-Job5 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 7:30 PM
Backup-BPIP-PD1-Job4 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 7:00 PM
Backup-BPIP-PD1-Job3 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 6:30 PM
Backup-BPIP-PD1-Job2 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 6:15 PM
Backup-BPIP-PD1-Job1 (Incremental)	Backup	Success	8/9/2023 6:00 PM

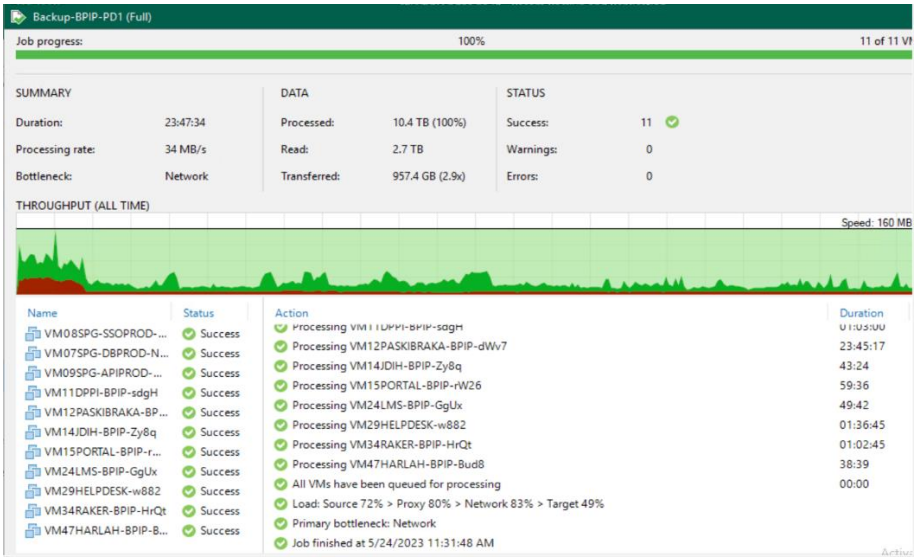

Backup-BPIP-PD1 (Full)

Job progress: 100% 11 of 11 VM

SUMMARY		DATA		STATUS	
Duration:	23:47:34	Processed:	10.4 TB (100%)	Success:	11
Processing rate:	34 MB/s	Read:	2.7 TB	Warnings:	0
Bottleneck:	Network	Transferred:	957.4 GB (2.9x)	Errors:	0

THROUGHPUT (ALL TIME) Speed: 160 MB

Name	Status
VM08SPG-SSOPROD-...	Success
VM07SPG-DBPROD-N...	Success
VM09SPG-APIPROD-...	Success
VM11DPPI-BPIP-sdgH	Success
VM12PASKIBRAKA-BP...	Success
VM14JDIH-BPIP-Zy8q	Success
VM15PORTAL-BPIP-r...	Success
VM24LMS-BPIP-GgUx	Success
VM29HELPDESK-w882	Success
VM34RAKER-BPIP-HrQt	Success
VM47HARLAH-BPIP-B...	Success

Action	Duration
Processing VM11DPPI-BPIP-sdgH	01:05:00
Processing VM12PASKIBRAKA-BPIP-dWv7	23:45:17
Processing VM14JDIH-BPIP-Zy8q	43:24
Processing VM15PORTAL-BPIP-rW26	59:36
Processing VM24LMS-BPIP-GgUx	49:42
Processing VM29HELPDESK-w882	01:36:45
Processing VM34RAKER-BPIP-HrQt	01:02:45
Processing VM47HARLAH-BPIP-8ud8	38:39
All VMs have been queued for processing	00:00
Load: Source 72% > Proxy 80% > Network 83% > Target 49%	
Primary bottleneck: Network	
Job finished at 5/24/2023 11:31:48 AM	

Aktivitas dan foto dokumentasi dalam rangka capaian kinerja pelaksanaan manajemen data dan informasi pada Tahun 2023 adalah:

Tabel 2. 57. Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
1.	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Information Technology Security Assessment (ITSA) pada Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP (Jakarta, tanggal 5 s.d. 7 Januari 2023)	
2.	Kegiatan Persiapan Pembentukan CSIRT Organisasi Sektor Pemerintah Pusat Tahun 2023 (Jakarta, tanggal 16 Januari 2023)	
3.	Kegiatan Strategi Pengelolaan Jaringan Intra Instansi, Pemanfaatan Layanan PDN serta Penguatan Pengelolaan Aset TIK di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta, tanggal 19 Januari)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
4.	Rapat Koordinasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BPIP (Jakarta, tanggal 17 Maret 2023)	
5.	Kunjungan Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta (Surakarta, tanggal 22 s.d. 25 Januari 2023)	
6.	Rapat Persiapan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Program Paskibraka (Jakarta, 20 Januari 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
7.	Workshop Analisis Kebutuhan Sistem Informasi INTRA BPIP (Jakarta, tanggal 9 s.d. 11 Februari 2023)	
8.	Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Manajemen SPBE dan Workshop Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi INTRA BPIP (Jakarta, tanggal 13 s.d. 17 Februari 2023)	
9.	Workshop Simulasi Internal Sistem Informasi INTRA BPIP dan Implementasi Manajemen Layanan SPBE (Jakarta, tanggal 27 s.d. 28 Februari 2023)	
10.	Kunjungan Kerja Tata Laksana Manajemen SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat, tanggal 1 s.d. 4 Maret 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
11.	Diskusi dan Pembahasan Reformasi Birokrasi Tematik bagi BPIP dan Penyusunan Rencana Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPIP (Jakarta, 7 s.d. 10 Maret 2023)	
12.	Strategi Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Jakarta, tanggal 13 s.d. 18 Maret 2023)	
13.	Kegiatan Workshop Pengembangan Sistem Informasi Digital Signature BPIP dan Simulasi Internal Sistem Informasi Digital Signature BPIP Serta Pengembangan Aplikasi Layanan SPBE (Jakarta, tanggal 28 Maret s.d. 1 April 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
14.	Penyusunan Konsep Awal Arah Kebijakan PIP, Persiapan Penilaian JDIH Awards dan Pengembangan JDIH BPIP, dan Penerjemahan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dalam Bahasa Inggris (Jakarta, tanggal 2 s.d. 6 Mei 2023)	
15.	Pelatihan *Cyber Security Fundamental* (Jakarta, tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023)	
16.	*Workshop* Bimbingan Teknis Sistem Informasi SIATAP v2 BPIP dan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Sistem Informasi *Digital Signature* dan Daftar Hadir Rapat BPIP (Jakarta, tanggal 19 s.d. 20 Mei 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
17.	Rapat Koordinasi Asistensi Penilaian Mandiri SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 23 s.d. 26 Mei 2023)	
18.	Pelatihan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi di lingkungan BPIP di PT. Inixindo Widya Iswara Nusantara (Jakarta, tanggal 4 s.d. 8 Juni 2023)	
19.	Kegiatan Penguatan dan Pembinaan CSIRT Sektor Pemerintahan (Jakarta, tanggal 8 s.d. 9 Juni 2023)	
20.	Rapat Teknis Audit TIK dan Migrasi Server ke PDN Dalam Rangka Penguatan SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 13 s.d. 16 Juni 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
21.	Rapat Teknis Audit Kegiatan Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Mandiri SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023)	
22.	*Grand Launching* JDIH *Mobile App* (Jakarta, tanggal 3 s.d. 5 Juli 2023	
23.	Kegiatan Asistensi Penerapan PeraturanBidang Keamanan Siber Dan Sandi (Jakarta, tanggal 6 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
24.	Kunjungan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya (Jawa Timur, tanggal 13 s.d. 15 Juli 2023	
25.	Kegiatan Penetapan Hasil Evaluasi Mandiri SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 14 Juli 2023)	
26.	Rapat Asistensi Pembentukan dan Tools Pendukung CSIRT BPIP (Jakarta, tanggal 16 s.d 19 Juli 2023)	
27.	Rapat Koordinasi Teknis Antar Unit Kerja Dalam Rangka Optimalisasi Penerapan SPBE (Jakarta, tanggal 25 s.d 29 Juli 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
28.	*Launching Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Sektor Pemerintah Pusat di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Jakarta, tanggal 31 Juli s.d. 1 Agustus 2023)	
29.	Optimalisasi Kinerja Berbasis Digital dan Keamanan Siber pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Yogyakarta, tanggal 28 Agustus s.d. 1 September 2023)	
30.	*Benchmarking* Optimalisasi Keamanan Informasi SPBE di Kota Surabaya (Jawa Timur, tanggal 13 s.d. 15 September 2023	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
31.	Kegiatan Strategi Pengumpulan Data Statistik Sektoral di BPIP dan Implementasi Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2023)	
32.	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Aristektur Aplikasi dan Arsitektur SPBE BPIP (Jakarta, tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2023)	
33.	Workshop Penyusunan Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi (SDLC) dengan SCRUM (Jakarta, tanggal 2 s.d. 4 November 2023)	

No.	Kegiatan, Tempat dan Tanggal	Dokumentasi Kegiatan
34.	Kegiatan Asistensi Indeks KAMI, Penyusunan SMKI BPIP, dan Workshop IntraBPIP versi Android (Jakarta, tanggal 8 s.d. 11 November 2023)	
35.	Evaluasi Tahun 2023 dan Rencana dan Inovasi Tahun 2024 Pusat Data dan Teknologi Informasi BPIP (Jakarta, tanggal 29 November s.d. 2 Desember 2023)	

BAB III REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Tahun Anggaran 2023 BPIP mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp347.841.015.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima belas ribu rupiah). Anggaran digunakan mendukung 2 Program, yaitu:

a. Program PIP, sebesar Rp158.260.955.000,00;
b. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp189.580.060.000,00.

Realisasi Anggaran hingga 30 September 2023 (sumber: aplikasi SAKTI) adalah:

Realisasi Anggaran Total:

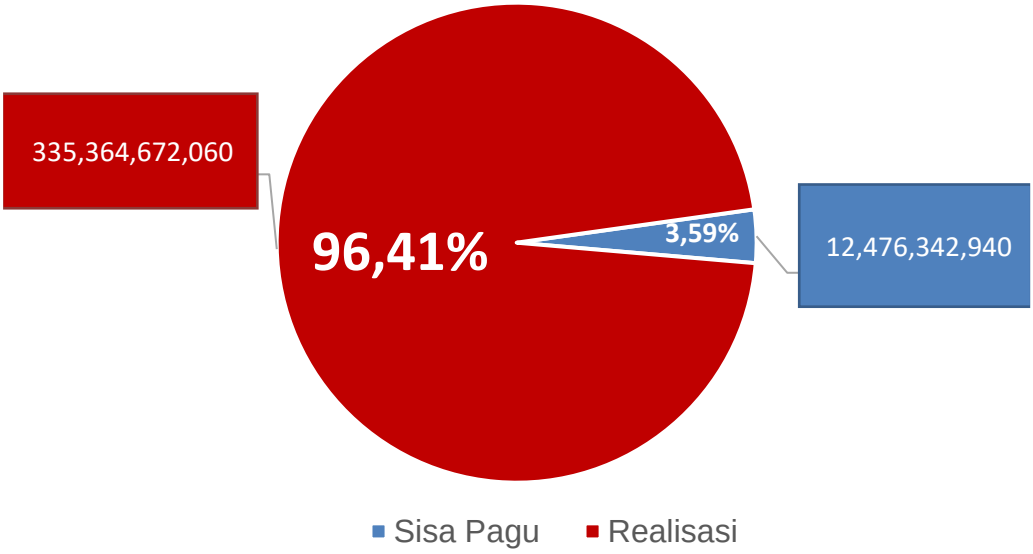

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Total

Realisasi anggaran per program:

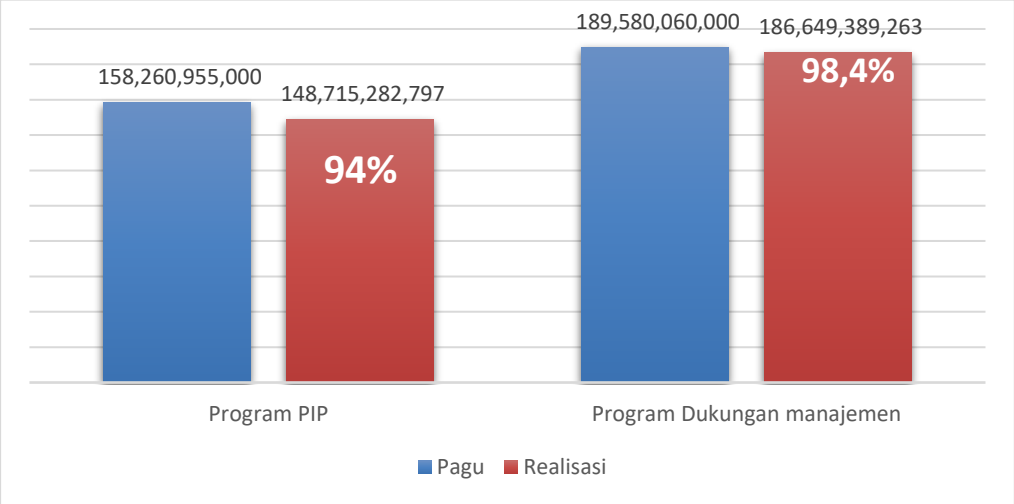

Gambar 3.2 Realisasi Anggaran per Program

Adapun realisasi anggaran berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
Sekretariat Utama		**189,580,060,000**	**186,649,389,263**	**98.45%**	**2,930,670,737**
1	Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	25,017,500,000	24,727,517,035	98.84%	289,982,965
2	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	134,445,018,000	132,238,103,346	98.36%	2,206,914,654
3	Biro Perencanaan dan Keuangan	6,320,000,000	6,162,863,371	97.51%	157,136,629
4	Biro Hukum dan Organisasi	12,150,000,000	12,017,023,149	98.91%	132,976,851
5	Biro Pengawasan Internal	3,743,090,000	3,691,832,762	98.63%	51,257,238
6	Pusat Data dan Informasi	7,904,452,000	7,812,049,600	98.83%	92,402,400
Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan		**70,747,696,000**	**65,886,990,690**	**93.13%**	**4,860,705,310**
1	Direktorat Hubungan antar Lembaga dan Kerja Sama	7,333,783,000	7,212,259,004	98.34%	121,523,996

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	SISA DANA
2	Direktorat Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	51,513,928,000	46,931,553,292	91.10%	4,582,374,708
3	Direktorat Pembudayaan	11,899,985,000	11,743,178,394	98.68%	156,806,606
Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi		**13,809,458,000**	**13,438,111,997**	**97.31%**	**371,346,003**
1	Direktorat Analisis dan Sinkronisasi	5,109,437,000	4,976,674,929	97.40%	132,762,071
2	Direktorat Advokasi	4,128,590,000	4,079,135,645	98.80%	49,454,355
3	Direktorat Pelembagaan dan Rekomendasi	4,571,431,000	4,382,301,423	95.86%	189,129,577
Deputi Bidang Pengkajian Materi		**15,404,304,000**	**15,195,563,809**	**98.64%**	**208,740,191**
1	Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,646,941,000	4,595,684,904	98.90%	51,256,096
2	Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	4,204,676,000	4,189,797,177	99.65%	14,878,823
3	Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	6,552,687,000	6,410,081,728	97.82%	142,605,272
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan		**22,374,867,000**	**20,429,777,923**	**91.31%**	**1,945,089,077**
1	Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	4,333,228,000	4,274,097,066	98.64%	59,130,934
2	Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan	4,664,351,000	4,526,727,844	97.05%	137,623,156
3	Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	13,377,288,000	11,628,953,013	86.93%	1,748,334,987
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi		**35,924,630,000**	**33,764,838,378**	**93.99%**	**2,159,791,622**
1	Direktorat Pengendalian	32,160,116,000	30,227,135,056	93.99%	1,932,980,944
2	Direktorat Evaluasi	3,764,514,000	3,537,703,322	93.98%	226,810,678
TOTAL		**347,841,015,000**	**335,364,672,060**	**96.41%**	**12,476,342,940**

BAB IV EVALUASI DAN UPAYA PERBAIKAN

Bab ini merupakan hasil evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi unit kerja dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan. Terhadap kendala tersebut dilakukan upaya tindaklanjut. Usulan rekomendasi merupakan upaya perbaikan guna peningkatan kinerja di waktu mendatang. Kendala dan tindak lanjut atau rekomendasi atau usulan perbaikan dikelompokan per sasaran program, yaitu:

1. **Kendala dan rekomendasi terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP**

   Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan program, yaitu:

Tabel 4. 1. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya hubungan antar lembaga, kerja sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase penilaian atas efektivitas HAL dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	1. Masih Kurangnya SDM 2. Tidak ada penanggungjawab yang jelas untuk Kerja Sama yang telah ditandatangani 3. Belum optimalnya pemanfaatan saran komunikasi antar lembaga 4. Belum optimalnya pemanfaatan saran komunikasi antar lembaga	1. Memaksimalkan SDM yang tersedia. 2. Membuka jaringan komunikasi dengan mitra kerja sama BPIP 3. Melakukan sinkronisasi berupa penyusunan rencana aksi nyata kerja sama dengan mitra kerja BPIP 4. Menggunakan semua media/sarana komunikasi dalm melakukan komunikasi dengan lembaga 5. Menyusun ulang rencana kegiatan untuk mengejar IKP dan IKU 6. Melakukan kegiatan secara daring

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritras yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah kerja sama 2. Belum adanya sinkronisasi antara program BPIP dengan unit kerja teknis pelaksana 3. Belum adanya tanggung jawab dari pengurus kerja sama dalam menyusun rencana aksi 4. Belum adanya anggaran yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang pra dan pasca penyusunan kerja sama	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah kerja sama. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana 3. Memfasilitasi pertemuan antara pengusul dengan mitra kerja sama BPIP 4. Perlunya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pra dan pasca kerja sama
Persentase rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga tinggi negara, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang non prioritas yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kesepahaman dalam melakukan mekanisme penyusunan naskah kerja sama 2. Belum adanya sinkronisasi antara program BPIP dengan unit kerja teknis pelaksana 3. Belum adanya tanggung jawab dari pengurus kerja sama dalam menyusun rencana aksi 4. Belum adanya anggaran yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang pra dan pasca penyusunan kerja sama	1. Menyusun NSPK terkait petunjuk teknis mekanisme penyusunan naskah kerja sama. 2. Penyusunan perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh Unit kerja teknis pelaksana 3. Memfasilitasi pertemuan antara pengusul dengan mitra kerja sama BPIP 4. Perlunya anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan pra dan pasca kerja sama
Persentase konten sosialisasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya penyusunan dan kajian komprehensif tentang materi Sosialisasi PIP 2. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia administrasi dan kegiatan teknis.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase strategi komunikasi terhadap isu PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum adanya kajian komprehensif tentang strategi komunikasi PIP 2. Belum adanya instrument khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Jangka waktu kontrak yang panjang pada pelaksanaan kegiatan di media online 4. Jumlah personil pendukung terbatas	1. Perlu dilakukan kajian komprehensif tentang strategi komunikasi dengan melibatkan pakar, praktisi, dan akademisi, serta publik 2. Belum adanya instrument khusus untuk mengetahui jangkauan pemberitaan, jangkauan program radio, dan rating program BPIP pada media televisi 3. Dilakukan beberapa mekanisme/tahapan kontrak secara termin 4. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang membantu pelaksanaan administrasi dan kegiatan teknis.
Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan jaringan yang diselesaikan	Proses pemindahan POK	Kegiatan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Jaringan dilakukan mekanisme pengajuan kepada unit kerja Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi
Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila	1. Sangat minimnya anggaran dibanding dengan pencapaian *output* kinerja 2. *Refocusing* dan pagu blokir anggaran 3. Kurangnya SDM pada direktorat	Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga SDM
Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis pemantapan pranata	1. Sangat minimnya anggaran dibanding dengan pencapaian *output* kinerja 2. *Refocusing* dan pagu blokir anggaran 3. Kurangnya SDM pada direktorat	1. Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		SDM 2. Melaksanakan FGD secara daring dan luring dan melaksanakan studi literasi dan kunjungan lapangan
Jumlah dokumen penyusunan Indeks Aktualisasi Pancasila	1. Belum ada kesepakatan pimpinan BPIP terkait indikator mandiri IAP 2. Belum dibahasnya IAP pada tataran dewan pengarah 3. *Refocusing* dan pagu blokir anggaran 4. Kurangnya SDM	Melakukan komunikasi kepada pimpinan secara berjenjang, melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pakar dan pimpinan BPIP
Jumlah dokumen kebijakan strategis dan program teknis inovasi pembudayaan PIP	1. Dalam pelibatan unsur seniman, budayawan dan pelaku kebudayaan dibutuhkan kerja sama dan kesepahaman terhadap penokohan masing-masing pakar dalam birokrasi administrasi keuangan 2. Kurang disejajarkannya kelompok pencipta karya seni budaya dibanding dengan kelompok akademisi dan pakar lainnya 3. *Refocusing* dan pagu blokir anggaran 4. Kurangnya SDM pada direktorat	1. Perangkulan kepada tokoh seni budaya tetap dilaksanakan dengan keterbatasan yang ada 2. Selalu menyampaikan pentingnya keberpihakan pada proses pembudayaan nilai Pancasila yang langsung ke masyarakat kepada unit kerja yang berwenang mengalokasikan anggaran dan juga SDM.
Jumlah kelompok target yang melaksanakan aktualisasi Pancasila setelah pembudayaan	Pengukuran efektifitas dari kelompok target yang melaksanakan actualisasi	Meminta pokmas untuk memberikan respon melalui form isian setelah proses pembudayaan di akhir tahun

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

a) Penyusunan NSPK dalam bentuk Peraturan Badan yang diturunkan dalam Petunjuk Teknis terkait dengan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.

b) Menyusun program/kegiatan dalam kaitan optimalisasi kerjasama PIP dalam rangka effektivitas kerjasama PIP;
c) Mengusulkan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan kegiatan pra dan pasca kerja sama PIP untuk memfasilitasi efektivitas dari suatu kerja sama;
d) Dilakukan koordinasi antara Kedeputian I BPIP dengan Kedeputian lain BPIP untuk penguatan kembali ruang lingkup dari Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati agar mudah dipahami dan dapat di implementasikan dalam kegiatan nyata;
e) Dilakukan peninjauan/evaluasi terhadap nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang telah ditanda tangani yang sudah lewat masa berlakunya agar seluruh kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan optimal.
f) Penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan prioritas kerja Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama;
g) Perlunya tersusun arah kebijakan dan peta jalan (roadmap) Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Komunikasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
h) Melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap target kinerja khususnya dalam segi efektivitas program Sosialisasi dan pengembangan Komunikasi berbasis elektronik berdasarkan Rencana Strategis BPIP tahun 2020-2024;
i) Perlunya penyusunan alur Proses Bisnis Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi secara komprehensif guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik;
j) Perlunya standardisasi materi serta koordinasi peningkatan sinergitas bersama Kementerian/Lembaga yang telah bekerja sama dengan BPIP guna pelaksanaan Sosialisasi maupun Pengembangan Komunikasi secara tepat dan efektif;

k) Peningkatan kapabilitas pegawai di lingkungan Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi dalam rangka pemenuhan dan pencapaian *Output* Kerja serta *Outcome* Kinerja;

l) Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi yang memerlukan sinergitas dan gotong royong antar unit kerja di lingkungan BPIP;

m) Proses pengajuan anggaran yang disesuaikan dengan kegiatan serta kebutuhan secara efisien.Perlu menyusun pedoman umum pelaksanaan pembudayaan Pancasila.

n) Perlu membuat pengorganisasian, fasilitasi dan komunikasi dalam penanganan bencana alam maupun bencana sosial;

o) Penyusunan laporan IAP Tahun 2022 dan review dari tim pakar, Bappenas dan BPS;

p) Perlu disusun penyelenggaraan pembinaan Desa Berdikari Pancasila melalui program KKN di perguruan tinggi secara nasional;

q) Perlu ketetapan dari Kepala BPIP atas hasil penghitungan IAP;

r) Perlu pertimbangan ketua dewan pengarah atas hasil laporan IAP.

2. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan porgram, yaitu:

Tabel 4. 2. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	Belum adanya dasar hukum dalam pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi dalam bentuk Peraturan Badan	Draft arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi yang telah disusun oleh Kedeputian bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi diserahkan kepada biro hukum untuk ditindaklanjuti
Persentase rekomedasi hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila	Belum adanya penguatan pelembagaan BPIP dalambentuk undang-undang; SOP dan format penyelarasan dalam melakukan analisis dan penyelarasan telah dibentuk pada periode TW II ini, akan tetapi masih belum maksimal untuk digunakan dalam proses kegiatan penyelarasan rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator nilai Pancasila	Perlu penguatan pelembagaan BPIP melalui undang-undang; Perlu dimaksimalkan cara yang implementatif dan waktu agar SOP dan format penyelarasan dapat dipalikasikan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan direktorat.
Persetase rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila provinsi/K/L tidak semata-mata ditindaklanjuti dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan	Perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi advokasi PIP yang ditindaklanjuti	Penentuan regulasi atau kebijakan prioritas mengingat jumlah regulasi atau kebijakan yang dikaji berdasarkan renstra hanya 10/tahun, sehingga ada kesulitan untuk memilah isu strategis yang menjadi prioritas dalam regulasi atau kebijakan	Perlunya MoU atau PKS dengan Perguruan Tinggi sebagai mitra guna menunjang pelaksanaan kajian atas penyelesaian dan penanggulangan masalah PIP; Perlunya secara kontinyu melaksanakan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kesbangpol di Daerah sebagai mitra Pemerintah di Daerah dalam rangka PIP
Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila yang ditindaklanjuti	1. Rekomendasi hasil internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila provinsi/K/L tidak semata-mata ditindaklanjuti dikarenakan memerlukan mekanisme tersendiri dalam merevisi atau mencabut peraturan perundang-undangan 2. Belum sinerginya direktorat analisis dan penyelarasan dengan direktorat penyusunan rekomendasi kebijakan dan regulasi dalam hal kajian peraturan perundang-undangan yang diwujdukan dalam rekomendasi dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila	Melaksanakan diskusi dan brainstrooming tim dengan penyesuaian terhadap prioritas di dalam RPJMN, RKP, isu-isu mukthir dan arahan pimpinan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai pancasila yang ditindaklanjuti	Belum sinerginya unit kerja Direktorat Analisis dan Penyelarasan dengan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi dalam hal Hasil Kajian Peraturan Perundang-undangan yang diwujudkan dalam Rekomendasi Regulasi yang bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila.	Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Penyusunan rekomendasi hendaknya menjadi tugas dan fungsi unit Kerja Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program, yaitu:

a) Untuk melaksanakan tugas Deputi bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi sebagaimana diatur dalam organisasi dan tata kerja, perlu disusun arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam bentuk peraturan BPIP;
b) Perlu adanya penyempurnaan tata laksana guna mendukung pelaksanan tugas analisis dan penyelarasan di Direktorat Analisis dan Penyelarasan;
c) Mendorong peningkatan pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Kementerian/Lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya dan Purna Paskibraka Duta Pancasila;
d) Mendorong peningkatan pelaksanaan kajian kebijakan dan regulasi terkait Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan perguruan tinggi dalam rangka penangangan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam PIP;
e) Mendorong peningkatan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang selaras dengan rencana strategis Badan pembinaan Ideologi Pancasila;
f) Dalam hal melakukan kajian atau evaluasi terhadap Kebijakan dan Regulasi, Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi memperhatikan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi No 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP. Pelaksanaan Kajian Kebijakan dan Regulasi Tahun Anggaran 2023 ini Direktorat Penyusunanan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi menggunakan pisau analisis Peraturan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasilai.

3. Kendala dan rekomendasi tindak lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan porgram, yaitu:

Tabel 4. 3. Kendala dan Tindak Lanjut terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil kajian PIP yang dimanfaatkan	Masukan terhadap draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP	1. Menyelesaikan draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP berdasarkan masukan dari pimpinan 2. Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila PAUD s.d SMA Bersama Kemendikbud 3. Penyusunan draf materi PIP bagi Diplomat 4. Penyusunan draf Perban Hakim, Kepala Daerah, ASN, TNi dan Polri 5. Penyusunan materi PIP Paskibraka dan Duta Pancasila
Persentase rekomendasi kajian kebijakan PIP yang ditindaklanjuti	1. Adanya perubahan *timeline* penyelesaian dokumen kebijakan yang mengikuti agenda dan kebijakan pimpinan; 2. Pelibatan *stakeholder* lintas K/L dalam pelaksanaan kajian yang memerlukan jangka waktu koordinasi yang cukup panjang; 3. Pengelolaan jurnal yang melibatkan	1. penyelesaian dokumen kebijakan yang mengikuti agenda dan kebijakan pimpinan; 2. Mengefektifkan pembahasan substansi dalam setiap pertemuan antar *stakeholder* 3. Mengintensifkan komunikasi dengan *stakeholder* terkait untuk mengikuti *timeline* yang telah disepakati 4. Mengusulkan penambahan SDM yang memiliki keahlian dalam

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	beberapa *stakeholder* di luar BPIP, sehingga diperlukan manajemen *timeline* kegiatan yang baik. 4. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah (keterampilan IT). 5. Dokumen otentik yang diperoleh direktorat pengkajian kebijakan PIP merupakan dokumen *second handed.*	pengelolaan Jurnal Ilmiah (keterampilan IT) 5. Diperlukan pengkajian yang lebih lanjut oleh direktorat pengkajian kebijakan PIP ke *National Archives of the Netherlands* dan Arsip Nasional Jepang
Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode PIP yang ditindaklanjuti	Masukan terhadap draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP	1. Menyelesaikan draf 3 (tiga) buku direktorat PM PIP berdasarkan masukan dari pimpinan 2. Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila PAUD s.d. SMA Bersama Kemendikbud 3. Penyusunan draf Perban Hakim, Kepala Daerah, ASN, TNi dan Polri 4. Penyusunan materi PIP Paskibraka dan Duta Pancasila
Persentase rekomendasi kajian implementasi PIP yang ditindaklanjuti	1. Pelembagaan PIP yang masih lemah pada Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, Komponen masyarakat lainnya 2. Kurangnya pelibatan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, Orsospol, Komponen masyarakat lainnya dan Perguruan Tinggi pada proses pengkajian	1. Penyampaian rekomendasi kepada Kedeputian Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Pembudayaan untuk mendorong kerjasama antar Lembaga dalam implementasi pemanfaatan rekomendasi kajian 2. Memaksimalkan anggaran pada Direktorat dalam pelibatan multistakeholder dan kolaborasi dengan pusat-pusat kajian Pancasila di Perguruan Tinggi

Rekomendasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja program yaitu:

a) Menyusun prioritas kegiatan didasarkan pada ketersediaan anggaran agar unit kerja tetap dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal;
b) Komitmen bersama antar unit kerja dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan.
c) Percepatan penyelesaian materi dasar PIP menjadi syarat utama untuk pencapaian tujuan dan indikator kegiatan. Selain itu dalam penyusunan standardisasi materi, bahan ajar dan metoda aparatur negara harus dapat mempertimbangkan metoda pengajaran dengan melihat obyek sasaran aparatur, sehingga dalam penyusunannya sesuai dengan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan audience dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan bersifat kekinian guna menyeimbangi akan pengaruh informasi yang dominan dikuasai oleh arus informasi global.

4. Kendala dan rencana tindak lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal.

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan porgram, yaitu:

Tabel 4. 4. Kendala dan Tindak Lanjut terselenggaranya Diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal dan informal

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase hasil perencanaan dan pengembangan Diklat PIP yang ditindaklanjuti	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP. 2. Gotong royong dalam pengembangan kebijakan/regulasi, pembangunan jejaring kerja, serta pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional yang terstandar belum optimal.	1. Melakukan pembangunan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Melakukan komunikasi strategis secara internal dan eksternal untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dalam penerapan strategi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja.
Persentase Tenaga Pendidik dan Pelatih Diklat PIP yang Bersertikat	Terdapat 181 orang dari total 364 orang yang tidak lulus sertifikasi atau terdapat 52,4% peserta tidak lulus proses sertifikasi, sebagian besar tidak lulus karena pengalaman mengajar yang kurang.	Melakukan evaluasi proses pelaksanaan sertifikasi penceramah/ fasilitator dan pengajar Diklat PIP dan Diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 67 tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/ Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP agar K/L/Pemda/PT mengusulkan calon peserta sertifikasi yang mempunyai pengalaman mengajar minimal 8 tahun.
Persentase NSPK Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP yang ditindaklanjuti	Keputusan Kepala BPIP Nomor 65 tahun 2023 tentang pedoman akreditasi penyelenggara Diklat PIP belum diketahui oleh seluruh K/L/Instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.	Melakukan diseminasi Keputusan Kepala BPIP Nomor 65 tahun 2023 tentang pedoman akreditasi penyelenggara Diklat PIP dengan mengundang K/L/instansi terkait di tingkat pusat dan daerah.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	Pemanfaatan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP tidak bisa direalisasikan secara langsung oleh Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat sehingga tidak bisa mengontrol capaian pemanfaatan dalam pelaksanaan Diklat PIP dan ToT PIP	Bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Diklat dan Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam penggunaan Peraturan BPIP No 2 Tahun 2020, SK Kepala BPIP No 34 Tahun 2021, dan SK Kepala BPIP No 35 Tahun 2021.
Persentase Pendidikan dan Pelatihan PIP yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum Diklat PIP	Direktorat Pelaksanaan Diklat belum melaksanakan Diklat PIP dan ToT PIP pada periode TW I	Bekerja sama dengan Direktorat Pelaksanaan Diklat dalam penggunaan Peraturan BPIP No 2 Tahun 2020, SK Kepala BPIP No 34 Tahun 2021, dan SK Kepala BPIP No 35 Tahun 2021
Persentase tenaga pengajar Diklat PIP yang tersertifikasi.	Belum tersosialisasinya peraturan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/ Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	1. Melakukan komunikasi serta bekerjasama Direktorat Perencanaan Diklat dalam rangka penyelesaian dokumen Cetak Biru Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan komunikasi strategis dengan kementerian dan lembaga dalam rangka penerapan kebijakan strategis dan program teknis terkait pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila secara nasional
Persentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat	Kendala teknis berupa tidak stabilnya jaringan internet pada lokasi pelaksanaan Diklat bagi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengakibatkan peserta kehabisan waktu pengerjaan soal pre-test dan post-test yang diberikan	1. Melakukan survei serta pengecekan bandwidth wifi di lokasi pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Melakukan penambahan bandwidth wifi di lokasi pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase peserta Diklat PIP yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya	Penyampaian laporan aktualisasi dari lulusan diklat terlambat disampaikan	1. Koordinasi intensif dengan para lulusan diklat melalui para penanggung jawab laporan 2. Usulan penambahan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Diklat PIP; 3. Kerja sama penyelenggaraan diklat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, baik Pusat dan Daerah melalui mekanisme *resource sharing*
Persentase Peserta Diklat PIP yang kompetensinya meningkat		

Penyelenggaraan Diklat PIP pada tahun 2023 menghadapi kendala-kendala dari aspek dukungan regulasi/kebijakan, keterbatasan sumber daya, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023 dengan melakukan komunikasi strategis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPIP dalam rangka kolaborasi/gotong royong dalam:

a) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan;
b) Pengembangan dan penerapan kebijakan strategis dan program teknis untuk mewujudkan gotong royong kolaboratif, integratif, dan sinergis dalam pemanfaatan sumber daya (SDM, finansial, sarana prasarana, data informasi) antara BPIP dengan lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Diklat PIP yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional bagi aparatur negara, orsospol, dan komponen masyarakat lainnya;

c) Pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Diklat PIP dan pelaksanaan PIP dalam Diklat calon Paskibraka;

d) Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan

e) Pembangunan sarana dan prasarana pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai standard dan kebutuhan

f) Pengembangan sistem dan metode pelaksanaan Diklat Pembinaan Ideoloig Pancasila berbasis teknologi informasi dan komunikasi

g) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi penyelenggara Diklat PIP serta sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat PIP untuk mendorong penyelenggaraan Diklat PIP secara instansional di lembaga negara, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah; dan

h) Penyempurnaan Instrumen Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat PIP.

5. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Kendala dan faktor penghambat pelaksanaan porgram, yaitu:

Tabel 4. 5. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Pengendalian PIP yang dimanfaatkan	Dokumen dalam proses finalisasi	Finalisasi penyusunan dokumen
Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang	Dokumen dalam proses finalisasi	Finalisasi penyusunan dokumen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
ditindaklanjuti		
Persentase Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila	Purnapaskibraka yang memenuhi kriteria kelulusan Diklat sejumlah 6256 Orang	Berkoordinasi dengan Kedeputian Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan Diklat bagi Purnapaskibraka yang belum memenuhi kriteria kelulusan dan bagi para Purnapaskibraka yang belum mengikuti Diklat
Persentase Rekomendasi Evaluasi Pembinaan PIP yang dimanfaatkan	Dokumen dalam proses finalisasi	Penyelesaian kegiatan sebagai bahan penyusunan dokumen
Persentase Rekomendasi evaluasi Pelaksananaan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	Perubahan penggunaan metodologi menyesuaikan pemutakhiran alat ukur	Finalisasi penyusunan dokumen

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan sasaran program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

a) Menindaklanjuti Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah dibentuk Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Sampai saat ini, tahap pembentukan dan transisi organisasi masih berproses, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan ini masih mengacu pada IKU Tahun 2023;
b) Penyelesaian pengumpulan data rekomendasi dan usulan langkah strategi sebagai alternatif kebijakan yang akan disusun;
c) Mendorong penyelesaian dokumen Arah Kebijakan, GBHIP, dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila;

d) Berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan Kegiatan Diklat bagi Purnapaskibraka;

e) Pemutakhiran instrumen survei RPJMN dimaksudkan untuk meningkatkan validitas survei pada semua segmen;

f) Dengan adanya instrumen yang mutakhir, arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila akan menjadi lebih tepat sasaran

6. Kendala dan rencana tindak lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Tabel 4. 6. Kendala dan Tindak Lanjut terlaksananya Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	Proses revisi yang tidak dapat sekaligus oleh Kementerian Keuangan (DJA). Proses revisi bertahap: *Automatic Adjusment*, Buka Blokir Alokasi IT, Penambahan Anggaran Paskibraka, Revisi Informasi Kinerja	Intensifikasi koordinasi dengan DJA
Persentase laporan keuangan yang tepat waktu keuangan	Proses pencatatan data melalui aplikasi SAKTI sering terkendala maintenance aplikasi	Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Dit. Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) serta melakukan komunikasi berkelanjutan
Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar	Penyampaian Laporan dari unit kerja melebihi waktu yang telah ditetapkan sehingga memperhambat dalam penyusunan laporan kinerja	Mengadakan rapat kepada unit kerja untuk menentukan penanggung jawab dalam penyusunan laporan kinerja
Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	1. Belum terpenuhinya penyelesaian Prosun Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP Nomor 92 Tahun 2022, sebagai target produk hukum Tahun 2023 2. Penyampaian rancangan produk hukum dari unit kerja	1. Akan Menyampaikan nota dinas kepada unit kerja pemrakarsa untuk mengingatkan target penyelesaian Prosun Tahun 2023 2. Menyampaikan nota dinas kepada

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	terkait belum sesuai dengan format baku produk hukum BPIP 3. Penetapan produk hukum BPIP, yang tidak melalui proses penyusunan produk hukum yaitu mellaui review BHO	seluruh unit kerja mengenai format baku produk hukum 3. Melakukan dokumentasi dan pengarsipan
Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti	1. Kurangnya SDM dan diklat substantif 2. Perubahan organisasi dan tata laksana yang dinamis, sesuai kebijakan pimpinan	1. Mengajukan permohonann diklat terkait kepada Biro SDM 2. Melaksanakan kebijakan pimpinan dengan sumber daya yang tersedia
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtangga n, layanan pengelolaan BMN, dan layanan manajemen SDM	1. Luas Area Gedung yang terbatas sehingga kurang mendukung untuk dilakukan penempatan sesuai dengan unit kerja; masing-masing; 2. PPK dan Admin Sirup masing-masing unit kerja tidak melakukan update mandiri setelah dilakukan revisi POK; 3. Luas Area Gedung Kantor yang terbatas sehingga sedikit menghambat proses Pemeliharaan dan Revitalisasi Gedung Kantor Yang Digunakan BPIP dalam hal peletakan bahan-bahan bangunan; 4. Proses perencanaan pengadaan masih bersifat mendadak sehingga menggunakan manual dan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dapat berdampak pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP); 5. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya	1. Menggunakan ruang kerja dengan konsep co-working space memanfaatkan jadwal perjalanan dinas unit kerja; 2. Melakukan dan himbauan kepada PPK dan Admin Sirup untuk melakukan update secara mandiri setelah dilakukan revisi POK pada Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); 3. Pemeliharaan tetap terlaksana namun tidak dapat dilakukan pada saat jam kerja dikarenakan terbatasnya lahan untuk meletakkan bahan-bahan; 4. Perlu komitmen Bersama antara Unit Kerja, PPK, PPBJ, dan Pokja Pemilihan; 5. Perlu adanya komitmen penerapan sistem merit di lingkungan BPIP dengan mulai melakukan

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
	indicator penilaian system merit internal BPIP; 6. Masih adanya beberapa kebijakan internal yang harus dipenuhi terkait dengan kebijakan reward and punishment bagi pegawai di lingkungan BPIP serta belum adanya system informasi yang menggambarkan pemetaan talenta di lingkungan BPIP dan perlu diperbaikinya indikator penilaian system merit internal BPIP	pemetaan talenta pegawai yang didukung dengan sistem informasi yang mumpuni sehingga proses penerapan manajemen talenta bisa dilakukan; 6. Perlunya dukungan dan komitmen dari semua pihak terhadap proses penyelenggaraan manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK
Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan	Kompetensi SDM Biro masih rendah;	Peningkatan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi atau Bimbingan Teknis
Nilai indeks keterbukaan informasi publik BPIP	Kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang dimaksud	Mengajukan permintaan SDM
Nilai pengawasan kearsipan	Pengawasan Kearsipan Internal, masih banyak Unit Kerja yang belum melakukan pengelolaan arsip Aktif pada Unit Kerja dengan Baik, hal tersebut karena BPIP belum memiliki SDM Kearsipan yang focus untuk melakukan Pengelolaan arsip, dan BPIP belum memiliki NSPK Kearsipan yang menjadi syarat pelaksanaan kearsipan Internal	Pengawasan Kearsipan telah dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal pada bulan April 2023, dan pelaksanaan Pengawasan Ekternal telah dilaksanakan pada bulan Mei 2023. pada tanggal 12 Juli 2023 akan dilakukan Verifikasi pengawasan Internal untuk memperoleh 40% Nilai Pengawasan Kearsipan yang akan dikeluarkan oleh Arsip Nasional pada bulan Agustus/September 2023.

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	1. Pengangka Masih adanya denda keterlambatan yang belum dibayarkan oleh Pihak Penyedia untuk temuan atas Pemeriksaan LK BPIP Tahun 2020; 2. Penyusunan HPS, Proses Pengadaan Langsung dan Pembayaran Biaya Konsumsi pada Pekerjaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp30.681.818 Tidak Sesuai Ketentuan; 3. Dan pengamanan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Optimal.	1. Merekomendasikan penerbitan Surat Penagihan kepada pihak penyedia 2. Telah merekomendasikan kepada Sekretaris Utama untuk memerintahkan PPK supaya membuat HPS berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Memorandum Kepala Nomor 1231/PW/08/2022/BPIP perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2022; 3. Telah terdapat dokumen listing Data BMN Intrakomptabel s.d. 31 Des 2022 yang nantinya di pemantauan BPK berikutnya diserahkan kembali.
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	1. Belum ada SK dan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; 2. Belum ada SK dan pedoman atau dokumen tentang manajemen SPBE; 3. Belum memiliki Portal CSIRT BPIP; 4. Belum memiliki portal layanan Satu Data.	1. Perlu koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam pemenuhan eviden yang diperlukan sesuai dengan indikator dari pengampu (unit kerja); 2. Perlu ada dokumen dan turunan kebijakan berupa SK Kepala dalam penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan BPIP;

Indikator Kinerja	Kendala/Masalah	Tindak Lanjut
		3. Perlu disusun SK dan pedoman dokumen tentang manajemen SPBE, saat ini telah memiliki 4 (empat) manajemen SPBE, sedang 4 (empat) manejemen lainnya sedang berproses penyusunan; 4. SK Tim CSIRT sudah ada, dan segera berkoordinasi dengan BSSN untuk pengembangan portal CSIRT dan persiapan Lounching Tim CSIRT; 5. Portal Satu Data BPIP sedang berproses pengembangan, diharapkan pada semester II bisa dimplementasikan
Nilai tingkat Maturitas SPIP (Skala 1 s.d. 5)	1. Keterbatasan SDM Teknis 2. Teknologi yang terus berkembang dengan cepat.	1. Perlu penambahan SDM Teknis 2. Perlu melakukan pengembangan kompetensi SDM

Rekomendasi peningkatan atau perbaikan sasaran program terlaksananya pengendalian dan evaluasi PIP adalah:

a) Perlu adanya penguatan area perbaikan melalui koordinasi antar unit kerja dan/atau unit organisasi di lingkungan BPIP serta penguatan kompetensi APIP dalam rangka penilaian SPIP selaku tim penjamin kualitas;

b) Pada tindak lanjut dari temuan BPK perlu adanya kolaborasi antar unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

c) Perlu peningkatan koordinasi, komunikasi dan perhatian yang lebih dari para pengelola Keuangan (PPK) dalam penyediaan

data Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa serta TP3DN sehingga data yang didapat menjadi representatif dalam menghasilkan kualitas informasi yang dibutuhkan oleh BPKP untuk pelaporannya kepada Presiden RI;

d) Perlu adanya Pembuatan Timeline yang jelas mengenai pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas di BPIP sehingga sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditentukan oleh BPKP serta Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala oleh Biro Pengawasan Internal atas penyampaian data dukung SPIP Terintegrasi sehingga proses Penilaian Mandiri oleh Manajemen tidak mengalami kendala;

e) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlunya untuk BPIP melakukan monitoring beserta evaluasi secara berkala terhadap perencanaan kinerja sampai ke realisasi sehingga dapat memastikan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Target Kinerja mendukung Sasaran Strategis, Hal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan dokumentasi secara lebih tertib terhadap pelaksanaan monitoring tersebut.

f) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam, perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.

g) kompetensi SDM Biro pada Layanan Protokoler masih rendah, menciptakan hambatan dalam memberikan layanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lanjut yang terarah untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut. Prosesnya melibatkan identifikasi gap kompetensi secara mendalam,

perancangan program pelatihan berbasis kompetensi, serta pemantauan progres dan dampak peningkatan kompetensi melalui evaluasi berkala.

h) Pengelolaan arsip aktif pada beberapa Unit Kerja belum optimal, dan belum adanya NSPK Kearsipan sebagai syarat pelaksanaan kearsipan Internal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diusulkan mencakup identifikasi unit dengan performa kearsipan rendah, implementasi NSPK Kearsipan, serta evaluasi dampak pelatihan dan implementasi NSPK terhadap kinerja pengelolaan arsip aktif. Langkah-langkah tindak lanjut diarahkan pada penetapan jadwal rutin untuk pengawasan internal dan eksternal, dukungan tim pengawasan dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan, serta analisis mendalam terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi melibatkan pembentukan tim internal untuk memastikan pengawasan berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem manajemen mutu.

i) Unsur ketaatan pada peraturan yakni atas laporan BPK mengenai ketaatan terhadap peraturan antara kurun tahun 2018-2022 dengan rincian 5 temuan pada tahun 2019, 4 temuan pada tahun 2020, 9 temuan pada tahun 2021, 6 temuan pada tahun 2022, dengan penyelesaian berupa ruang lingkup temuan yang berulang.

j) Salah satu unsur penilaian Manajemen Risiko Indeks yakni adalah penguatan kompetensi penjaminan mutu dan kualitas pelaksanaan MRI melalui pelaksanaan sertifikasi pengelola risiko lingkup BPIP dengan kompetensi pelatihan serta bimbingan teknis Manajemen Risiko sektor Publik baik melalui penyelenggaraan BPKP maupun internal BPIP.

k) Keamanan Administrasi, berupa Aset BMN untuk diberikan nomor urut pendaftaran barang inventaris, serta kelengkapan dokumen Aset pinjam berupa Berita Acara Serah Terimanya

BAB V PENUTUP

Kinerja BPIP harus lebih memberikan dampak dan manfaat dimasa-masa mendatang. Gerak langkah Aktualisasi Pancasila harus dapat sampai pada masyarakat, agar dapat memunculkan rasa percaya diri dan ketangguhan karakter dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Indikator kinerja BPIP harus dapat diukur agar Akuntabilitas Kinerja terjaga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang makin bijaksana dan mengedepankan asas kepatutan.

SALAM PANCASILA!

Jakarta, Januari 2024

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

www.bpip.go.id